



PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PULAU LOMBOK

Tesis

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si

Wike, S.Sos, M.Si, Ph.D



Oleh:

Asfarony Hendra Nazwin

166030101111037

**KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2018

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI
PULAU LOMBOK**

Oleh:

ASFARONY HENDRA NAZWIN
NIM. 166030101111037

telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 31 Mei 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Wike, S.Sos, M.Si, Ph.D
NIP. 19701126 200212 2 005

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905198601 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia TESIS ini di gugurkan serta diproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Malang, 2 Mei 2018

Mahasiswa,

Nama : Asfarony Hendra Nazwin
NIM : 166030101111037
PS : Ilmu Administrasi Publik



HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk
Bangsa dan Negara,
kedua orang tua,
saudara-saudaraku,
serta untuk mereka yang punya kesempatan "berfikir",
tapi tak tertarik untuk "sedikit berfikir lebih".

RIWAYAT HIDUP

Asfarony Hendra Nazwin, Lahir di Kota Mataram pada tanggal 4 Juli 1994, anak kedua dari tiga bersaudara dari Ayah Jumaah Jaelany, ST. dan Ibu Siti Raminah. Menepuh pendidikan dasar di SDN 39 Mataram. Pendidikan menengah ditepuhdi SMPN 15 dan SMAN 7 Mataram. Melanjutkan pendidikan Strata-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, lulus pada tahun 2016. Tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2018.



UCAPAN TERIMAKASIH

Innal hamdalilla, hanya kepada Allah segala puji dan syukur. Tiada kata yang dapat melukiskan segala rahmat yang telah dikaruniakan-Nya atas semua pencapaian dalam hidup penulis. Selesaiannya Tesis ini merupakan salah satu pencapaian yang penuh perjuangan bagi penulis. Hanya dengan pertolongan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

Sehingga dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama proses perkuliahan; Dr. Irwan Noor, MA, selaku Ketu Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik beserta staf, serta kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya selama masa pendidikan;

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si dan Wike, S.Sos, M.Si, DPA, selaku ketua dan anggota komisi pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini;

Kedua orang tua tercinta yang tak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik dan tak pernah putus mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan penulis.

Malang, 2 Juni 2018

Penulis,
Asfarony Hendra Nazwin

RINGKASAN

Asfarony Hendra Nazwin, 166030101111037. *Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Pulau Lombok. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang*. Pembimbing I Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Pembimbing II Wike, S.Sos, M.Si, DPA.

Latar belakang penelitian ini adalah masalah yang sedang dihadapi dalam pembangunan pariwisata yakni masalah *trade-off*, dimana pemenuhan kebutuhan satu sisi dengan tujuan tetap mempertahankan ketersediaan sumber daya. Jawaban atas *trade-off* adalah munculnya kesadaran baru mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata adalah kunci untuk pencapaian salah satu tujuan negara di sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan akan terlaksana apabila dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen untuk melakukan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok yang terefleksi melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok (STMP Lombok) tahun 2015-2019. Sejak adanya kebijaksanaan tersebut, masih terdapat berbagai persoalan; kemiskinan, disparitas, pengangguran, ekonomi lokal, keamanan, dan lingkungan. Sehingga melalui persoalan kemudian penting dilakukan penelitian dalam konteks meneliti proses perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih adanya persoalan-persoalan yang mencangkup dimensi berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok dan untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pada proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. dengan menggunakan teori proses perencanaan oleh Robert R. Mayer (1985). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumentasi. Menggunakan analisis data interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) dan SWOT (Rangkuti, 2008).

Hasil penelitian ini menemukan STMP Lombok belum ditetapkan sebagai produk kebijakan (Pergub). Dalam arti, ada proses perencanaan yang tidak rasional. Sedangkan syarat perencanaan yang rasional oleh Zauhar (2001) adalah perencanaan adalah proses menetapkan kebijakan. Sehingga STMP Gagal menjadi *guidance* untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Impilkasi kekosongan kebijakan terlihat pada tidak terimplementasinya STMP Lombok pada destinasi-destinasi. Kemudian pada sisi teoritis, apabila STMP Lombok disandingkan dengan proses perencanaan Mayer (1985) maka proses Mayer yang sifatnya *flexible* berusaha *inline* dengan STMP Lombok dan Proses Mayer memiliki proses yang kompleks serta memiliki kecenderungan untuk sulit dipahami.

SUMMARY

Asfarony Hendra Nazwin, 166030101111037. *Sustainable Tourism Development Planning On Lombok Island. Thesis, Master Program of Public Administration Sciences, Brawijaya University Malang.* Supervisor I Prof. Dr. Abdul Hakim, M. Si, Advisor II Wike, S. Sos, M. Si, DPA

The background of this research is the problem that is being faced in the development of tourism that is the problem of trade-off, where the fulfillment of one-sided needs with the aim of maintaining the availability of resources. The answer to the trade-off is the emergence of awareness about sustainable tourism development. Tourism development is the key to achieving one of the country's destinations in the tourism sector. Sustainable tourism development will be accomplished if carried out with quality planning and considering aspects of sustainability. West Nusa Tenggara Provincial Government is committed to undertake sustainable tourism development in Lombok Island which is reflected through the Master Plan of Sustainable Tourism Development in Lombok Island (STMP Lombok) 2015-2019. Since the existence of the policy, there are still many problems; poverty, disparity, unemployment, the local economy, security, and the environment. So through the problem then it is important to do research in the context of researching the planning process that has been done so that there are still problems that cover dimension sustainable.

The purpose of this research is to know the planning process of sustainable tourism development in Lombok Island and to know the supporting and inhibiting factors in the process of planning the development of sustainable tourism in Lombok Island. by using the theory of planning process by Robert R. Mayer (1985). Penilitin method used is qualitative with descriptive approach. With data collection methods; observation, interview, documentation. Using interactive data analysis (Miles, Huberman and Saldana, 2014) and SWOT (Rangkuti, 2008).

The results of this study found that Lombok STMP has not been established as a policy product (Pergub). In a sense, there is an irrational planning process. While the requirement of rational planning by Zauhar (2001) is planning is the process of setting policy. So STMP Failed to be guidance to achieve sustainable tourism. The implications of the policy vacancy are seen in the non-implementation of the Lombok STMP in destinations. Then on the theoretical side, if Lombok STMP juxtaposed with Mayer planning process (1985) then Mayer process which is flexible to try inline with Lombok STMP and Mayer Process has a complex process and has tendency to be difficult to understand.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul **Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Lombok (Studi pada Kepariwisataan di NTB)**. Usulan proposal ini disusun dalam rangka penyusunan tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal tesis ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut karena masih terbatasnya pengetahuan penulis. Proses penyusunan proposal tesis ini tidak lepas dari bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak.

Malang, 3 Oktober 2017

Penulis

Asfarony Hendra Nazwin



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
SUMMARY	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Diagram	xvi
Daftar Bagan	xvii
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Definisi Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Pentingnya Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Model Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Proses Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Tahap Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.



2.4.1 Pembangunan Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
2.4.2.1 Pengertian Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
2.4.2.2 Bentuk dan Jenis Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Indikator Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (GSTC)	Error! Bookmark not defined.
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS SOCIAL SETTING	Error! Bookmark not defined.
3.1. Gambaran Umum Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Error! Bookmark not defined.
3.2. Keadaan Penduduk	Error! Bookmark not defined.
3.3. Perekonomian Daerah	Error! Bookmark not defined.
3.4. Pembangunan Sosial	Error! Bookmark not defined.
3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Agama	Error! Bookmark not defined.
3.5. Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
3.5. Kondisi Prasarana	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Transportasi	Error! Bookmark not defined.
3.5.4 Perhotelan	Error! Bookmark not defined.
3.6. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 Visi	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 Misi	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3 Lokasi dan Situs Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3 Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Jenis Data	Error! Bookmark not defined.

4.3.2 Sumber Data..... **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Teknik Pengumpulan Data..... **Error! Bookmark not defined.**

4.5 Instrumen Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

4.6 Metode Analisis Data..... **Error! Bookmark not defined.**

 4.6.1 Analisis Data Interaktif..... **Error! Bookmark not defined.**

 4.6.2 Analisis SWOT..... **Error! Bookmark not defined.**

4.7 Keabsahan Data..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V..... **Error! Bookmark not defined.**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 Hasil Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1 Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.1 Penilaian Kondisi Pariwisata dan Identifikasi Isu Strategis..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.1.1 Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.2 Penentuan Tujuan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.3 Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.3.1 Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.3.2 Strategi Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.5.3 Strategi Industri Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.5.4 Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Berkelanjutan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.1.4 Rencana Aksi..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di NTB..... **Error! Bookmark not defined.**

 1.1.2.1 Faktor Pendukung..... **Error! Bookmark not defined.**

 1.1.2.2 Faktor Penghambat..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 Pembahasan..... **Error! Bookmark not defined.**

 5.2.1 Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok..... **Error! Bookmark not defined.**



5.2.1.1	Penilaian Kondisi Pariwisata dan Identifikasi Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
5.2.1.2	Penentuan Tujuan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
5.2.1.3	Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
5.2.1.4	Rencana Aksi	Error! Bookmark not defined.
5.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
5.2.2.1	Faktor Pendukung	Error! Bookmark not defined.
5.2.2.2	Faktor Penghambat	Error! Bookmark not defined.
BAB VI		Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
6.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.1.1	Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
6.1.2	Faktor Pendukung Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
6.1.3	Faktor Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
6.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka		Error! Bookmark not defined.

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daya Tarik Wisatawan di Masing-masing Kabupaten Kota 6

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu..... 21

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kab/Kota..... 75

Tabel 3.2 Tinggi Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016..... 77

Tabel 3.3 Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kab/Kota..... 79

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Provinsi NTB menurut Kab/Kota 80

Tabel 3.5 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB menurut Kab/Kota..... 82

Tabel 3.6 Banyaknya Umat Beragama di Kabupaten/kota 85

Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT 107

Tabel 5.1 Masalah produksi yang dialami oleh perajin dan pengusaha dan usulan solusi di Desa Wisata Banyumulek..... 125

Tabel 5.2 Perkembangan Jumlah Wisatawan ke Provinsi NTB Tahun 2010-2014 128

Tabel 5.3 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Wisata..... 131

Tabel 5.4 Luas Kabupaten/kota di Pulau Lombok 134

Tabel 5.5 Daya Tarik Wisata di Maing-masing Kabupaten/kota 138

Tabel 5.6 Tujuan dan Strategi Pembangunan Destinasi 161

Tabel 5.7 Tujuan dan Strategi Pemasaran Pariwisata 163

Tabel 5.8 Tujuan dan Strategi Industri Pariwisata 165

Tabel 5.9 Tujuan dan Strategi Kelembagaan Pariwisata..... 166

Tabel 5.10 Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 1..... 168

Tabel 5.11 Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 2..... 173

Tabel 5.12 Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 3..... 178

Tabel 5.13 Rencana Aksi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Tujuan 4..... 183

Tabel 5.15 Rencana Aksi Pembangunan Kelembagaan dan SDM Tujuan 5..... 188

Tabel 5.16 Rencana Aksi Pembangunan Kelembagaan dan SDM Tujuan 6..... 191



Tabel 5.17 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pariwisata Tujuan 7 194

Tabel 5.18 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pariwisata Tujuan 8 200

Tabel 5.19 Matriks Faktor Strategi Internal 208

Tabel 5.20 Matriks Faktor Strategi Eksternal 210

Tabel 5.21 Hasil Perhitungan IFAS 213

Tabel 5.22 Hasil Perhitungan EFAS 215

Tabel 5.23 Alternatif Strategi Pemngembangan Pariwisata Berkelanjutan 249



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Skema Pembangunan Berkelanjutan 46

Gambar 2.2 Model Pembangunan Berkelanjutan..... 48

Gambar 3.1 Peta Provinsi NTB..... 76

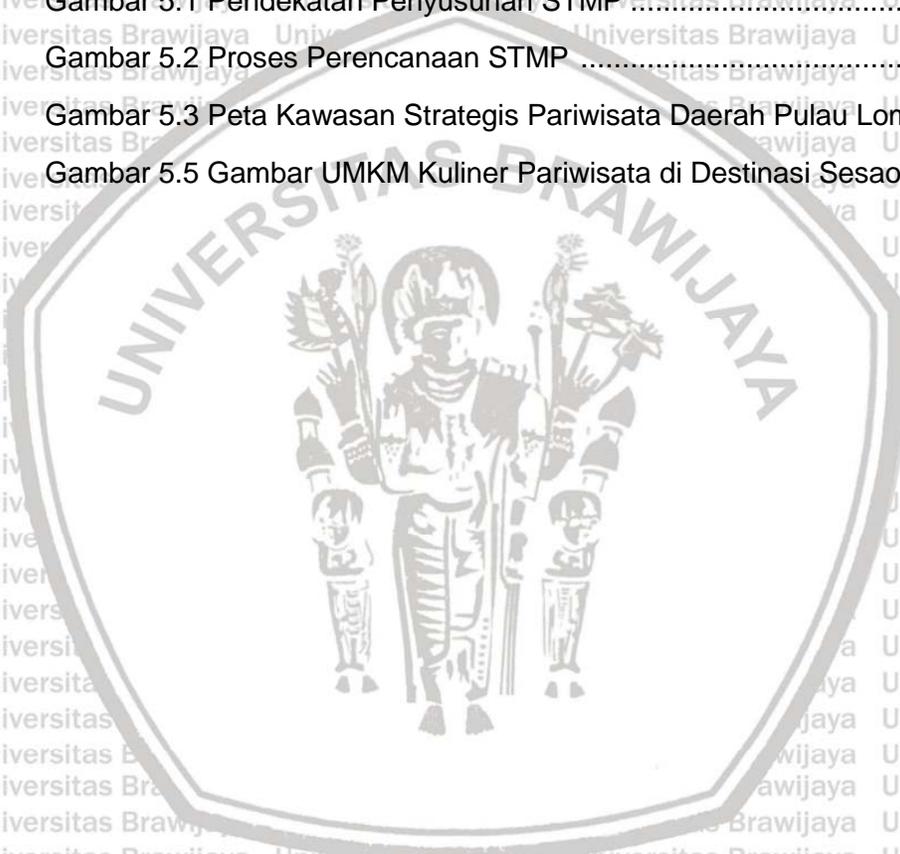
Gambar 4.1 Komponen Analisis Data model interaktif 103

Gambar 5.1 Pendekatan Penyusunan STMP 118

Gambar 5.2 Proses Perencanaan STMP 120

Gambar 5.3 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Lombok..... 137

Gambar 5.5 Gambar UMKM Kuliner Pariwisata di Destinasi Sesaot..... 198



Daftar Diagram

Diagram 1.1 Data statistik kunjungan wisata ke NTB 5 tahun terakhir 8

Diagram 3.1 Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016 88



Daftar Bagan

Bagan 2.1 Flow of Stages In Rational Planning Proses 37

Bagan 5.1 Outline Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan di Lombok 147



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di abad 21 saat ini menunjukkan bahwa pariwisata mampu memberikan dampak positif pada perekonomian suatu negara melalui berbagai peluang seperti; peluang investasi, peluang terhadap pendapatan negara, peluang pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan peluang usaha sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata juga dipandang sebagai sektor strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan suatu negara. Sehingga, dalam rangka meningkatkan pendapatan tersebut dan upaya mendorong perekonomian, berbagai negara di dunia terus berupaya menyusun strategi-strategi pembangunan pariwisata yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan, bahwa kepariwisataan adalah sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pasific (UNESCAP) adalah lembaga internasional cabang pembangunan regional PBB untuk kawasan Asia Pasifik menyatakan bahwa pariwisata dapat menjanjikan pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan devisa bagi suatu negara, penerimaan pajak dan investasi baru, keanekaragaman ekonomi lokal dan

menciptakan lapangan pekerjaan. Pariwisata juga berperan untuk perbaikan infrastruktur yang bermanfaat bagi wisatawan dan penduduk. Lebih jauh lagi, banyak pekerjaan yang diciptakan oleh pariwisata seperti pekerjaan dengan penghasilan yang rendah sekalipun namun tetap merupakan sebuah tahapan penting di dalam memperbaiki kehidupan masyarakat miskin (UNESCAP, 2003:9).

Dolezal dan Trupp (2015) dalam tulisannya yang berjudul *Tourism and Development in Southeast Asia* (Pariwisata dan Pembangunan di Asia Tenggara) juga menyatakan:

Over the last decades, Southeast Asia has experienced a rapid growth in international tourist arrivals from 21.2 million in 1990 to 96.7 million in 2014 (UNWTO, 2015a, p. 4). Tourism is no longer only regarded as a mere income generator, creator of jobs, or socio-cultural phenomenon, but also serves as a tool to foster beneficial and locally driven development in all its dimensions (Scheyvens, 2002). Recent years have shown a steady increase in tourism being used as a tool for development and poverty alleviation in the world's less developed countries (Darma Putra & Hitchcock, 2012; Holden, 2013; Novelli, 2015).

(Selama dekade terakhir, Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam kunjungan wisata internasional dari 21,2 juta di tahun 1990 menjadi 96,7 juta di tahun 2014 (UNWTO, 2015a, Hal. 4). Pariwisata tidak lagi hanya dianggap sebagai penghasil pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan, atau fenomena sosial budaya saja, namun juga berfungsi juga sebagai alat untuk mendorong pengembangan yang bermanfaat dan didorong secara lokal di seluruh dimensinya (Scheyvens, 2002). Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang stabil dalam pariwisata yang digunakan sebagai alat untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara yang kurang berkembang di dunia (Darma Putra & Hitchcock, 2012; Holden, 2013; novelli, 2015).

Melalui urian tersebut, Dolezal dan Trupp (2015) menjelaskan bahwa sektor pariwisata selama dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhannya mampu berdampak pada pendapatan negara dan

penciptaan lapangan pekerjaan. Stabilitas pariwisata juga bermanfaat untuk pencapaian tujuan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung (Dolezal dan Trupp, 2015:117).

Sedarmayati (2005:14) dalam Colina (2015:5) memaparkan kinerja pariwisata di Indonesia secara nasional selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Pada masa krisis, sektor pembangunan yang berbasis kekuatan lokal terbukti dapat lebih cepat membaik dibandingkan dengan sektor-sektor lain dengan bergantung pada kegiatan impor (Ardika, 2005 dalam Colina, 2015:5). Pada kondisi seperti ini pariwisata mampu tumbuh menjadi sektor alternatif yang berpotensi mendorong pembangunan di saat sektor lainnya sedang mengalami kemunduran. Selain demikian, pariwisata juga mampu menjalankan fungsinya sebagai katup pengaman di saat krisis dan memberikan dampak ganda yang relatif besar pada pertumbuhan sektor lainnya.

Di Indonesia, pembangunan pariwisata masuk dalam skala prioritas pembangunan (Colina, 2015:6), sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi destinasi wisata dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak dan sumber daya alam yang melimpah. Terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki laut dan hamparan pantai yang indah sebagai tempat wisatawan melakukan aktivitas wisata bahari seperti *diving*, *snorkeling* dan *surfing* yang di dukung dengan iklim yang tropis. Berada pada posisi yang strategis yakni pada posisi lintasan garis khatulistiwa, maka Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun sehingga aktivitas kepariwisataannya tidak dipengaruhi oleh pergantian musim. Walaupun demikian, menurut data dari *Sustainable Tourism Master Plan* (STMP Lombok, 2015-2019) hingga tahun 2013 kunjungan wisatawan dunia ke Indonesia kurang dari angka

1% dari jumlah wisatawan dunia yakni 8,6 juta wisatawan internasional. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Malaysia yang mencapai 25,7 juta dan Thailand 26,7 juta kunjungan, Indonesia masih jauh berada di bawah jumlah kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut. Maka dengan demikian Indonesia masih harus meningkatkan kemampuan pengelolaan potensi wisata yang ada melalui proses pembangunan agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya di dunia.

Abdoellah (2015:3) berpandangan bahwa pembangunan adalah sebagai kata kunci yang penting dalam pemerintahan di semua negara. Dikatakan penting karena istilah tersebut dianggap telah menyatu atau melekat dengan keberadaan suatu negara. Sehingga pembangunan umum diartikan sebagai upaya-upaya untuk memajukan kehidupan negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang telah ada untuk mencapai tujuan baru yang melalui berbagai tahap-tahap yakni (1) Perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi (Abe, 2004:16).

Ahmad dan Bajwa dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul *Regional Development Planning: Issue and Realities dalam 41st IsoCarp Congress 2005* mengatakan bahwa pembangunan memiliki tujuan, yakni tujuan investasi sosial. Namun, kemajuan manusia bukan akibat dari pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, sebuah bangsa harus mengalokasikan sumberdayanya kepada pembangunan sosial, dan rencana untuk menyalurkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan untuk kemajuan masyarakat (Colina, 2015:2). Sehingga keberadaan rencana merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang meliputi proses kebijakan, tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan dan kebijakan administratif (Dimock dalam Pasolog, 2002:20). Terkait hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa dalam proses pembangunan diperlukannya

perencanaan dan proses perencanaan menjadi penting karena keberhasilan suatu program pembangunan ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun sebelumnya.

Menurut Syamsi (1986:56) menyatakan bahwa perencanaan yang baik dan berkualitas umumnya harus meliputi unsur-unsur pokok yang terkandung di dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya meliputi: (1) Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan; (2) Mengapa (*why*), yakni alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan; (3) Bagaimana dan berapa (*how and much*), yakni mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, dan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana; (4) Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek); (5) Kapan (*when*), yakni pemilihan waktu/timing yang tepat dalam pelaksanaannya; (6) Siapa (*who*), yakni menentukan siapa orang yang akan menjadi aktor didalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subyek pelaksanaan. Namun terkadang juga diperlukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi obyek pelaksanaan kegiatan.

Maka berdasarkan hal tersebut, kualitas perencanaan akan dapat dilihat apabila suatu dokumen perencanaan telah mengandung unsur-unsur pokok tersebut. Sehingga, jika suatu perencanaan itu berkualitas, maka akan mudah untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan itu sendiri. Namun, tidak demikian jika melihat pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

Perencanaan yang berkualitas seringkali tidak linear dengan implementasi program pembangunan. Peraturan Daerah Provinsi NTB (Perda NTB) No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2013-2028 misalnya sebagai dokumen perencanaan yang di sahkan kedalam bentuk Perda yang merepresentasikan perencanaan yang berkualitas.

Selanjutnya perda tersebut secara umum melalui kondisi empiris pariwisata NTB dan melalui kewajiban meratifikasi kesepakatan internasional (Agenda 21) dan dengan segala kompleksitas permasalahannya baik itu masalah lingkungan yang kemudian menjadi dasar untuk mengarah pada penyelenggaraan pariwisata di Pulau Lombok yang berorientasi pada pertumbuhan, berkelanjutan, dan tata kelola yang baik. Perda tersebut juga memberikan aturan terhadap potensi wisata yang dijadikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) guna mencapai keberlanjutan. Berikut tabel KSPD Provinsi NTB:

Tabel 1.1

Daya tarik wisata di masing-masing Kabupaten/Kota

KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah)	Jenis atau Potensi Wisata	Kawasan Wisata
KSPD Mataram dan sekitarnya	Budaya, religi, kuliner, belanja dan MIEC.	Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Banyumulek, Taman Narmada, Suranadi dan Lingkar.
KSPD Senggigi – Tiga Gili dan sekitarnya	Pantai, bawah laut, olahraga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner.	Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Senaru, Dusun Tradisional segenter.
KSPDK Kuta Mandalika dan sekitarnya	Pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari dan budaya.	Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Belanak, Sade, Jute Gili Indah.
KSPD Rasismas – Sembalun dan sekitarnya	Agro, pegunungan, dan kuliner	Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq.
KSPD Alasutan dan sekitarnya	Agro, budaya, dan kuliner.	Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulaun Bungin.
KSPD Pototano – Maluku dan sekitarnya	Pantai, olahraga berbasis bahari, budaya, dan kuliner.	Pototano dan Maluku
KSPD Batu Hijau – Dodorinti dan sekitarnya	Pegunungan, tambang, budaya, dan kuliner.	Batu Hijau dan Dodorinti
KSPD SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya	Pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner.	Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora, dan Teluk Saleh.
Hu'u dan sekitarnya	Pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, kuliner, dan pegunungan	Hu'u
KSPD Teluk Bima dan sekitarnya	Pantai, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner.	Lawata, Amahami, Kota Bima.
KSPD Waworada Sape dan sekitarnya	Pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner.	Waworada, Sapedan Wane

Sumber: Perda NTB No 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan seringkali tidak linear dengan keadaan empiris. Artinya bahwa perencanaan yang berkualitas tidak dapat menjamin tercapainya program pembangunan jika melihat keadaan empiris yang ada. Dengan demikian kualitas perencanaan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata, hanya terbukti mampu mendorong perekonomian suatu daerah (Kanom, 2015: 25) melalui peningkatan jumlah konsumsi pariwisata oleh wisatawan atau peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Akan tetapi tidak demikian jika melihat aspek sosial baik dari pelestarian budaya maupun kelestarian lingkungan yang kemudian menjadi korban dari pertumbuhan ekonomi.

Berikut data statistik kunjungan wisatawan:

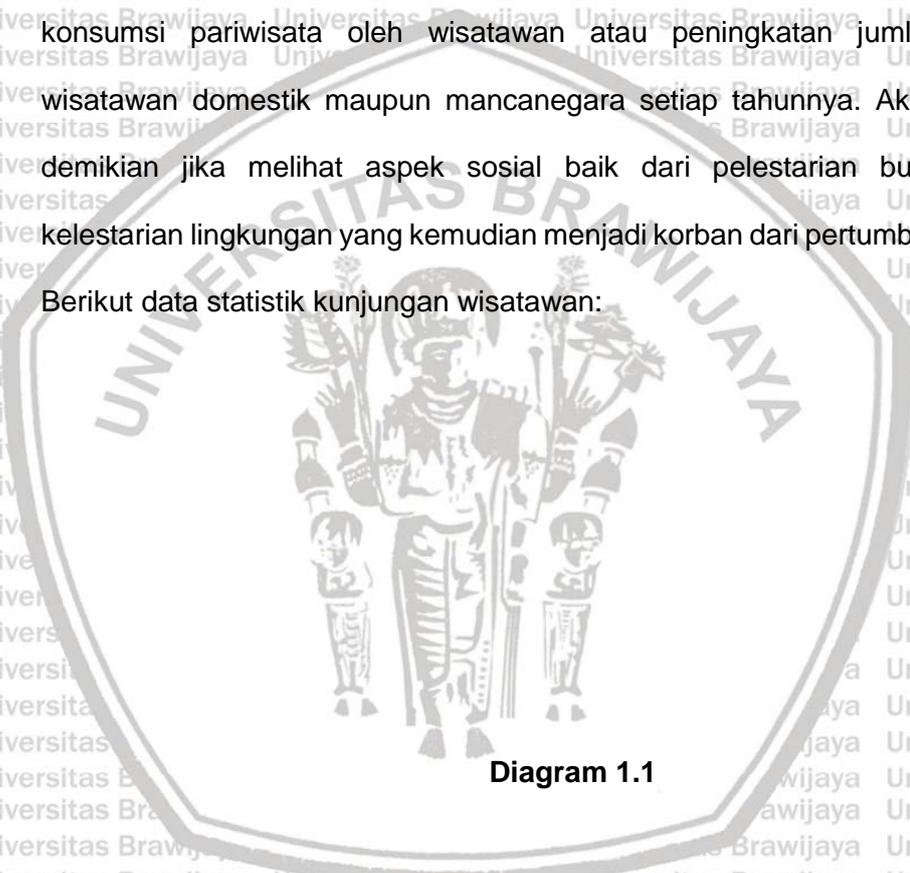
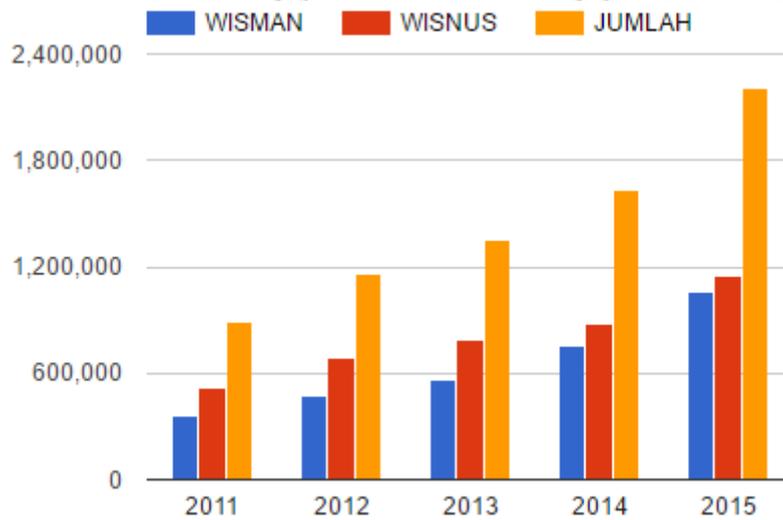


Diagram 1.1

Data statistik kunjungan wisata ke NTB 5 tahun terakhir



Diakses melalui website resmi Dispar NTB

Merujuk pada data statistik yang dirilis Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB yang diakses melalui website resmi (www.disbudpar.ntbprov.go.id) menggambarkan bahwa kunjungan wisatawan ke NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana di tahun 2011 kunjungan wisatawan yang terdiri dari wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik sejumlah 886,880 ribu wisatawan kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya (2013) yakni sejumlah 1,357,602 juta wisatawan. Sedangkan di tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan sejumlah 2,210,527.

Peningkatan tersebut kemudian yang menjadi sumber pertumbuhan perekonomian NTB melalui meningkatnya konsumsi kendaraan dan logistik untuk kegiatan pariwisata (BPS NTB, 2017). Dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB jika ditinjau melalui data statistik 3 tahun terakhir yakni tumbuh sebesar 5,06 persen di tahun 2014, 5,82 persen di tahun 2016 dan di tahun 2017 sebesar 6,00 persen (BPS NTB, 2017). Hal demikian menunjukkan bahwa setiap tahun perekonomian di Pulau Lombok mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan

tersebut tentunya tidak terlepas dari pengaruh dan mendominasinya sektor pariwisata (Jawa Post, 2017).

Namun di samping pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sebaliknya Rahardian (2016) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Strategi Pembangunan Berkelanjutan* menjelaskan bahwa masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lainnya.

Pembangunan pariwisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan maupun budaya pada akhirnya akan berdampak negatif, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Artinya pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan dan tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari (Rahardian, 2016:47).

Berbagai masalah sosial dan lingkungan kemudian menjadi kritik terhadap pencapaian dari pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan selanjutnya secara umum menjadi dasar pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak tahun 1798 oleh Malthus yang mengkhawatirkan terhadap ketersediaan lahan di Inggris karena akibat dari ledakan penduduk yang pesat.

Satu setengah abad kemudian, Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972 dalam Rahardian, 2016:47) yang pada intinya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan terbatasnya

ketersediaan sumber daya alam, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan dengan secara terus menerus atau *on sustainable* basis (Rahardian, 2016:47).

Secara umum, Salim (1990) dalam Rahardian (2015) menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi selanjutnya, dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Rahardian, 2015:48). Sejatinya konsep keberlanjutan adalah konsep yang sederhana, namun bersifat kompleks, sehingga pengertian dari keberlanjutan sendiri sangat multi-interpretasi (Fauzi, 2009: 117-129 dalam Fauzi, 2014:43). Namun pemikiran yang sangat mengemuka dan digunakan oleh banyak pihak yakni pembangunan berkelanjutan yang mengusung tiga dimensi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian mengusung dimensi yang sama, pandangan tentang bentuk keterkaitan antara ketiga dimensi tersebut bervariasi. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini menjadi semakin mengemuka dengan ditawarkannya SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menjadi pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 (Fauzi, 2014:42).

Gambaran capaian pembangunan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup untuk menilai pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Karena secara konstitusional, pariwisata suatu daerah, apabila ingin mencapai pariwisata berkelanjutan. Maka dalam aktivitas pembangunannya harus berpedoman pada beberapa aspek destinasi berkelanjutan yang dimuat pada Peraturan Menteri Pariwisata No 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang terdiri dari; pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan; pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan pelestarian lingkungan.

Ditinjau dari fakta empiris, observasi awal, maupun hasil dari data sekunder menunjukkan aktivitas pariwisata di Pulau Lombok tidak sepenuhnya mengakomodir 4 kriteria pariwisata berkelanjutan diatas. Salah satu misalnya, pada aspek pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal di beberapa destinasi seperti di Kuta Mandalika dan sekitarnya menunjukkan dominasi kepemilikan property (usaha pariwisata) asing dan dalam negeri. Sedangkan dalam hal pemanfaatan ekonomi lokal searusnya berdampak positif pada masyarakat asli sekitar destinasi. Namun faktanya masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap pemanfaatan ekonomi itu sendiri. Hal ini dibuktikan melalui persoalan penggusuran masyarakat lokal yang terjadi di Pantai Kuta Mandalika dalam rangka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. Berdasarkan data sekunder (suarantb.com) menunjukkan 30 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di ujung Desa Kuta pada akhirnya digusur. Artinya, melalui data tersebut, pembangunan pariwisata yang terjadi serta berorientasi pada pembangunan ekonomi cenderung memiliki persoalan sosial dan lingkungan selanjutnya.

Pembangunan pariwisata di Pulau Lombok juga dihadapkan pada masalah tingginya angka kemiskinan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya di satu sisi provinsi NTB mengalami pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lainnya secara bersamaan, provinsi NTB dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan. Sehingga, Presiden Joko Widodo melalui media online: suara NTB, menyatakan dan mempertanyakan tingginya angka kemiskinan di Pulau Lombok, padahal selama tiga tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi di NTB di atas nasional (suarantb.com). Maka ini menandakan bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan belum mampu meng-akomodir semua prinsip keberlanjutan dari suatu proses pembangunan.

Melalui data sekunder, nilai investasi asing di sektor pariwisata NTB misalnya yang bersumber pada PMA (Penanaman Modal Asing) sejumlah Rp.

348,71 miliar, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang hanya berjumlah RP. 1,13 miliar (bali.bisnis.com). Data tersebut merepresentasikan bahwa penyebab kemiskinan berpotensi disebabkan oleh tingginya disparitas dan tingginya jumlah investasi asing dibandingkan dengan investasi dalam negeri maupun lokal. Padahal yang menjadi salah satu syarat pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah memberikan manfaat ekonomi lokal melalui upaya pemberian kemudahan pengusaha lokal.

Selain masalah sosial, asalah lingkungan seperti yang diungkapkan oleh *Global Sustainable Tourism Council* Jerman (GSTC Jerman) di tahun 2015 menyatakan bahwa pariwisata di Pulau Lombok selanjutnya memiliki persoalan baru seperti pencemaran lingkungan dan masalah sampah yang diakibatkan oleh perilaku pengunjung (Harian Terbit, 2015), minimnya aksesibilitas bagi semua, kepuasan pengunjung yang kurang, manajemen pengunjung yang kurang baik, penggunaan air tanah yang tinggi, rendahnya kualitas air dan rendahnya partisipasi publik (GSTC, 2016). Selanjutnya lebih lugas di jelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB (Lalu Moh. Faozal) melalui media online (Lombok Post, 2016) juga memaparkan masalah yang sedang dihadapi pariwisata NTB yakni masalah perambahan hutan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas destinasi wisata. Ini menunjukkan bahwa persoalan sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih menjadi persoalan serius yang harus disikapi oleh semua pihak.

Sebelumnya juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang bersumber dari tingginya penggunaan akomodasi yang berdampak langsung pada penurunan kualitas udara di Pulau Lombok akibat dari tingginya polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor. Menurut data yang diakses melalui www.dislhk.ntbprov.go.id membuktikan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU)

Provinsi NTB mengalami penurunan kualitas dari tahun 2015 dengan nilai 92,27 menjadi 81,2 di tahun 2016. Tentunya hal demikian terjadi karena akibat dari tingginya angka kunjungan wisatawan di tahun 2016 sejumlah 2,9 juta jiwa (www.kicknews.today) yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara di tahun yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Kanom, 2015:33-38) memaparkan beberapa kendala yang menghambat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok (salah satunya di Destinasi pantai Kuta Lombok) adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM adalah salah satu penyebab lambatnya perkembangan kepariwisataan di kuta Lombok. Faktor SDM sangat menentukan eksistensi pariwisata, sehingga sebagai salah satu industry jasa, sikap dan kapasitas kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata yang diberikan kepada wisatawan yang secara spontan akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas aktivitas wisata yang dilakukan (Pitana dan Diarta, 2019 dalam Kanom, 2015:33).
2. Manajemen Destinasi yang belum baik sebagai penghambat destinasi pariwisata berkelanjutan. Oleh sebab itu, hitam-putih pengelolaan destinasi pariwisata akan menentukan tiga hal elementer berikut; (1) keunggulan dan daya tarik suatu destinasi bagi pasar wisatawan, (2) tingkat manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya bagi daerah, dan (3) daya saingnya diantara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik, 2012 dalam Kanom, 2015:33).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan yang mampu berdampak pada terancamnya kelestarian lingkungan. Faktor lingkungan memungkinkan akan mendapatkan dampak positif maupun negatif dari aktivitas kepariwisataan yang ada dan sebaliknya faktor kepariwisataan juga

akan memungkinkan mendapat dampak positif maupun negatif dari lingkungan sekitar (Sunaryo, 2013 dalam Kanom, 2015:33).

4. Keamanan dan kenyamanan juga sebagai isu yang semakin besar dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan dan pariwisata (István Kövári dan Krisztina Zimányi, 2011 dalam Kanom 2015:33).

Dengan demikian, proses pencapaian tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok pada beberapa kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan telah berada pada jalurnya (*on the right track*), namun tetap memiliki implikasi negatif selanjutnya. Kemudian beberapa kriteria lainnya justru tidak pada jalurnya. Sehingga berdasarkan berbagai persoalan tersebut, maka perlu untuk dilakukannya sebuah penelitian untuk melihat proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk Pulau Lombok dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari keberlanjutan dan keseimbangan di antara prinsip keberlanjutan maupun diantara kriteria pariwisata berkelanjutan seperti, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok?
2. Bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis;

1. Proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis (teoritis) maupun praktis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok;
- b. Secara praktis, manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan referensi, pengetahuan empirik, dan memperluas wawasan untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau rekomendasi terhadap perbaikan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kanom dalam penelitiannya tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, menjelaskan bahwa untuk mengembangkan wisata Kuta Lombok memiliki kendala meliputi Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas dalam berinteraksi dengan wisatawan lokal maupun mancanegara; manajemen destinasi yang lemah, lemahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, dan kenyamanan dan keamanan. Sehingga untuk itu diperlukan suatu strategi khusus yang meliputi kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dan strategi-strategi manajemen destinasi yang menggunakan pendekatan spiritual dan realitas sosiologis, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Carmen Padin dalam penelitiannya di tahun 2012 tentang *A Sustainable Tourism Planning Model: Components and Relationship*, menjelaskan model perencanaan pariwisata yang berkelanjutan secara eksplisit menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan pada prosesnya. Karena partisipasi dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan tatkala adanya pembahasan mengenai proses keberlanjutan dalam pariwisata (Liu, 2003 dalam Padin:512).

Selain itu, untuk proses keberlanjutan, partisipasi pemangku kepentingan harus hadir di setiap masing-masing dimensi dengan mekanisme yang khusus sebagai tujuan untuk mengkoneksikan antara dimensi satu dengan lainnya (seperti ekonomi dengan sosial; sosial dengan ekologi; dan antara ekologi dengan ekonomi) baik oleh para aktor, aktor sektor swasta maupun publik yang

selanjutnya disebut sebagai lingkungan yang mendukung keberlanjutan (Sa'nchez Dan Pulido, 2008; WTO, 2004, 2008 dalam Padin:512).

Blanca et al dalam penelitiannya di tahun 2016 dengan judul *Toward A Critical Ecofeminist Research Paradigm for Sustainable Tourism*, menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tidak sepenuhnya merangkul tiga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, perspektif holistik, futuristik dan keadilan. Sehingga karena tidak dapat merangkul prinsip dasar tersebut kesinambungan atau pembangunan pariwisata yang keberlanjutan seringkali tidak dapat tercapai (Sharpley, 2000:84). Sehingga untuk itu, paradigma baru seperti ecofeminis kritis yang didasari ekokultural dan etika perawatan dan perkembangan yang berkaitan dengan gender menjadi dapat menjadi pertimbangan dalam mencapai keberlanjutan.

Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus melalui penelitiannya di tahun 2014 tentang Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, menyatakan bahwa beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks pembangunan berkelanjutan juga menunjukkan capaian pembangunan berkelanjutan yang belum optimal karena aspek lingkungan menjadi koreksi terhadap kemajuan yang dicapai oleh dimensi ekonomi dan dimensi sosial.

Musaddun Wakhidah Kurniawati et al dalam penelitiannya di tahun 2013 tentang Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan, menyatakan Kawasan di pantai Wonokerto memiliki potensi secara fisik berupa adanya kampung nelayan dan TPI yang dapat menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat. namun masalah selanjutnya yakni belum terakomodasinya kebutuhan penunjang sarana dan prasarana baik itu fasilitas umum pendukung penunjang aktivitas pariwisata.

Rahardian dalam penelitiannya di tahun 2016 tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan, menyatakan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan terdapat empat komponen yang harus diperhatikan yakni pembangunan yang menjamin pemerataan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.

Dolezal dan Trupp dalam penelitiannya di tahun 2015 tentang *Tourism and Development in South Asia*, menyatakan bahwa pariwisata sebagian besar mengakibatkan masalah seperti kesehatan, seperti penyakit umum (misalnya HIV dan malaria), kematian anak, dan kesehatan perempuan. Kemitraan dengan lembaga pembangunan dan LSM yang tidak terkait langsung dengan pariwisata merupakan jalan kedepan untuk menghasilkan manfaat pembangunan (Novelli dan Hellwig, 2011 dalam Trupp:119). Diungkapkannya sifat kontradiktif pariwisata sebagai alat untuk pengembangan, diilustrasikan oleh contoh seperti perpindahan wisatawan pada acara yang bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan Timur Indonesia atau disebut perpindahan wisatawan pada acara tersebut melalui kehadiran pejabat pemerintah dan kurangnya dampak positif lokal yang sejak awal dijanjikan. Hal ini pada akhirnya menggambarkan bagaimana pariwisata dikonseptualisasikan sebagai alasan untuk menawarkan program pembangunan, daripada melihat pariwisata itu sendiri sebagai jalur pembangunan (Erb, 2015, hal, 159).

Jonatan Kohler dalam penelitiannya di tahun 2013 tentang *Globalization and Sustainable Development: Case Study on International Transport and Sustainable Development*, menyatakan bahwa mempercepat perdagangan internasional tanpa adanya perubahan dalam transportasi, maka hal itu dapat mempercepat pertumbuhan emisi dari pengiriman dan penerbangan. Dalam hal keberlanjutan, manfaat sosial dan ekonomi bagi LDCs (Negara-negara

terbelakang) dari partisipasi dalam perdagangan yang bertanggung jawab secara sosial dapat diimbangi oleh peningkatan emisi lingkungan. Sehingga yang dibutuhkan adalah peningkatan penekanan pada keberlanjutan dalam rantai pasokan global dan proses inovasi sosial dan teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi dapat diatasi melalui peningkatan partisipasi LDC dan NIC (negara industri baru) dalam rantai pasokan global.

Ni Komang Ayu Astiti dalam penelitiannya di tahun 2016 tentang Sumber Daya Arkeologi dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Maluku, mengatakan Kecenderungan segmen pasar saat ini berimplikasi pada meningkatnya minat wisatawan berkunjung ke wilayah-wilayah yang menawarkan atraksi wisata dengan berkunjung ke kawasan arkeologi. Potensi dan peluang dapat dimanfaatkan dengan pengembangan situs arkeologi yang ada. Pariwisata harus dijalankan dengan pertimbangan aspek ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada semua stakeholder dengan adil dan menyeluruh sebagai upaya menekan kemiskinan. Aspek sosial budaya harus menghormati dan mempertahankan keunikan, orisinalitas, otentisitas dan keragaman. Sedangkan aspek lingkungan pentingnya dilakukan zonasi yang sesuai dengan lahan yang diperuntukkan.

Guler Aras dan David Crowther dalam penelitiannya di tahun 2013 tentang *Sustainable Practice: The Real Triple Bottom Line*, mengatakan bahwa Definisi pembangunan berkelanjutan oleh Brundtland menyesatkan. Dalam penelitian ini penulis telah mencoba untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran yang merupakan pra-kondisi keberlanjutan jauh berbeda dari implikasi triple bottom line. Dan pada intinya tidak dapat mempertimbangkan keberlanjutan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor yakni lingkungan, hak asasi manusia dan tata

kelola yang sekaligus merupakan pendekatan berbasis kontrak sosial dan mewakili aspek distribusi.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diperoleh implikasi yang telah diidentifikasi menjadi tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan/ Kanom/ 2015.	Deskriptif Kualitatif	<p>(a) Dalam mengembangkan wisata kuta lombok terdapat kendala yakni; SDM, manajemen destinasi yang lemah, kesadaran masyarakat yang rendah akan kebersihan lingkungan, kenyamanan dan keamanan yang kurang.</p> <p>(b) Diperlukan strategi khusus yang meliputi kerja sama yang baik antara pihak yang terlibat.</p> <p>(c) Meningkatkan kualitas SDM melalui ketersediaan sekolah tinggi pariwisata, penataan destinasi wisata secara detail dengan pendekatan spiritual dan realitas sosiologis, dan pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pariwisata yang berkelanjutan, namun perbedaannya terletak pada perumusan strategi yang relevan terhadap destinasi wisata untuk mencapai keberlanjutan dan menggunakan variabel keberlanjutan yang berbeda.</p>
2	A Sustainable Tourism Planning Model: Components and Relationship/ Carmen Padin/ 2012.	Deskriptif	<p>(a) Model perencanaan pariwisata yang berkelanjutan secara eksplisit menyatakan, dan bahkan menekankan, pentingnya "pemangku kepentingan" dalam prosesnya.</p>	<p>Memiliki kesamaan terhadap pembahasan pariwisata yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keterlibatan aktif masyarakat dalam</p>





No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>(b) Partisipasi para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan tatkala adanya pembahasan tentang proses keberlanjutan dalam pariwisata (Liu, 2003).</p> <p>(c) Pemangku kepentingan harus hadir di masing-masing tiga dimensi dengan mekanisme khusus yang harus dibentuk sebagai tujuan untuk menghubungkan setiap dimensi dengan para aktor, baik di sektor swasta maupun publik dalam apa yang disebut sebagai "lingkungan yang mendukung" keberlanjutan (Sa'nchez Dan Pulido, 2008; WTO, 2004, 2008).</p> <p>(d) mengkoneksikan antara; ekonomi dengan sosial; sosial dengan ekologi; dan antara ekologi dengan ekonomi.</p>	merumuskan di segala dimensi keberlanjutan.
3	Toward A Critical Ecofeminist Research Paradigm for Sustainable Tourism/ Blanca A. Camargo, Tazim Jamal, and Erica Wilson / 2016.	Deskriptif	Sharpley (2000) berpendapat bahwa kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tidak sepenuhnya merangkul tiga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, perspektif holistik, futuritas, dan keadilan sehingga karena itu tidak dapat mencapai kesinambungan.	Memiliki kesamaan terhadap pariwisata yang berkelanjutan dan memandang bahwa pariwisata berkelanjutan tidak sepenuhnya merangkul tiga prinsip dasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada pertimbangan paradigma baru yakni ecofeminimis kritis yang didasari ekokultural dan

No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
4	Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia/ Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus/ 2014.	Kuantitatif	(a) Perkembangan beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum seimbang nya pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (b) Indeks Pembangunan Berkelanjutan juga menunjukkan capaian pembangunan berkelanjutan yang belum optimal karena aspek lingkungan menjadi koreksi terhadap kemajuan yang di capai oleh dimensi ekonomi dan sosial.	etika perawatan dan perkembangan yang berkaitan dengan gender. Kesamaan terhadap penelitian ini terletak pada bagaimana pembangunan berkelanjutan itu dapat tercapai, namun yang menjadi pembeda adalah melalui metode yang digunakan untuk melihat pembangunan berkelanjutan. Selain itu terletak pada ruang lingkup penelitian yang lebih luas (lingkup nasional).
5	Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan/ Musaddun, Wakhidah Kurniawati, et., al./2013	Mix Methode	(a) Kawasan di pantai Wonokerto memiliki potensi secara fisik berupa adanya kampung nelayan dan TPI yang dapat menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat. (b) Namun masalah yang ada di Kawasan Wisata Pesisir Pantai Wonokerto adalah belum terakomodasinya kebutuhan penunjang seperti sarana dan prasarana baik itu fasilitas umum pendukung penunjang aktivitas pariwisata.	Relevansinya dengan penelitian ini adalah, kesamaan dalam membahas pariwisata yang berkelanjutan. Akan tetapi memiliki perbedaan pada sisi metodologi yakni Mix Methode berupa pemetaan potensi dan melakukan scoring dan pembobotan pada lokasi wisata di Pekalongan. Selain itu, pembeda terletak pada fokus wisata pesisir.
6	Strategi Pembangunan Berkelanjutan/ A.	Kualitatif Deskriptif	Prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan terdapat	Sama-sama membahas mengenai perencanaan

No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
H. Rahardian/ 2016			empat komponen yang harus diperhatikan yakni pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.	berkelanjutan. Namun terletak perbedaan dimana penelitian ini hanya membahas pembangunan berkelanjutan yang masih bersifat universal dan tidak ada titik tekan pada fokus dimensi, dan setting lokasi.
7	Tourism and Development in South Asia/ Dolezal, C., and Trupp, A./ 2015	Deskriptif	(a) Sebuah studi oleh Novelli dan Hellwig (2011) tentang kontribusi pariwisata terhadap MDGs menunjukkan bahwa pariwisata sebagian besar mengakibatkan masalah kesehatan, seperti penyakit umum (misalnya HIV dan malaria), kematian anak, dan kesehatan perempuan. Kemitraan dengan lembaga pembangunan dan LSM yang tidak terkait langsung dengan pariwisata merupakan jalan kedepan untuk menghasilkan manfaat pembangunan. (b) Diungkapkannya sifat kontradiktif pariwisata sebagai alat untuk pengembangan, diilustrasikan oleh contoh seperti perpindahan wisatawan pada acara yang bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan	Persamaan dalam pembahasan pembangunan di bidang pariwisata, namun yang jadi pembeda adalah lokus penelitian yang berada pada cakupan yang lebih luas yakni di Asia Tenggara yang meliputi beberapa negara. Selain itu, penelitian ini menekankan ada arah dan strategi yang salah dalam memanfaatkan pariwisata sebagaimana seharusnya menjadi jalur pembangunan itu sendiri, bukan sebagai alasan pembangunan.



No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			Timur Indonesia atau disebut perpindahan wisatawan pada acara tersebut melalui kehadiran pejabat pemerintah dan kurangnya dampak positif lokal yang sejak awal dijanjikan. Hal ini pada akhirnya menggambarkan bagaimana pariwisata dikonseptualisasikan sebagai alasan untuk menawarkan program pembangunan, daripada melihat pariwisata itu sendiri sebagai jalur pembangunan (Erb, 2015, hal, 159).	
8	Globalization and Sustainable Development: Case Study on International Transport and Sustainable Development/ Jonatan Kohler/2013.	Analisis kualitatif	(a) Mempercepat perdagangan internasional tanpa adanya perubahan dalam transportasi, maka hal itu dapat mempercepat pertumbuhan emisi dari pengiriman dan penerbangan. Dalam hal keberlanjutan, manfaat sosial dan ekonomi bagi LDCs dari peningkatan perdagangan umum atau partisipasi dalam perdagangan yang bertanggung jawab secara sosial dapat diimbangi oleh peningkatan emisi lingkungan. (b) Yang dibutuhkan adalah peningkatan penekanan pada keberlanjutan dalam rantai pasokan global dan proses inovasi	Relevansinya adalah berada pada konteks <i>sustainable development</i> , namun fokusnya terletak pada studi kasus transportasi yang mana transportasi dimanfaatkan sebagai alat distribusi barang atau pasokan kebutuhan menjadi perbedaan yang jelas dalam penelitian ini.

No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
9	Sumber Daya Arkeologi dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Maluku/ Ni Komang Ayu Astiti/ 2016.	Kualitatif	<p>social dan teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kesinambungan ekonomi dapat diatasi melalui peningkatan partisipasi LDC dan NIC dalam rantai pasokan global.</p> <p>(a) Kecenderungan segmen pasar saat ini berimplikasi pada meningkatnya minat wisatawan berkunjung ke wilayah-wilayah yang menawarkan atraksi wisata dengan berkunjung ke kawasan arkeologi. Potensi dan peluang dapat dimanfaatkan dengan pengembangan situs arkeologi yang ada.</p> <p>(b) Pariwisata harus dijalankan dengan pertimbangan aspek ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada semua stakeholder dengan adil dan menyeluruh sebagai upaya menekan kemiskinan. Aspek sosial budaya harus menghormati dan mempertahankan keunikan, orisinalitas, otentisitas dan keragaman. Sedangkan aspek lingkungan pentingnya dilakukan zonasi yang sesuai dengan lahan yang diperuntukkan.</p>	<p>Sama-sama memberikan pembahasan mengenai pentingnya pembangunan yang berkelanjutan pada level. Hanya saja yang perbedaan pada penelitian ini terletak pada jenis wisata yang merupakan wisata warisan budaya.</p>
10	Sustainable Practice: The Real Triple Bottom Line/	Deskriptif	(a) Definisi pembangunan berkelanjutan oleh Brundtland menyempatkan. Dalam	Memiliki relevansi secara umum pada praktik proses dan kondisi

No.	Judul/ Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Guler Aras and David Crowther/ 2013.		penelitian ini penulis telah mencoba untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran yang merupakan pra-kondisi keberlanjutan jauh berbeda dari implikasi triple bottom line. (b) Pada intinya tidak dapat mempertimbangkan keberlanjutan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor yakni lingkungan, hak asasi manusia dan tata kelola yang sekaligus merupakan pendekatan berbasis kontrak sosial dan mewakili aspek distribusi.	keberlanjutan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kritik terhadap pendekatan dan komposisi berkelanjutan yang secara umum seharusnya mempertimbangkan lingkungan, hak asasi manusia dan tata kelola.

Sumber: Data Primer (diolah) 2017

Dari 10 penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan konsep yang terlihat sederhana namun sebenarnya memiliki kompleksitas tersendiri. Pembangunan berkelanjutan baik di sektor pariwisata maupun diluar sektor pariwisata hampir seluruhnya menunjukkan tidak adanya keseimbangan diantara tiga dimensi dasar dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri termasuk dalam indikator keberlanjutan dan beberapa kritik terhadap dimensi yang seharusnya menjadi perhatian baru dalam pembangunan berkelanjutan yakni dimensi feminisme dan hak asasi manusia.

Akan tetapi umumnya dimensi lingkungan selalu menjadi dimensi yang mengkoreksi kemajuan dari dimensi lainnya, terutama pada dimensi ekonomi.

Karena khususnya pariwisata selalu dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah namun tidak diimbangi dengan kepedulian lingkungan.

Melalui beberapa penelitian di atas hanya melihat dan mengkritisi aspek lingkungan secara umum. Tidak terfokus pada indikator pencapaian keberlanjutan

di semua dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan demikian perbedaan sekaligus keterbaruan (*Novelty*) dalam penelitian ini terletak pada proses perencanaan dan merekomendasikan strategi baru di beberapa destinasi wisata yang ditentukan melalui kriteria destinasi yang telah memiliki status berkelanjutan. Selain itu, penelitian ingin melihat bagaimana pemangku kepentingan merumuskan atau berproses atau merencanakan pariwisata yang berkelanjutan dan dianalisis menggunakan pendekatan proses perencanaan oleh Robert. R. Mayer. Penelitian ini juga akan meninjau kondisi pariwisata berkelanjutan saat ini dengan memanfaatkan analisis SWOT sebagai dasar untuk merumuskan strategi selanjutnya di beberapa destinasi pilihan di Pulau Lombok. Digunakan beberapa indikator pariwisata yang diadopsi dari *Global Sustainable Tourism Council* dan sekaligus menjadi fokus analisis atau kriteria keberlanjutan di masing-masing dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.

2.2 Perencanaan

2.2.1 Definisi Perencanaan

Perencanaan merupakan awal mula proses administrasi, dimana perencanaan sebagai proses mendesain kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dengan cara sebaik mungkin untuk pencapaian tujuan dalam dimensi tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari administrasi. Dalam manajemen publik, seorang penemu ilmu administrasi modern mengenalkan tujuh hal yang menjadi fungsi utama dalam manajemen publik yang dapat diaplikasikan di pemerintahan antara lain yakni, perencanaan (*planning*), mengorganisir (*organizing*), pendistribusian tugas dalam kerja sama (*staffing*), mengarahkan (*directing*), koordinasi (*coordinating*), melaporkan (*reporting*), penganggaran (*budgeting*) (Gulick, 1937

dalam Frederickson et al, 2012:101). Hal tersebut pada konteks manajemen dalam administrasi publik kerap disebut singkat sebagai *POSDCORB*, dimana dalam prosesnya menyatakan bahwa perencanaan (*planning*) sebagai bagian dari fungsi manajemen dalam mengatur dan mengorganisir sumber daya atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, studi perencanaan juga mengadopsi teori administrasi publik lain seperti teori pengambilan keputusan, teori keputusan rasional, teori jejaring (Conyers, 1991). O'Toole (1997) dalam Frederickson (2012) menyatakan bahwa Teori jejaring merupakan teori yang penting karena permasalahan yang semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal pemerintah. Adanya suatu masalah dapat disebabkan oleh bermacam sebab sehingga pemerintah tidak mampu menyelesaikan jika tidak dengan jejaring, artinya bahwa permasalahan yang dialami dengan sifatnya yang kompleks mampu diselesaikan dengan jejaring (*networking*) yang kemudian menghasilkan suatu keputusan dan berlanjut menjadi bagian dari perencanaan.

"....Such problems are result of multiple causes, and typically span more than one jurisdiction. A single agency will not able to address these and from across levels of government..." (masalah-masalah disebabkan oleh banyak sebab dan menyinggung lebih dari satu kewenangan. Satu lembaga tidak mungkin sanggup menyelesaikan masalah-masalah tersebut tanpa bantuan aktor di dalam dan di luar pemerintah serta dari lintas level pemerintah).

Perencanaan dapat diartikan sebagai; penentuan hari depan, pengelolaan, pengambilan keputusan, pembuatan keputusan yang terintegrasi, prosedur formal untuk memperoleh hasil yang nyata di berbagai bentuk keputusan untuk sistem yang terintegrasi. Secara sederhana merencanakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan pilihan langkah

alternatif sebagai cara mencapai tujuan. Jika dilihat secara kompleks dengan tataran tingkatan perencanaan yang paling tinggi bahwa perencanaan berarti memahami dan melakukan analisis gambaran daerah terkini, kemungkinan-kemungkinan risiko penghambat tujuan, hal-hal yang membatasi, menentukan masa depan yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Namun pada intinya perencanaan adalah pengambilan keputusan alternatif sebagai wujud dari keinginan mencapai tujuan (Sumpeno, 2011).

Zauhar (2001:23) dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Publik" memaparkan bahwa perencanaan (*Planning*) adalah menetapkan apa yang seharusnya dilakukan. Kegiatan ini meliputi penelitian, peramalan, penentuan tujuan, perumusan kebijaksanaan, pengembangan program dan menetapkan prosedur tata kerja. Keseluruhan kegiatan ini harus dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi. Pada umumnya, perencanaan membutuhkan waktu yang lebih banyak bagi eksekutif tingkat atas jika di bandingkan dengan mereka yang berada pada tingkat yang lebih bawah.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (1964) yang dikutip dari Inu Kencana dan Welasari (2015:153) menyatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlakukan untuk mencapai hasil yang telah di inginkan dan di tetapkan. Selain itu, perencanaan dipandang sebagai upaya perhitungan dan penentuan daripada apa yang akan dilakukan atau dijalankan dalam rangka mencapai suatu prapta (*objektive*) yang tertentu, di mana, bilamana, oleh siapa, dan bagaimana tata cara untuk mencapainya (Atmosudirdjo dalam Kencana dan Welasari, 2015:153).

Sehingga pada intinya, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif (Tjokroamidjojo, 1995:2-7). Namun perlu diingat bahwa dalam proses perencanaannya, idealnya adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dengan manusia, karena dunia ini semakin dekat dengan ketidakpastian. Maka atas dasar hal tersebut, perencanaan membutuhkan kemampuan mengubah sesuatu yang tersembunyi menjadi sesuatu yang terukur (Nugroho dan Wirhatnolo, 2011).

2.2.2 Pentingnya Perencanaan

Perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam proses manajemen. Bahkan menjadi sesuatu yang vital keberadaannya, karena dari perencanaan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Arti penting perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1989:9) adalah:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan adanya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terdapat hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tersebut akan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan ruang dan kesempatan untuk proses pemilihan alternatif-alternatif mengenai cara yang terbaik (*the best alternatif*) atau

kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (*control/evaluation*).

2.2.3 Model Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen pembangunan menjadi sangat penting karena memiliki fungsi sebagai alat koordinasi seluruh *stakeholder*; sebagai penentu arah; minimalisasi ketidakpastian; minimalisasi inefisiensi sumber daya dan; penetapan standar dan pengawasan kualitas (Solihin, 2014). Pada prinsipnya bahwa dalam perencanaan program sangat bergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Asumsi dan tujuan perencanaan tersebut tidak ada yang seragam, melainkan bergantung pada model perencanaan yang digunakan. Berikut (Gilbert dan Specht 1977 dalam Suharto 2015:73-75) menyatakan beberapa model dalam perencanaan.

a. Model Rasional Komprehensif

Model perencanaan ini merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Prinsip utamanya dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasarkan pada fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai

tertentu yang relevan. namun dalam model ini memiliki beberapa kelemahan yang melekat seperti: alternative yang diusulkan oleh model ini bersifat komprehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan acapkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik (Suharto, 2015:73-74).

b. Model Inkremental

Lahirnya model ini berusaha menjawab kekurangan dari model sebelumnya, yakni model rasional komprehensif. Model incremental (penambahan) memiliki prinsip utama bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan pada aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model sebelumnya, yang menekankan kepada perubahan fundamental. Model ini memberikan kritik bahwa seharusnya perencanaan tidak perlu menentukan tujuan dan kemudian kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan pilihan terhadap yang berbeda secara marginal saja.

c. Model Pengamatan Terpadu

Pada model ini bersifat campuran antara model pertama dan ke dua, sehingga disebut sebagai model pengamatan terpadu (*mixedscanning model*).

Model ini dikembangkan oleh Amita Etzioni melalui karyanya *Mixed Scanning:*

A Thord Approach to Decision Making yang dimuat dalam *jurnal Administration Review*, XXVII pada desember 1967. Model ini merupakan jalan tengah terhadap model pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan, yakni antara pendekatan fundamental dan incremental. Keputusan yang bersifat fundamental dilakukan dengan menjajagi alternative-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Sementara

keputusan yang bersifat incremental atau tambahan dibuat dalam konteks yang ditentukan oleh keputusan fundamental.

d. Model Transaksi

Prinsip utama dari model ini menekankan kepada keterlibatan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan atau penerima manfaat dari pembangunan. Sehingga model ini dapat dilakukan dengan mengadakan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus diantara mereka yang terlibat.

2.2.4 Proses Perencanaan

Proses perencanaan merupakan tahapan-tahapan yang panjang dan saling berkaitan. Tjokroamidjojo (1994:57-61) memaparkan beberapa tahapan dan proses perencanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, yang meliputi:

- a. Tinjauan keadaan, yang berupa tinjauan sebelumnya memulai suatu rencana (*review before take of*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana pada sebelumnya (*review of performance*).
- b. Perkiraan keadaan masa akan datang yang dilalui rencana. Atau disebut dengan *forecasting*.
- c. Penetapan tujuan dari rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara untuk mencapai rencana tersebut.
- d. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Untuk bisa lebih operasionalnya kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasarkan pemilihan alternatif yang paling baik. Hal ini berdasarkan *opportunity* dan skala prioritas.

e. Persetujuan rencana dimanifestasikan ke dalam bentuk pengambilan keputusan.

2. Penyusunan program rencana

Pada tahapan ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu rincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga yang akan melaksanakan program-program pembangunan. Pada tahap ini seringkali memerlukan bantuan dengan cara penyusunan atau *flowchart*, *operation plan* atau *network plan*.

3. Pelaksanaan rencana

Dalam tahap ini, pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharannya. Kebijakan-kebijaksanaan pun perlu diikuti pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

4. Pengawasan atau pelaksanaan rencana

Pengawasan memiliki tujuan untuk mengusahakan agar pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan rencana; apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya; dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

5. Evaluasi

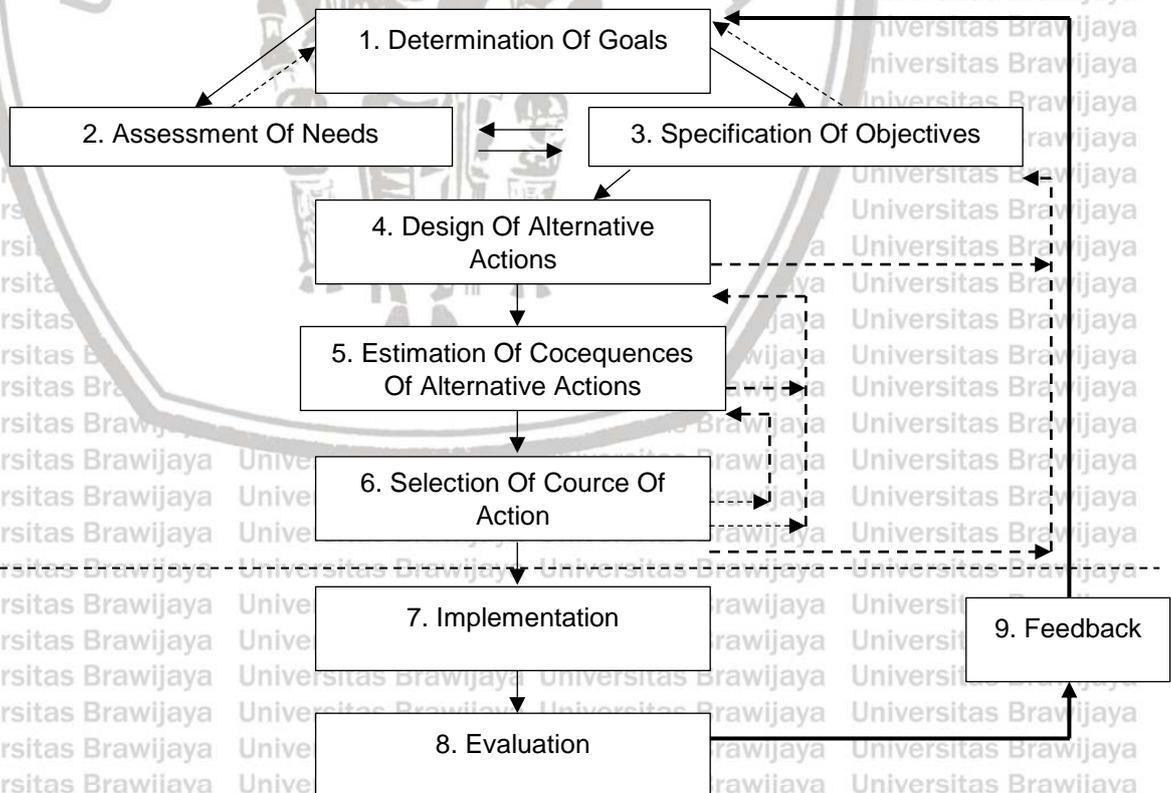
Evaluasi merupakan kegiatan yang membantu kegiatan pengawasan.

Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang dilakukan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Dari hasil evaluasi ini, selanjutnya dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan itu sendiri.

Proses perencanaan umumnya melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya. Diawali dengan pengambilan kebijakan (*policy making*), kemudian dikembangkan melalui proses perencanaan yang kemudian diimplementasikan. Perencanaan digambarkan dan di ibaratkan sebagai tahap peralihan antara pengambilan kebijakan dan implementasi, karena perencanaan dimanfaatkan sebagai alat untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum ke dalam program-program aksi yang lebih nyata (Conyers & Hills, 1990:15).

Selanjutnya menurut Mayer (1985: 104), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari 9 (sembilan) langkah atau tahapan yang tersaji dalam bagan berikut ini:

Bagan 2.1
Flow of Stages In Rational Planning Process



Sumber: Policy and Program Planing, Robert Mayer 1985.

Mengacu Pada Gambar 2.1, bahwa untuk langkah ketujuh (7) sampai dengan kesembilan (9) tidak tergolong dalam bagian proses perencanaan, melainkan merupakan bagian dari proses implementasi atau pelaksanaan dari suatu perencanaan itu sendiri atau disebut dengan implementasi, namun seringkali menjadi satu kesatuan dalam menggambarkan proses pembangunan. Maka penjelasan langkah pertama sampai dengan langkah keenam adalah sebagai berikut:

1. Determination of Goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai (*value*) yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Assessment of Needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3. Specification of Objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Design of Alternative Actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternative tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Estimation of Consequences of Alternative Actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6. Selection of Course of Action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Mayer (1985:16) menambahkan bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (policy making). Bahkan keduanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah. James E Anderson (1978: 3) mengatakan bahwa kebijakan adalah "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (Tindakan yang sengaja dilakukan dan diikuti oleh aktor dalam menghadapi masalah-masalah yang menjadi perhatian).*"

Islamy (2003:77) membagi perumusan kebijakan dalam beberapa tahap (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (agenda setting), (c) perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan (f) penilaian kebijakan. Menurut pendapat penulis, langkah kelima dan keenam bukan termasuk dalam proses perumusan kebijakan tetapi termasuk dalam siklus kebijakan.

Di dalam perencanaan pembangunan, ada beberapa hal yang harus dipahami, seperti a) teori atau konsep perencanaan pembangunan berdasarkan disiplin ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu administrasi; b) cakupan sektoral, substansi dan pengukuran perencanaan; c) sumber pembiayaan perencanaan apakah dari pusat atau negara, apakah bersumber melalui daerah, atau bahkan swasta dan donatur internasional; d) penyelenggaraan

perencanaan, pemerintah pusat atau daerah, swasta, lembaga masyarakat atau umum; e) cakupan bentuk perencanaan, program, kegiatan atau lainnya; f) pemetaan implementasi, tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan; g) mekanisme pengendalian atau penganggaran dan evaluasi (Wirharnolo dan Dwidjowijoto, 2006).

Perencanaan pembangunan baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, Nurcholis dan Herfan (2009) memaparkan bahwa dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: a) memahami kondisi daerah melalui analisis keadaan daerah hingga diperoleh profil daerah; b) perumusan kebijakan yaitu perumusan kebijakan yang akan dilakukan yang mencakup cita-cita atau visi dan misi, tujuan, arahan, strategi, dan prioritas pembangunan; c) perumusan dan penetapan program-program atau rencana tindak sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan; d) tahapan akhir yakni monitoring dan evaluasi.

2.3 Pembangunan

2.3.1 Pengertian Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh yang memberikan jasa untuk pembangunan dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri.

Artinya bahwa pembangunan adalah sebagai proses perubahan sosial menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Sehingga secara implisit, pembangunan ekonomi maupun pariwisata dan di sektor mana-pun perlu adanya administrasi yang cocok dan sepadan untuk itu dan kemudian di diharapkan akan menghasilkan administrasi pembangunan yang lebih baik, termasuk pelaksanaannya (Tjokroamidjojo, 1995:176-179).

Secara sederhana pembangunan diartikan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur alami ditentukan oleh dimensi-dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Perubahan alami dipengaruhi oleh siapa yang berperan dalam perubahan sosial tersebut. Kesejahteraan merupakan output dari hasil segala aktivitas negara (Wihartnolo dan Dwidjowijoto, 2006). Menurut Tjokroamidjojo (1998) dalam *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional* pembangunan adalah orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial budaya.

Dalam konteks perubahan sosial, Salim (2002) memaknai pembangunan sebagai suatu proses perencanaan sosial (*sosial plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sosial yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Secara ekonomi capaiannya diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto, *Gross National Product*, Produk Domestik Bruto, *Gross Domestic Product*. Pemerataan dirumuskan dengan indeks gini yang akan mengukur ketimpangan.

Pembangunan muncul dari berbagai peristiwa yang paling optimistis tentang kepercayaan rasional modern, yang tumbuh menjadi praktis dan teknologis. Sehingga dalam pembangunan dikenal tiga paradigma yaitu pertumbuhan, kesejahteraan dan kebutuhan pokok. Paradigma pertumbuhan dekat dengan kemajuan di bidang ekonomi. Paradigma kesejahteraan menggunakan indikator sosial. Kemudian selanjutnya yakni paradigma kebutuhan pokok menggunakan indikator pemenuhan kebutuhan pokok. Maka muncullah istilah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Konsumsi, Kesehatan Masyarakat, Pertumbuhan ketenagakerjaan dan lain-lain (Naf, 2005).

1.3.3 Tahap Pembangunan

Pandangan lain yang hadir melalui Rostow dalam Budiman (1960:25-28) yang terkenal dengan lima tahapan pembangunan yang termuat dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*, menjelaskan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimana pun dan kapan pun juga. Sehingga lebih spesifik lagi tahap pembangunan yang menurut Rostow dalam Budiman (1995:25-28) yakni:

1. Masyarakat Tradisional

Perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masyarakat masih belum banyak dikuasi. Karena itu, masyarakat pada tahap ini di pandang masih memiliki kepercayaan atau dikuasi kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar diri manusia. Manusia seperti ini masih dianggap tunduk kepada alam, dan belum bisa menguasai alam.

2. Prakondisi untuk Lepas Landas

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergetak. Pada satu titik, dia mencapai posisi pra kondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar atau masyarakat lainnya yang sudah lebih maju. Perubahan tersebut tidak datang dari faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri.

3. Lepas Landas

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan

sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas.

4. Bergerak ke Kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, agar dapat mengatasi persoalan pertambahan penduduk.

5. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Karena pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi, produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar hingga menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

2.4 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

2.4.1 Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan pemikiran yang baru. Fauzi (2004) dalam Fauzi dan Oxtavianus (2014:42) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan telah lama menjadi atensi para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul pada beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat dari pesatnya ledakan penduduk. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan semakin menguat setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan tulisan yang berjudul *The Limit to Growth*, yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam (Fauzi dan Oxtavianus, 2014:43).

Fauzi dan Oxtavianus, (2014:43) selanjutnya menjelaskan bahwa perhatian terhadap aspek keberlanjutan mencuat kembali pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau biasa dikenal dengan *Brundland Commission* yang menerbitkan buku dengan judul *Our Common Future*. Berdasar terbitan tersebut menjadi pemicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Moldan dan Dahl (2007:2) dalam Fauzi dan Oxtavianus (2014:43) memberikan pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan dapat definisikan sebagai pembangunan yang mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi terbatas. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga acapkali dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai *continuing without lessening* (melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi). Artinya bahwa, pembangunan itu terus dilakukan tanpa mengurangi sumber daya yang di alokasikan terhadap pembangunan itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kembali mutu kehidupan dengan tetap berupaya tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Secara sederhana, definisi pembangunan berkelanjutan menurut ketua *World Commission on Environment and Development* (WCED) Gro Harlem Brundtland dalam Baker (2006) adalah sebagai pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk

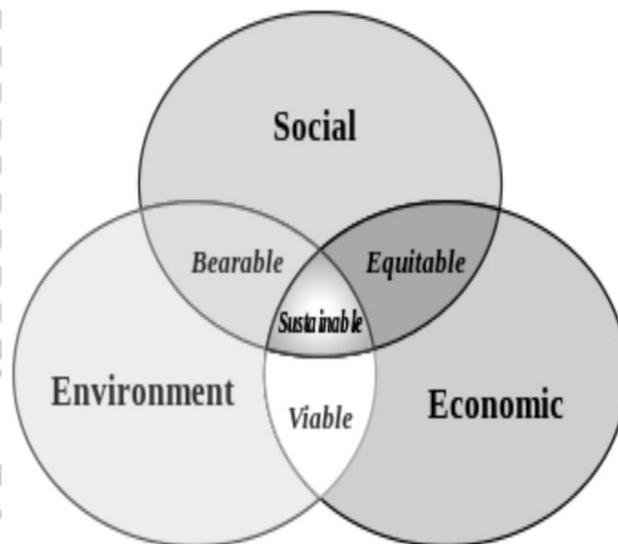
memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Rini, 2015:36). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi, dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan (Rini, 2015:36).

Pembangunan berkelanjutan populer sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan SDGs (Sustainable Development Goals) menggantikan MDGs (Millennium Development Goals) sebagai acuan perundingan pembangunan mulai tahun 2015. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebutkan ada tiga dimensi yang saling berkaitan dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan, yakni:



Gambar 2.1

Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations



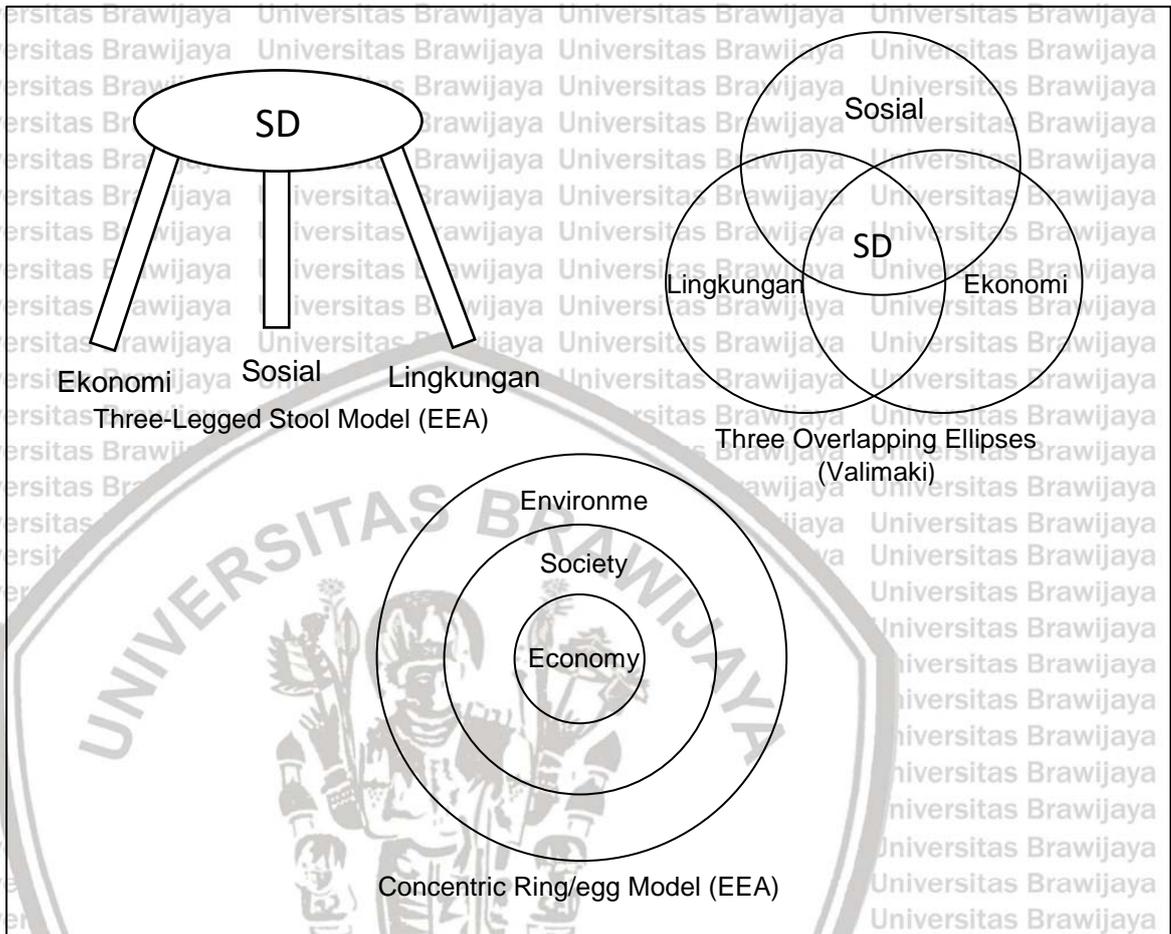
Sumber: Rini, 2015 dalam Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. DPR RI, 2015

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan berada pada titik tiga pilar temu tiga pilar tersebut. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan menekankan pada penyelesaian masalah secara terintegrasi dan komprehensif dengan memerhatikan ketiga pilar tersebut. Untuk **pilar lingkungan**, konsep pembangunan berkelanjutan didukung oleh tiga perjanjian dan konferensi, yaitu *Stockholm Conference* tahun 1972, *Brundtland Commission* tahun 1987, dan *Earth Summit* tahun 1992. Sedangkan dalam **pilar ekonomi**, pembangunan berkelanjutan ini didukung oleh adanya perdagangan yang seimbang yang dirumuskan oleh *World Trade Organizations (WTO)* dengan menggandeng beberapa *Non-Governmental Organizations (NGO)* seperti *Oxfam International*, *The World Development Movement*, *WWF*, dan *Third World Network*. Kemudian di dalam

pilar sosial didukung oleh pencetusan *Millennium Development Goals* (MDGs) di tahun 2002 dan *World Summit* tahun 2002.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang terlihat sederhana, namun memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga pengertian keberlanjutan itu sendiri dapat bersifat multidimensi dan multiinterpretasi (Fauzi, 2009: 117-129 dalam Fauzi dan Oxtavianus, 2014:43). Mengingat sifat kompleksitas dari pembangunan berkelanjutan, maka tak heran jika perkembangan terhadap pemikiran konsep tersebut juga mengalami perkembangan. Namun umumnya pemikiran berkelanjutan didasarkan pada tiga dimensi dasar yakni, dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Walau mengusung dimensi yang sama, pandangan tentang bentuk keterkaitan antara keterkaitan ketiga dimensi tersebut ternyata memiliki variasi tersendiri. Merujuk pada Stanner dkk (2009: 152-155) dan Tusianti (2013: 12) dalam Fauzi dan Oxtavianus, (2014:43), beberapa model keterkaitan antara ketiga dimensi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Pembangunan Berkelanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)



Sumber: Stanner dkk (2009) dan Tusianti (2013) dalam Fauzi dan Oxtavianus (2014).

Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan dari konsep keberlanjutan dan variasi yang berbeda, namun bagaimanapun perkembangan tersebut pada dasarnya pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi umum yang meliputi ekonomi yang baik, kualitas dari sosial yang baik, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Sehingga tercipta keseimbangan melalui dimensi-dimensi tersebut dan mencapai keberlanjutan.

2.4.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

lahir melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Melalui sidang tersebut secara resmi telah mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan atau sering disebut sebagai SDGs sebagai kesepakatan global. Dikatakan kesepakatan global karena dalam pengesahan sekurang-kurangnya 193 kepala negara menghadiri dan mengesahkan agenda pembangunan tersebut. Maka, sejak disahkannya SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium). Dalam SDGs secara spesifik berisikan 17 tujuan. Dimana salah satunya adalah tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur dalam menciptakan masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak. Sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka umumnya setiap negara harus mencapai beberapa tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.4.2 Pariwisata

2.4.2.1 Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari kata “pari”, “wis” dan “ata”. Kata “pari” berarti penuh, lengkap, berkeliling.

Kata “wis (man)” yang berarti rumah, kampung, komunitas. Sedangkan kata “ata” yang berarti pergi terus menerus, mengembara yang bila dirangkai akan melahirkan istilah pariwisata, yang berarti bepergian secara terus menerus.

Dalam operasional istilah pariwisata sebagai pengganti istilah asing “tourism” atau “travel” diberi makna oleh pemerintah Indonesia yaitu “mereka yang meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka” (Pendit, 2002:1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dijelaskan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Freuler dalam Pendit (2002:34) berpendapat bahwa pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena pada saat ini yang didasarkan pada kebutuhan akan kesehatan dan penggantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap suatu keindahan alam dan pada khususnya

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan.

Sedangkan Robert McIntosh dan Shashikant dalam Pendit (2002:34) menyebutkan pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang muncul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Selanjutnya Wahab (2003:146) mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara orang-orang dari bermacam-macam tempat tinggal, iman dan agama, dan mempunyai perbedaan pola hidup, harapan yang beragam, jenis kesukaan yang banyak dan hal-hal yang tidak disukai. Adapun makna dari pariwisata yaitu:

1. Pariwisata adalah faktor terpenting untuk menggalang persatuan bangsa yang berbeda, dialek, adat-istiadat dan cita rasa yang beragam.
2. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional seperti:
 - a. Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa wisata seperti: usaha-usaha transportasi dan akomodasi.
 - b. Mendongkrak pendapatan negara dengan valuta asing sehingga mengurangi defisit di dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
 - c. Memberikan dampak yang positif pada tenaga kerja di negara, karena pariwisata memperluas lapangan kerja.
3. pariwisata internasional sangat berguna sebagai sarana untuk meningkatkan saling pengertian internasional dan sebagai alat penenang dalam ketegangan-ketegangan politik karena apabila orang dari berbagai

negara bertemu dan saling memperhatikan pola kehidupan rumah tangganya, maka mereka saling berpengertian lebih baik.

4. Selain itu, pariwisata juga memiliki peran meningkatkan kesehatan. Pergantian tempat, iklim serta menjauhkan diri dari segala kehidupan rutin sehari-hari, semua ini akan menambah daya tahan kita dan sangat menurunkan ketegangan syaraf (Wahab, 2003:9)

2.4.2.2 Bentuk dan Jenis Pariwisata

Mengingat konsep pariwisata yang luas, Wahab (2003:6) mengategorikan bentuk-bentuk dan jenis pariwisata sebagai berikut:

1. Berdasarkan letak geografis
 - a. Pariwisata domestik nasional, menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas disana, yang terbatas dalam suatu negara tertentu.
 - b. Pariwisata regional, adalah kepergian wisatawan terbatas pada beberapa negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata, misalnya perjalanan wisatawan di negara-negara Eropa Barat.
 - c. Pariwisata internasional, yang meliputi gerak wisatawan dari suatu negara ke negara lain di dunia.

2. Berdasarkan akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan asing (luar negeri) merupakan wisatawan yang membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi yang disebut pariwisata aktif. Sedangkan kegiatan kepergian seseorang warga negara ke luar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya yang disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana bergantung pada ketentuan yang diberikan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

- a. Pariwisata individu, yakni hanya seorang atau satu keluarga yang melakukan kegiatan pariwisata.
- b. Pariwisata rombongan, yakni sekelompok orang yang biasanya terkait oleh hubungan-hubungan tertentu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama.

5. Menurut alat transportasi

Ditinjau dari transportasi yang digunakan oleh wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, pariwisata mobil.

Setiap daerah wisata memiliki potensi pariwisata yang berbeda-beda.

Termasuk di dalamnya memiliki ciri-ciri sendiri untuk dikembangkan oleh pemerintah masing-masing sebagai keperluan perencanaan dan pembangunan pariwisata. Potensi wisata yang berbeda antar daerah dipengaruhi oleh letak geografis dari kawasan wisata tersebut. Adapun jenis pariwisata yang dikemukakan Pendit (2002:38) sebagai berikut:

1. Wisata budaya

Jenis wisata ini dilakukan dengan perjalanan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan

kunjungan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka.

2. Wisata kesehatan

Jenis wisata ini dimaksudkan dengan perjalanan wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana mereka tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang mengandung mineral dan dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan lainnya yang alami.

3. Wisata olahraga

Pada jenis wisata ini, dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat.

4. Wisata komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan unruk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata industri

Jenis ini lebih erat hubungannya dengan wisata komersial. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

6. Wisata politik

Jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam pariwisata politik.

7. Wisata konvensi

Jenis ini erat kaitannya dengan wisata politik. Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan rumah-rumah tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik bersifat nasional maupun internasional.

8. Wisata sosial

Jenis wisata ini termasuk pula wisata remaja (*youth tourism*). Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan.

9. Wisata pertanian

Wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan untuk pembelajaran maupun melihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya berbagai jenis tanaman di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

10. Wisata maritim atau bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, khususnya di danau, bengawan, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, dan lain-lain.

11. Wisata cagar alam

Wisata cagar alam adalah jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jala mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, tanaman lindung, hutan pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh peraturan-peraturan hukum.

12. Wisata buru

Jenis wisata ini seringkali dilakukan di negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan di galakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

13. Wisata pilgrim

Jenis wisata ini seringkali di kaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.

14. Wisata bulan madu

Jenis wisata ini identik dengan suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersedia demi kenikmatan perjalanan kunjungan mereka.

15. Wisata petualangan

Wisata jenis ini biasanya dikenal dengan istilah *adventure tourism*, seperti masuk ke dalam hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi sebelumnya dan penuh dengan binatang buas, mendaki tebing yang terjal, dan sebagainya.

2.4.3 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Telah umum di ketahui bahwa percepatan pertumbuhan perekonomian biasanya berakibat pada terjadinya perubahan kegiatan dan struktur

perekonomian yang mengandalkan sektor pariwisata menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian. Artinya, terjadinya industrialisasi termasuk pula pemanfaatan terobosan-terobosan di bidang teknologi dengan tujuan penunjang kegiatan kepariwisataan. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan tersebut dapat meningkatkan produktivitas suatu masyarakat bangsa untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun luar negeri (Siagian, 2014).

Namun demikian, perlu diingat bahwa proses industrialisasi sendiri memerlukan sumber daya alam. Misalnya dalam sektor pariwisata, pemanfaatan bahan bakar minyak (terutama solar) untuk *Speedboat* sebagai akomodasi penyeberangan antar destinasi wisata laut (Gili) dapat berdampak pada terjadinya polusi udara yang mampu mengancam kesehatan manusia, terjadinya pemanasan global dan lebih jauh lagi dapat merusak alam. Pada intinya, hal demikian menandakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dari proses industrialisasi biasanya dilakukan dengan penggabungan antara pemanfaatan teknologi tinggi dan sumber daya alam (Siagian, 2014).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan pariwisata saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Perhatian terhadap hal ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi melalui pariwisata dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam yang tersedia (Mulyadi, 2015).

Pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan wisata yang mempertemukan kepentingan tujuan dan penerimaan dengan menjaga kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat pula menikmati wisata.

Sehingga untuk itu perlu dilakukannya sebuah pengelolaan tertentu atas

pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tersisa agar dapat memenuhi kepentingan ekonomis, sosial dan estetika, dan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologis yang penting, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (WTO, 2002).

Selain dibutuhkan suatu pengelolaan, didalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan di Insula tahun 1995 juga menegaskan bahwa pariwisata harus juga didasarkan pada kriteria-kriteria yang di dukung secara ekologis dalam jangka panjang, dan sekaligus layak secara ekonomi, serta adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Disamping itu pariwisata juga harus memperhatikan kemampuan alam untuk regenerasi dan produktivitas masa datang. Selain itu juga mengenali kontribusi dari masyarakat dan komunitas, adat, gaya hidup dan berpengaruh pada pengalaman wisatawan serta mengakui bahwa penduduk lokal juga harus menerima hak yang sama dari keuntungan ekonomi yang timbul dari kegiatan wisata (Tourism Concern & WWF, 1992).

Hidayati, et al (2003) dalam bukunya yang berjudul "*Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur*" memaparkan bahwa kegiatan pariwisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Secara ekologis berkelanjutan, maksudnya adalah pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Di samping itu, kegiatan konservatif merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pariwisata.
2. Secara sosial dapat diterima, maksudnya adalah mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.

3. Secara kebudayaan dapat diterima, maksudnya yakni masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang berbeda dengan budaya lokal.

4. Secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada intinya, ide mendasar dari pariwisata berkelanjutan adalah kelestarian sumberdaya alam dan budaya. Baik sumberdaya alam maupun budaya menjadi kebutuhan makhluk hidup guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk itu sumber daya harus dijaga melalui kegiatan-kegiatan konservatif.

Kemudian, dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sumberdaya dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi pemangku kepentingan termasuk partisipasi masyarakat lokal dan nilai kepuasan yang optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang (Damanik & Weber, 2006).

Di dalam buku pedoman penghargaan bagi destinasi pariwisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2016 menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan kegiatan wisata lainnya (ISTA, 2017:6).

Kegiatan pariwisata di Indonesia merupakan salah satu industri dengan perkembangan yang sangat pesat. Di tahun 2015, Kementerian Pariwisata Indonesia mencatat bahwa sektor pariwisata mengalami peningkatan jumlah destinasi dan terbuka terhadap investasi dan menetapkan sektor pariwisata menjadi *core bussines* ekonomi nasional dalam hal pendapatan ekspor,

penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan perusahaan dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hal demikian, dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan secara nasional di Indonesia berkomitmen untuk memberikan penghargaan pariwisata berkelanjutan (ISTA, 2017:6).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan dan skema untuk destinasi pariwisata berkelanjutan. Pemberian penghargaan di tujukan untuk memacu dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagaimana secara umum pemberian penghargaan didasarkan pada kriteria; (1) perencanaan yang meliputi strategi destinasi yang berkelanjutan, pengaturan perencanaan, dan standar keberlanjutan; (2) pengelolaan yang meliputi organisasi manajemen destinasi, pengelolaan pariwisata musiman, akses untuk semua, akuisisi properti, keselamatan dan keamanan, manajemen krisis dan kedaruratan, dan promosi; (3) pemantauan yang meliputi monitoring, inventarisasi aset, dan atraksi pariwisata; (4) evaluasi pada setiap pembangunan pariwisata berkelanjutan yang meliputi adaptasi perubahan iklim, dan kepuasan pengunjung (ISTA, 2017).

2.4.4 Indikator Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (GSTC)

Pada Penelitian ini, digunakan empat kriteria dan 13 indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) versi 1, 1 November 2013 dengan tujuan untuk mempermudah dan memfokuskan indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk dilakukan penilaian kondisi keberlanjutan yang ada di beberapa destinasi berkelanjutan di Pulau Lombok. Penilaian dilakukan dengan proses analisis dokumen dan

observasi lapangan sehingga hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan atau strategi perencanaan berikutnya. Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut (GSTC, 2013:4-10):

A. Mendemonstrasikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan;

A 1. Strategi Destinasi Berkelanjutan:

Destinasi telah menyusun dan menerapkan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang tersedia untuk umum, dan sesuai dengan skalanya; yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika; yang dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- a. Strategi pembangunan destinasi bertahun jamak yang fokus pada keberlanjutan dan pariwisata berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan dan keselamatan.
- b. Rencana atau strategi pembangunan destinasi bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum.
- c. Rencana atau strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat.
- d. Komitmen politik untuk menerapkan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak dan memiliki bukti penerapan.

A 8. Akses untuk Semua:

Apabila memungkinkan, situs dan fasilitas, termasuk situs alam dan budaya, dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk disabilitas dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Apabila situs dan fasilitas

tidak dapat diakses dengan segera, maka akses diusahakan melalui desain dan melalui penyelesaian dengan memperhitungkan integritas dari situs tersebut dan mengakomodasi keperluan orang berkebutuhan khusus secara layak.

- a. Kebijakan yang mendukung akses ke situs dan fasilitas wisata, termasuk situs alam dan budaya bagi individu penyandang disabilitas dan individu berkebutuhan khusus.
- b. Solusi aksesibilitas didesain dengan memperhatikan integritas situs dengan mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas.

A10. Kepuasan Pengunjung:

Destinasi pariwisata memiliki sistem untuk memantau dan melaporkan secara terbuka mengenai kepuasan pengunjung, dan jika perlu, mengambil tindakan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung.

- a. Pengumpulan dan pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik
- b. Sistem untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung berdasarkan hasil monitoring.

B. Memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif

B 1. Pemantauan Ekonomi:

Kontribusi ekonomi langsung dan tidak langsung dari perekonomian destinasi wisata dimonitor dan diumumkan paling sedikit sekali setahun. Apabila memungkinkan, laporan termasuk data pengeluaran pengunjung, pendapatan per kamar dan investasi.

a. Monitoring dan laporan tentang data pengeluaran pengunjung, pendapatan per kamar yang tersedia, pekerjaan dan investasi dilakukan secara teratur.

b. Monitoring dan laporan tentang kontribusi pariwisata secara langsung maupun tidak langsung dilakukan secara teratur setiap tahun.

c. Pengumpulan dan pelaporan terkait data tenaga kerja yang dipilih berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dilakukan setiap tahunnya.

B 2. Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal:

Perusahaan di destinasi menyediakan kesempatan kerja yang sama, peluang pelatihan, keselamatan kerja dan upah kerja yang adil untuk semua.

a. Peraturan atau kebijakan mendukung persamaan kerja bagi semua, termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya.

b. Program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya.

c. Peraturan atau kebijakan yang mendukung keselamatan kerja bagi semua.

d. Peraturan atau kebijakan yang mendukung upah kerja yang adil bagi semua, termasuk wanita, kaum muda, disabilitas, kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya.

B 3. Partisipasi Masyarakat:

Destinasi ini memiliki sistem yang mendorong partisipasi publik dalam perencanaan tujuan dan pengambilan keputusan secara berkelanjutan.

a. Sistem yang melibatkan pemangku kepentingan baik dari pemerintah, industri dan masyarakat dalam perencanaan manajemen destinasi dan pengambilan keputusan.

b. Pertemuan setiap tahun dengan masyarakat untuk mendiskusikan tentang isu manajemen destinasi.

B 9. Mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil:

Destinasi memiliki sistem yang mendukung penduduk lokal dan pengusaha kecil dan menengah, mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dan prinsip perdagangan yang adil berdasarkan alam dan budaya lokal.

Termasuk makanan dan minuman, kerajinan tangan, pertunjukan kesenian, produk pertanian, dll.

a. Program yang mendukung dan membangun kapasitas penduduk lokal, pengusaha kecil menengah.

b. Program yang mendorong industri untuk membeli produk dan pelayanan dari area setempat.

c. Program yang mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan berdasarkan alam dan budaya lokal.

d. Program yang melibatkan perajin, petani dan penyedia lokal di dalam rantai nilai pariwisata.

C. Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengunjung dan budaya, serta meminimalkan dampak negatif

C 2. Manajemen pengunjung atau pengelolaan pengunjung:

Destinasi telah memiliki sistem pengelolaan pengunjung untuk tapak wisata yang termasuk di dalamnya tindakan-tindakan untuk mempertahankan, melindungi, dan memperkuat aset alam dan budaya.

a. Mekanisme administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan operasional pengelolaan pengunjung.

C 3. Perilaku Pengunjung:

Destinasi telah menyediakan dan menerbitkan panduan perilaku pengunjung yang pantas pada situs yang sensitif. Panduan destinasi ini didesain untuk meminimalkan dampak yang mengurangi situs tersebut dan meningkatkan perilaku pengunjung yang positif.

- a. Panduan budaya dan lingkungan untuk perilaku pengunjung pada situs yang sensitif.
- b. Tata laksana (*code of practice*) bagi pemandu wisata *tour operator*

C 4. Perlindungan Warisan Budaya:

Destinasi telah memiliki hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran atau pemberian artefak arkeolog dan bersejarah.

- a. Hukum dan peraturan untuk melindungi artefak bersejarah dan arkeologi termasuk yang berada di bawah air serta bukti tindakan penegakan.
- b. Program untuk melindungi warisan seni budaya tak berbentuk (seperti lagu, musik, drama, keterampilan dan kerajinan tangan)

D. Memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif

D 1. Risiko Lingkungan:

Destinasi telah mengidentifikasi risiko lingkungan dan memiliki sistem penanganannya.

- a. Penilaian keberlanjutan destinasi untuk 5 tahun terakhir telah teridentifikasi risikonya terhadap lingkungan.
- b. Sistem penanganan risiko telah tersedia.

D 5. Konservasi Energi:

Destinasi telah memiliki sistem untuk mendorong perusahaan untuk mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan konsumsi energi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil.

- a. Program untuk mempromosikan dan mengukur konservasi energi, memonitor, mengurangi serta melaporkan konsumsi energi kepada publik.
- b. Kebijakan dan insentif untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi energi dan mendorong adopsi serta penggunaan teknologi energi terbarukan.

D10. Mengurangi Limbah Padat:

Destinasi telah memiliki sistem untuk mendorong perusahaan untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah padat.

Limbah padat yang memiliki residu dan tidak dapat didaur ulang, dibuang secara aman.

- a. Sistem pengumpulan limbah padat dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan.
- b. Perencanaan pengelolaan limbah padat yang diterapkan, memiliki tujuan kuantitatif untuk meminimalkan dan memastikan

pembangunan secara aman dan berkelanjutan, serta tidak digunakan kembali maupun didaur ulang.

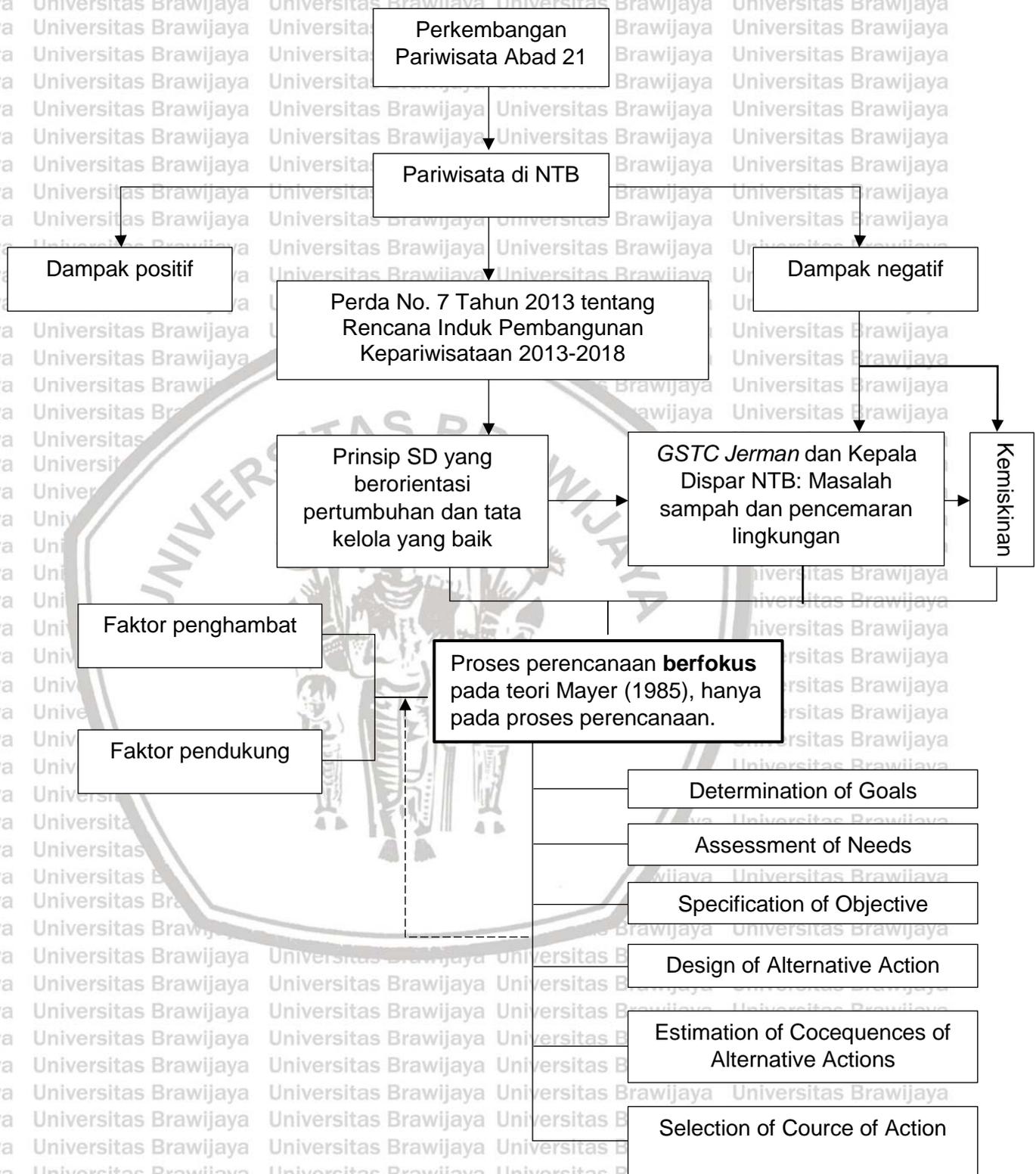
c. Program untuk membantu perusahaan mengurangi, menggunakan kembali dan mengurangi ulang limbah padat.

d. Program untuk mengurangi penggunaan botol air kemasan plastik oleh perusahaan dan pengunjung.

Secara umum, indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan memanfaatkan pedoman yang disusun oleh GSTC Jerman. Hal demikian dilakukan karena GSTC telah dikenal sebagai Lembaga yang berkompeten atas perumusan kriteria pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata mencoba meratifikasi beberapa kriteria dan indikator serta disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata.



2.5 Kerangka Pikir Penelitian





BAB III

ANALISIS SOCIAL SETTING

3.1. Gambaran Umum Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terbentuk melalui proses atau rentang waktu yang cukup panjang. Namun dalam sejarah singkatnya, provinsi NTB sebelumnya pernah menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil yang ber-ibukota di Singaraja setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atau di awal kemerdekaan. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 Provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun hingga saat ini hanya dua wilayah administratif yang masih menggunakan nama "Nusa Tenggara" yakni, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya, Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat NTB terletak pada bagian barat dari kepulauan Nusa Tenggara.

Bagi NTB status provinsi tidaklah datang dengan sendirinya. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuknya Provinsi NTB. NTB secara resmi mendapatkan status provinsi sejak tahun 1958, yang bermula dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertama adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintah berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandakan resminya terbentuk Provinsi NTB.

Di tahun 1968 dalam situasi yang belum cukup stabil sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Sedangkan pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Di tahun 2003 hingga 1 september 2008, Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya yang dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas

dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Selanjutnya, pada usia yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di Provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing.

1. Keadaan Geografis Pulau Lombok

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu **Pulau Lombok** dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 279 pulau-pulau kecil. Dari 279 pulau-pulau kecil yang ada, hanya terdapat 44 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%). Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara Barat – Timur 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan Utara - Selatan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan dengan wilayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat dengan Selat Lombok / Prop. Bali, sebelah timur dengan Selat Sape / Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB terletak di Kota Mataram Pulau Lombok. Untuk lebih rinci, berikut luas daerah Provinsi NTB dirinci menurut Kabupaten/Kota (Km²).

Berdasarkan pada posisi astronomis dan letak geografi seperti diatas, memberikan keuntungan yang sangat besar dari sisi ekonomi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh –Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu, wilayah NTB adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya - Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tanah Toraja.

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan. Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten termuda memiliki 5 kecamatan dengan 33 desa/kelurahan dan Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. Tabel berikut memaparkan secara rinci jumlah kecamatan, desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing- masing kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2016.

Tabel 3.1

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2016

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	123	1.053,92
2	Kabupaten Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4	Kabupaten Lombok Timur	20	215	1.605,55
5	Kota Mataram	6	50	61,30
	JUMLAH	53	560	4.738,70

Sumber: NTB dalam angka tahun 2016

Dari data diatas, total luas wilayah Pulau Lombok sebesar 4.738,70 Km² yang terdiri dari Kabupaten Lombok Timur dengan luasan wilayah terluas sebesar 1.605,55 Km², Kabupaten Lombok Barat dengan luas 1.053,92 Km², Kabupaten Lombok Utara dengan luas 809,53 Km², Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 1.208,40 Km², dan Kota Mataram dengan luas wilayah 61,30 Km² sebagai wilayah dengan luas terkecil.

Adapun peta wilayah administrasi Pulau Lombok tergabung pada peta Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada gambar berikut, adapun peta Pulau Lombok adalah peta yang ada pada posisi sebelah kiri:

Gambar 3.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)



Sumber: BPS NTB

2. Keadaan Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB sangat bervariasi yaitu, Pulau Lombok bagian utara terdiri atas pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.726 meter, di bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur berupa daerah persawahan dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, serta di bagian selatan merupakan bagian yang berbukit-bukit dan kering yang sebagian berupa sawah tadah hujan. Selong merupakan ibu kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 m dpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 m dpl. Berikut lebih rinci

disajikan data ketinggian masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel 3.2
Tinggi Kabupaten/Kota dari Permukaan Laut

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Tinggi (m)
1.	Lombok Barat	Gerung	15
2.	Lombok Utara	Tanjung	12
3.	Lombok Tengah	Praya	107
4.	Lombok Timur	Selong	166
9.	Kota Mataram	Mataram	27

Sumber: ntbprov.go.id

Berdasarkan pada klasifikasi kemiringan tanah (lereng) diketahui bahwa Provinsi NTB memiliki wilayah daratan yang paling luas termasuk klasifikasi kemiringan tanah 15-40 persen sebesar 704.619 Ha (34,96%), sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2 persen sebesar 338.552 Ha (16,80%). Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15 persen seluas 198.616 Ha atau sebesar 9,85 persen dari luas wilayah daratan sedangkan, paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40 persen seluas 20.175 Ha atau sebesar 1,01% dari luas wilayah Provinsi NTB.

Provinsi NTB memiliki enam belas (16) gunung, tujuh (7) jajaran gunung terdapat di Pulau Lombok. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi yang mempunyai ketinggian 3.726 m dpl. Sedangkan enam (6) gunung lainnya adalah gunung Mareje, gunung Timanuk, gunung Nangi, gunung Perigi, gunung Plawangan dan gunung Baru.

3. Kondisi Iklim

Keadaan iklim suatu wilayah dapat dilihat dari keadaan curah hujan, hari hujan, temperatur, kelembapan relatif, intensitas penyiraman matahari, dan kecepatan angin. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi iklim di suatu kawasan atau wilayah tertentu yang areanya lebih sempit dapat dilihat dari keadaan curah hujan dan hari hujan yang terjadi di kawasan tersebut.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, Provinsi Nusa Tenggara Barat keseluruhannya hanya mengenal dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Dimana musim hujan rata-rata terjadi pada bulan Nopember hingga Mei. sedangkan temperatur maksimum di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2001 berkisar antara $30,9^{\circ} - 32,1^{\circ} C$, dan temperatur minimum berkisar antara $20,6^{\circ} - 24,5^{\circ} C$. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai rata-rata kelembapan yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95%.

Sedangkan Pada tahun 2016 suhu udara rata-rata terendah diwilayah NTB terjadi pada bulan Agustus yaitu $21,8^{\circ} C$ dan tertinggi $33,53^{\circ} C$ pada bulan Oktober. Curah hujan rata-rata per bulan pada musim penghujan paling tinggi 291 mm terjadi pada bulan Desember sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Mei 76 mm. Hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 5 hari dan tertinggi bulan Desember sebanyak 22 hari.

Rata-rata Kecepatan angin 2 Knots yang terjadi pada bulan Mei sedangkan kecepatan angin maksimum tertinggi 10,25 Knots terjadi pada bulan Januari. Lamanya penyinaran matahari berkisar antara 45 - 82 persen

dan penyinaran matahari terlama terjadi pada bulan Agustus dan terendah terjadi pada bulan Desember. Tekanan udara berkisar 1003,0 – 1006,4 mb, dan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Desember. Sedangkan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 79,5 – 88 persen, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Pebruari sedangkan bulan Agustus merupakan kelembaban udara terendah.

4. Keadaan Monografi

a. Keadaan Wilayah Administrasi

Provinsi NTB merupakan Provinsi yang terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan dan 1.141 desa/kelurahan. Di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 245 desa/kelurahan dan dengan jumlah kecamatan sebesar 20 kecamatan. Sedangkan jumlah seluruh desa/kelurahan di Pulau Lombok sejumlah 598 desa/kelurahan.

Tabel 3.3

Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota, Januari 2015

NO	Kabupaten/Kota	Kota	Kecamatan	Desa
1.	Kabupaten Lombok Barat	Gerung	10	122
2.	Kabupaten Lombok Tengah	Praya	12	139
3.	Kabupaten Lombok Timur	Selong	20	254
4.	Kabupaten Lombok Utara	Tanjung	5	33
5.	Kota Mataram	Kota Mataram	6	50
	Jumlah		53	588

Sumber: BPS NTB 2015



3.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi NTB berdasarkan hasil proyeksi BPS 2010 – 2035, tahun 2016 berjumlah 3.434.708 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 40.428 jiwa atau sebesar 0,40 persen. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena adanya kelahiran alamiah dan juga karena adanya migrasi penduduk, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2014	2015	2016
1	Lombok Barat	644.586	654.892	665.132
2	Lombok Tengah	903.432	912.879	922.088
3	Lombok Timur	1.153.773	1.164.018	1.173.781
5	Lombok Utara	210.133	212.265	214.393
6	Kota Mataram	441.064	450.226	456.314
	Jumlah	3.352.988	3.394.280	3.434.708

Sumber : Proyeksi BPS NTB 2010 – 2035

Berdasarkan pada tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah penduduk Pulau Lombok di setiap wilayah tidak merata. Pada tahun 2016, 70,15 persen penduduk berdomisili di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang memiliki penduduk terbesar yaitu 1.173.781 jiwa sedangkan terkecil adalah kabupaten Lombok Utara yaitu 214.393 jiwa, dengan demikian Kabupaten Lombok Timur menampung 24,07 persen dari total penduduk NTB.

Sedangkan bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2016 Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi yakni 724,83 jiwa/km².

kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kota Mataram yakni 7.492,89 jiwa/km². Sedangkan kepadatan paling rendah yakni Kabupaten Lombok Utara yakni 264,84 jiwa/km².

Pertambahan jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang tidak merata antar wilayah menyebabkan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah berbeda pula yang pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan dalam persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten dan hal ini disadari oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah selalu berusaha untuk membuat program – program pembangunan yang dapat mengurangi ketidak merataan jumlah penduduk antar wilayah. Tabel berikut menyajikan kepadatan penduduk berdasarkan pada kabupaten/Kota secara rinci.



Tabel 3.5
Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)		
		2014	2015	2016
1	Lombok Barat	611,64	621,42	631,13
2	Lombok Tengah	747,63	755,44	763,07
3	Lombok Timur	718,62	725,00	731,08
4	Lombok Utara	259,57	262,21	264,84
5	Kota Mataram	7195,17	7344,63	7492,89
	Jumlah	707,58	716,30	724,83

Sumber: Proyeksi BPS NTB , 2010 – 2035

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pada jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, dengan sex ratio pada tahun 2016 sebesar 94,26, namun pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Dilain sisi pertumbuhan penduduk baik berjenis kelamin laki- laki maupun perempuan cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2015.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan kelompok umur dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, 65,20 persen dari jumlah penduduk merupakan kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 15–64 tahun kondisi ini meningkat 0,14 point dibandingkan dengan tahun 2015. Meningkatnya penduduk pada kelompok umur produktif menjadi sebuah modal dasar pembangunan, hal ini disebabkan karena semakin banyak kelompok umur produktif maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia yang diharapkan dapat diserap pada berbagai lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan kinerja perekonomian NTB yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tercapai tujuan tersebut pemerintah Provinsi NTB menyiapkan berbagai program kerja terkait dengan

peningkatan sumberdaya manusia maupun program kerja terkait dengan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh swasta. Program tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB karena pemerintah NTB menyadari peningkatan penduduk produktif pada sisi lain dapat berdampak negatif bagi suatu perekonomian, bila kesempatan kerja terbatas ataupun kelompok umur produktif tidak mampu menciptakan kesempatan kerja sendiri, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, terjadi perkawinan pada usia muda serta bertambahnya penduduk yang putus sekolah karena tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan NTB selanjutnya.

Bila dilihat berdasarkan pada jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak pada kelompok umur produktif maupun kelompok usia 65⁺ masing-masing sebanyak 1.674.396 orang dan 130.477 orang sedangkan bila dilihat dari rasio ketergantungan (*dependency ratio*) diketahui bahwa rasio ketergantungan pada tahun 2016 (53,38) lebih rendah dari pada tahun 2015 (53,72) kondisi ini mengindikasikan semakin banyaknya sumberdaya yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Perekonomian Daerah

Menurut berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi NTB No. 12/02/52/Th.X, 6 Februari 2017 menyatakan bahwa perekonomian Provinsi NTB pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian NTB selama tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen dibandingkan dengan 2015 yang lalu. Pertumbuhan

terjadi di seluruh lapangan usaha dimana kategori jasa keuangan mengalami laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 12,32 persen, diikuti oleh pengadaan Listrik, Gas sebesar 11,25 persen dan kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 10,44 persen.

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif, selama tahun 2016 sebesar 5,82 persen yang sebagian besar bersumber dari lima besar kegiatan perekonomian yakni kategori pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 1,69 poin, selanjutnya diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,88 poin, kategori Konstruksi sebesar 0,75 poin, Transportasi dan perdagangan sebesar 0,42 poin, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,41 poin.

3.4. Pembangunan Sosial

3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip melalui BPS NTB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk memiliki akses sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia di NTB setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 angka IPM di NTB sebesar 61.16, ditahun 2011 sebesar 62.14, tahun 2012 sebesar 62.98, sedangkan ditahun 2013 sebesar 63.76, tahun 2014 sebesar 64.31, ditahun 2015 sebesar 65.19, dan ditahun 2016 mencapai 65.81. IPM tertinggi di Provinsi NTB adalah Kota

Mataram di tahun 2016 sebesar 77.20, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 63.22. Untuk lebih rinci berikut disajikan tabel IPM Provinsi NTB menurut kabupaten/kota.

Tabel 3.5

IPM Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	IPM Kabupaten/Kota						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lombok Barat	60.61	61.64	62.24	62.91	63.52	64.62	65.55
2.	Lombok Tengah	58.97	59.77	60.57	61.25	61.88	62.74	63.22
3.	Lombok Timur	58.86	59.84	60.73	61.43	62.07	62.83	63.70
8.	Lombok Utara	56.13	57.13	58.19	59.20	60.17	61.15	62.24
9.	Kota Mataram	72.47	73.50	74.22	75.22	75.93	76.37	77.20
10.	Kota Bima	70.11	70.57	71.21	71.72	72.23	72.99	73.67
Jumlah		61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81

Sumber: BPS NTB 2015

3.4.2. Agama

Mengikuti perkembangan jumlah penduduk, maka jumlah fasilitas ibadah di NTB juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah Masjid di NTB telah mencapai 5.348 buah dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Penduduk di Provinsi NTB mayoritas beragama Muslim dengan jumlah 4.599.892 jiwa. Penduduk Muslim terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 1.170.829 jiwa. Untuk lebih rinci, berikut disajikan tabel banyaknya umat beragama menurut kabupaten kota di Pulau Lombok:

Tabel 3.6

Banyaknya Umat Beragama Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik
----	--------------------	-------	----------------------	---------------------

1.	Lombok Barat	551.818	335	353
2.	Lombok Tengah	895.061	208	306
3.	Lombok Timur	1.170.829	183	234
4.	Lombok Utara	338.900	12.397	6.239
5.	Kota Mataram	126.139	1.083	1.756
Jumlah		1.911.92	739.48	900.995

Sumber: BPS NTB 2015

3.5 Pariwisata

Pesona keindahan alam serta keunikan budaya yang dimiliki Provinsi NTB memiliki potensi untuk diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Perkembangan infrastruktur maupun fasilitas pariwisata NTB mengalami peningkatan secara bertahap seiring dengan dilakukannya berbagai macam bentuk kegiatan pariwisata baik dalam skala nasional maupun internasional. Sektor pariwisata mempunyai peranan penting bagi perekonomian NTB. Hal tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) sebesar 2,14 persen dan meningkat menjadi 2,17 persen pada tahun 2016. Peningkatan kontribusi ini tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah tetapi juga karena peran dari pemangku kepentingan lainnya.

Di tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB sebanyak 3.094.437 orang jumlah ini melampaui 156,35 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1.979.174 wisatawan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 meningkat sebesar 39,99 persen. Disamping itu dalam kancah Internasional, Provinsi NTB pada tahun 2016 juga menunjukkan keberhasilannya dalam meraih penghargaan yaitu Sembalun sebagai “*World Best Halal Honeymoon Destination Lombok, Indonesia*” (World

Halal Tourism Award (WHATA), Novotel Lombok Resort & Villas sebagai *World's*

Best Halal Beach Resort Lombok, Indonesia" – Resort Pantai Ramah Wisatawan

Muslim Terbaik (*World Halal Tourism Award* (WHATA),

www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai *World's Best Halal Travel Website*

– Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (*World Halal Tourism Award*

(WHATA) dan penghargaan dalam negeri yang juga diperoleh adalah Pacoa Jara,

Pacu Mbojo dan Gegerok Tandak sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima merupakan peluang sekaligus sebagai

tantangan bagi Provinsi NTB untuk lebih baik lagi dalam mengelola kepariwisataan

NTB. Adapun perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB

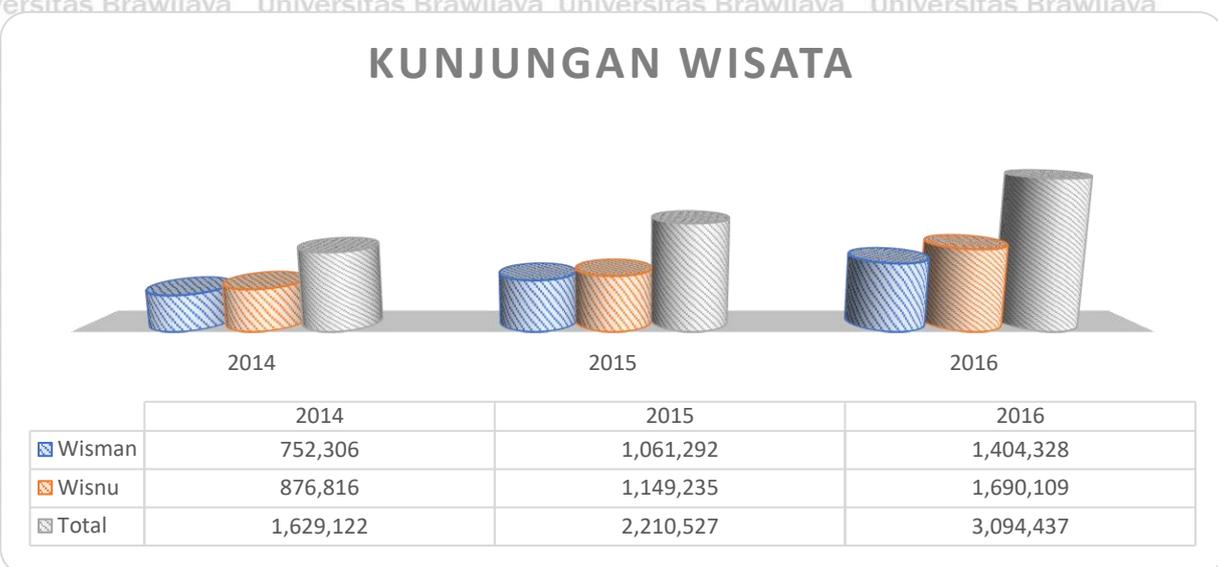
baik wisatawan nusantara (Wisnu) maupun mancanegara (Wisman) dapat dilihat

pada gambar berikut:



Diagram 3.1

Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2016



Sumber: Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa kunjungan wisata setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika dibandingkan tahun 2015 dengan 2016, jumlah kunjungan maupun pertumbuhan wisatawan nusantara lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Adapun pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara sebesar 47,06 persen sedangkan pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar 32,32 persen. Pertumbuhan wisatawan mancanegara yang lebih rendah, hal ini tentu menjadi sebuah tantangan dan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Mengingat angka kunjungan pariwisata yang terus meningkat, maka dalam penelitian ini memiliki lokus untuk kegiatan observasi yakni berbagai destinasi yang memiliki angka kunjungan tertinggi pertama dan tertinggi ke empat serta memiliki persoalan dampak lingkungan yang serius dan destinasi yang memiliki citra atau favorit. Hal ini dilakukan agar memiliki cakupan penelitian yang fokus dan mendalam serta tidak bersifat luas mengingat jumlah destinasi yang ada pada

suatu daerah sangatlah besar jumlahnya. Sebagai contoh kawasan wisata kuta mandalika (pantai selong belanak), sesot, banyumulek serta gili trawangan.

3.5. Kondisi Prasarana

3.5.2 Transportasi

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Panjang jalan nasional dan Provinsi di NTB sampai akhir 2014 mencapai 2.404,44 km. Berdasarkan klasifikasi jalan, 632,17 km merupakan jalan nasional dan 1.772,27 km merupakan jalan Provinsi. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, jalan yang kondisinya baik mencapai 55,15 persen dengan kelas jalan adalah Kelas III. Jumlah jembatan Negara dan jembatan provinsi pada tahun 2014 mencapai 1.330 buah dengan panjang mencapai 15.338,5 meter.

Jumlah kendaraan bermotor tahun 2014 sebanyak 1.347.545 unit atau meningkat 5,39 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.278.620 unit.

Komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari: 79.231 unit mobil penumpang, 3.272 unit bus, 37.523 unit mobil barang, dan 1.227.519 unit sepeda motor.

3.5.4 Perhotelan

Pembangunan pariwisata di NTB selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Jumlah tamu asing maupun tamu Domestik yang menginap pada tahun 2015 mencapai 550.263 orang. Sejalan dengan hal

tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tuntut untuk memperbanyak akomodasi, termasuk pula kamar dan tempat tidur hotel.

Hingga saat ini data menunjukkan bahwa jumlah hotel di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tahun

2015 mencapai 935 unit yang terdiri dari 50 hotel berbintang dan 885 hotel melati. Hotel berbintang dengan jumlah yang terbanyak terdapat pada Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram yakni sebanyak 22 unit pada tahun 2015, diikuti oleh Kabupaten Lombok Utara sejumlah 10 unit.

Sedangkan jumlah hotel yang non berbintang dengan jumlah terbanyak adalah Kabupaten Lombok Utara sebanyak 484 unit, diikuti oleh Kota Mataram sejumlah 100 unit. Sedangkan dengan jumlah hotel non berbintang terkecil yakni pada Kabupaten Bima sejumlah 7 unit.

3.6. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.6.2 Visi

Penyusunan Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya dilatarbelakangi oleh kondisi dan analisis terhadap geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, serta pemerintahan di Nusa Tenggara Barat saat ini dan diprediksi dalam 20 tahun ke depan maka Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Secara umum, Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengarah pada pencapaian tujuan nasional yakni: “masyarakat adil dan

makmur". Sedangkan secara singkat Visi tersebut memiliki kata kunci sebagai berikut:

1. Kata "**Beriman**" adalah situasi dan kondisi spiritual masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang terwujud dalam masyarakat silaturahmi yang memiliki sikap menjunjung tinggi kerukunan hidup antar internal umat satu agama dan antara umat agama yang satu dengan umat agama lainnya, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, peduli serta jujur.
2. Kata "**Maju**" adalah gambaran kondisi dan situasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berkehendak dan mampu menerapkan IPTEK dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna bergerak menuju suatu kehidupan yang lebih baik.
3. Kata "**Sejahtera**" mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, rekreasi, ibadah, pelayanan publik serta hubungan sosial secara wajar dalam suasana kelestarian lingkungan hidup.

3.6.3 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yakni:

1. **Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian

hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.

2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.

3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan**, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.

4. **Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah**, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.

5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan**, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan Sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.



BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis proses Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Lombok dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Lombok. Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti dapat leluasa untuk memperoleh data dan fakta melalui informan hingga mencapai titik jenuh, sehingga data yang diperoleh mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan pengamatan yakni suatu kondisi natural dan alami terhadap Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Pulau Lombok, baik dalam proses perencanaannya maupun mengamati suatu kendala dan dukungan yang dialami dengan tujuan sebagai dasar dalam menemukan titik lemah perencanaan dan memberikan rekomendasi yang cocok untuk mengembangkannya perencanaan pembangunan berkelanjutan kedepannya.

Pengamatan lainnya yakni pada suatu perangkat daerah yang berkewenangan dan membidangi perencanaan di sektor pariwisata.

4.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian, karena sangat diperlukan untuk membatasi penelitian dalam perspektif kerja yang jelas sehingga peneliti tidak terjebak pada data yang banyak diperoleh di lapangan dan yang sifatnya meluas. Sugiyono (2015) mengatakan perlunya suatu fokus penelitian

untuk memahami secara lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang ada, sehingga peneliti mampu mengetahui data-data yang bersifat penting dalam menunjang penelitian atau data-data yang sesuai dengan penelitian.

Fokus penelitian dimaksud untuk membatasi objek penelitian yang bertujuan agar peneliti fokus terhadap data yang bertujuan untuk menyempurnakan pilihan. Didalam penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu *Bagaimanakah proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok*, dan *Bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok*.

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama maka ditentukan fokus penelitian yang disusun berdasarkan pada pendekatan oleh George R. Terry dalam Kencana dan Welasari (2015) dan pendekatan proses perencanaan yang dikembangkan oleh Mayer, (1985) sebagai dasar untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok, dengan mengacu pada beberapa indikator dan kriteria dari GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) yang telah ditentukan sebelumnya (lihat Bab II). Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua maka dalam penyusunan fokus penelitian mengacu pada Analisis SWOT sebagai alat untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Adapun fokus penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

- a. Penilaian kondisi pariwisata berkelanjutan
- b. Penentuan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan
- c. Menentukan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan
- d. Memilih tindakan untuk mencapai sasaran berdasarkan hasil analisis alternatif tindakan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

- a. Faktor penghambat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.
- b. Faktor pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

1.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Didalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Pulau Lombok. Pemilihan lokasi penelitian tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek seperti;

1. Pulau Lombok memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang melimpah;
2. Adanya aspek kebijakan yang mendasari aktivitas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok, diselenggarakan berdasarkan konsep berkelanjutan yang diatur dalam Perda No. 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA tahun 2013-2028;
3. Adanya arah kebijakan pembangunan dalam Perda No. 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA tahun 2013-2028 yang mengatur pembangunan pariwisata dilakukan berdasarkan Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Dimana DPD tersebut salah satunya meliputi Perencanaan Pembangunan DPD Pulau Lombok.

4. Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang memberikan acuan bahwa untuk menjadi suatu destinasi berkelanjutan, maka suatu daerah harus memiliki rencana induk atau perencanaan yang secara spesifik.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang akan ditelitinya.

Hal tersebut berguna untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Situs penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. GIZ Jerman sebagai fasilitator perencanaan
4. Masyarakat Lokal pelaku wisata di destinasi gili trawangan, destinasi kawasan kuta mandalika, sesaot dan banyumulek.

1.3 Jenis dan Sumber Data

1.3.1 Jenis Data

Sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh dapat digolongkan menjadi:

1.3.1.1 Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang meliputi:

- a. Kepala Sub-Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- b. Kepala Jabatan Fungsional Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Kepala Bidang Penyusunan Program Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. *Advisor Tourism GIZ Jerman NTB*
- f. Masyarakat Lokal pelaku wisata di destinasi gili trawangan, destinasi kawasan kuta mandalika, sesaot dan banyumulek.

1.3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang didapatkan melalui referensi atau dokumen-dokumen, buku-buku literatur, arsip-arsip, media cetak, maupun internet yang berkaitan dengan kebutuhan data sebagai pelengkap penelitian. Data sekunder bersifat dapat di ajukan permintaannya secara langsung maupun dapat di akses pada website instansi dimana peneliti melakukan penelitian. Data ini dapat bersifat data pendukung yang utama untuk mendongkrak keakuratan data primer.

1.3.2 Sumber Data

Maksud dari sumber data pada penelitian ini adalah berupa observasi kejadian, data sekunder yang berupa dokumen baik dalam bentuk arsip dan *soft file*, dan hasil dari wawancara seseorang untuk memperoleh data-data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data pada penelitian ini adalah:

1.3.2.1 Informan

- a. Kepala Sub-Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Kepala Jabatan Fungsional Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Kepala Bidang Penyusunan Program Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. *Advisor Tourism GIZ Jerman NTB*
- f. Masyarakat Lokal pelaku wisata di destinasi gili trawangan, destinasi kawasan kuta mandalika, sesaot dan banyumulek.

1.3.2.2 Dokumentasi

- a. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di di Pulau Lombok.
- b. Dokumen dalam bentuk arsip maupun data *soft file* yang berupa data yang diperlukan selama jalannya penelitian yang berada di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kantor Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kantor GIZ Jerman Nusa Tenggara Barat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Subjek yang terkait didalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok baik secara individu maupun secara kelompok.

Data yang nantinya dapat diperoleh dalam penelitian ini, baik data sekunder dan data primer nantinya akan dipilah mana yang berguna untuk penelitian ini, kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian sehingga dalam pengolahan data dapat berjalan dengan mudah.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting didalam berjalannya penelitian, tercapai atau tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh tepat atau tidaknya dalam mengambil teknik pengambilan sampel yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2013) dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Perhatian observasi terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Garayibah, et. al. 1981:33 dalam Emir, 2016). Maka didalam penelitian ini kegiatan observasi dilakukan secara non-partisipan (observasi non-partisipan) pada suatu keadaan yang berkaitan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Oleh karena itu observasi dilakukan pada beberapa destinasi pariwisata yang menjadi lokasi perhatian dalam dokumen perencanaan STMP

a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Senggigi Tiga Gili yang meliputi Destinasi Gili Trawangan.

b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kuta Mandalika yang meliputi Selong Belanak.

c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Mataram yang meliputi Desa Wisata Banyumulek

d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rasimas-Semalun yang meliputi Sesaut.

2. Wawancara

Wawancara adalah memberikan pertanyaan kepada subjek yang ingin mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2013) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Didalam penelitian ini wawancara dilakukan pada:

a. Kepala Sub-Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Kepala Jabatan Fungsional Perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

c. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

d. Kepala Bidang Penyusunan Program Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

e. *Advisor Tourism GIZ Jerman NTB*

f. Masyarakat Lokal pelaku wisata di destinasi gili trawangan, destinasi kawasan kuta mandalika, sesaut dan banyumulek.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan memanfaatkan data di tempat penelitian yang berupa dokumen, catatan,

maupun gambar yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diperoleh melalui situs penelitian yang telah dirumuskan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok yang meliputi; Dokumen Sustainable Tourism Master Plan Lombok 2015-2019; Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2013-2028); Data Statistik Kunjungan Wisatawan; Dokumen evaluasi STMP Lombok 2015-2019; Dokumen kalender pariwisata; Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Lombok; Dokumen Rencan Kerja Dinas Pariwisata Provinsi NTB; serta berbagai dokumen lainnya yang masih relevan dengan data perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

1.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Di dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Peneliti sendiri, didalam hal ini peneliti merupakan instrumen utama dari berjalannya penelitian. Peneliti sendiri harus siap dan menguasai dari penelitian yang akan dilakukannya.
2. Pedoman wawancara
Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan, agar segala pertanyaan dapat diungkapkan secara sistematis dan terstruktur.
3. Catatan Lapangan
Merupakan rekaman wawancara, kamera, dan alat-alat tulis yang merupakan alat pelengkap guna kelancaran pengambilan data.

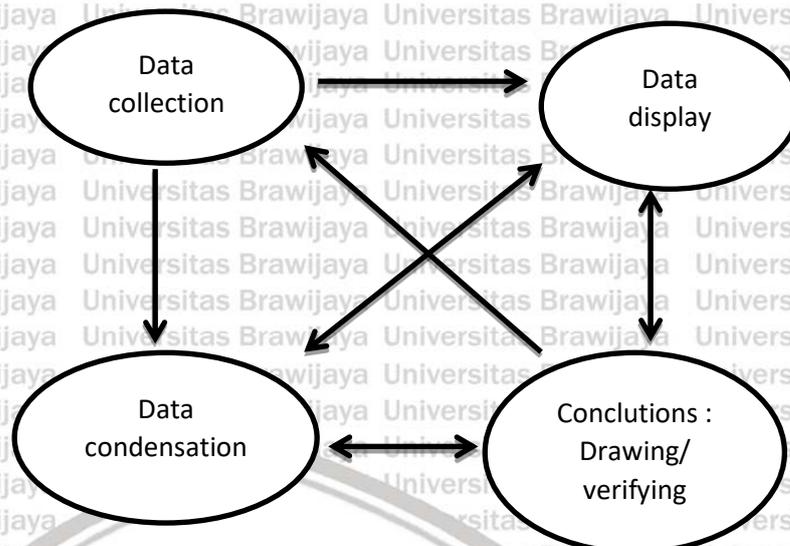
1.6 Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan data berada pada posisi titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (merangkum atau mereduksi data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya); *Data display*) penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya); dan *conclusion / drawing / verification* (kesimpulan atas data keseluruhan yang telah terseleksi). Sehingga dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis data yang berbeda, yakni metode analisis data deskriptif model interaktif dan metode analisis SWOT. Digunakannya dua metode analisis data yang berbeda karena disesuaikan pada kebutuhan untuk dukungan menjawab dua rumusan masalah yang berbeda.

1.6.1 Analisis Data Interaktif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Adapun komponen-komponen analisis data model interaktif ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber: (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Proses Kondensasi data dilakukan secara kontinu melalui keberlangsungan penelitian yang diorientasikan secara kualitatif.

Sedangkan data yang diperoleh di lapangan ditulis secara deskriptif kedalam bentuk laporan yang terperinci. Laporan-laporan tersebut perlu untuk direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan proses perencanaan, dan dicari tema atau polanya dan disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan. Data yang di kondensasi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan dengan bentuk urian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Selain itu penyajian data juga merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan agar dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

Data dan laporan yang diperoleh dari informan dapat disusun ke dalam bentuk matriks, kerangka kerja (*network*) dan peta (*chart*). Terhadap display data dilakukan untuk memperoleh gambaran sementara guna memudahkan deskripsi sampai kepada kesimpulan dengan membuat metrik identifikasi, kerangka fikir, kerangka kerja dan pemetaan sebuah kegiatan. Selain itu, dalam penyajian data penelitian ini akan mengacu pada proses perencanaan oleh Robert. R. Mayer untuk memfokuskan hasil atau laporan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang bersifat spesifik dan mendalam jika proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan bertambahnya data dan informasi, karena kesimpulan awal diperoleh dari data pada umumnya yang masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa analisis kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang,

dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis data yang saling susul-menyusul.

1.6.2 Analisis SWOT

Sedangkan Metode Analisis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis SWOT. Digunakannya analisis SWOT sebagai tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ke 2 yakni faktor pendukung dan faktor penghambat dari proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Namun, analisis SWOT dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif dan berdasarkan asumsi dan kemudian diperkuat oleh data wawancara maupun dokumen. Sehingga proses analisisnya memiliki batasan-batasan berupa pengidentifikasian penyebab dukungan dan hambatan proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

Rangkuti, (2008) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentuan pembangunan suatu situasi atau daerah secara sistematis. Berdasarkan pengertiannya analisis SWOT didasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik internal maupun eksternal guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, kekuatan utama yang dimiliki analisis SWOT adalah dapat melakukan evaluasi secara lebih tajam dan terarah mengenai kondisi institusi atau daerah yang bersangkutan.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan

dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dalam proses pengambilan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan suatu institusi. Maka SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi institusi. Dengan demikian proses perencanaan dapat dilakukan melalui faktor strategi analisis SWOT. Sehingga analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) (Rangkuti, 2008).



Tabel 4.1
Matriks Analisis SWOT

IFAS	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
EFAS Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. 2008

Identifikasi SWOT yang dilakukan dapat digunakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat internal maupun eksternal dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Melalui

penentuan kekuatan dan kelemahan internal institusi adalah menjadi faktor pendukung dan penghambat internal institusi dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan menentukan peluang dan ancaman eksternal institusi adalah sebagai faktor pendukung dan penghambat eksternal institusi dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

Namun, untuk menentukan berbagai peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan baik eksternal maupun internal sebelumnya dilakukan penentuan terlebih dahulu terhadap faktor strategi eksternal dan internal (EFAS-IFAS) dengan langkah sebagai berikut:

a. *External Strategy Factor Analysis (EFAS)*

EFAS matrik digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, teknologi dan informasi tentang persaingan di pasar industri di mana institusi berada. Dalam menentukan EFAS, kaidah dalam menentukan faktor dilakukan berdasarkan identifikasi hasil wawancara teradap informan, kemudian di tarik kesimpulan atas hasil identifikasi wawancara dengan mengklasifikasikan hasil wawancara termasuk dalam faktor-faktor eksternal.

b. *Internal Strategy Factor Analysis (IFAS)*

Langkah penyimpulan dalam mengelola lingkungan internal dapat dipakai dalam menyusun IFAS matrik. Alat perumusan strategi ini menyimpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang besar dalam daerah fungsional institusi dan juga memberikan suatu basis bagi pengidentifikasian dan pengevaluasian hubungan di antara daerah-daerah tersebut. *Intuitive judgement* sangat diperlukan dalam penggunaan IFAS matrik ini. Dalam aktivitas penentuan faktor internal dilakukan berdasarkan penentuan faktor

eksternal. Dimana hasil faktor dirumuskan melalui identifikasi hasil wawancara informan dan selanjutnya diklasifikasikan terhadap kebutuhan akan faktor internal.

Digunakannya matrik EFAS dan IFAS dalam penelitian ini hanya sebagai menentukan atau mengetahui faktor pendukung dan penghambat baik eksternal maupun eksternal dari suatu proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Akan tetapi hasil atau output dari matrik gabungan EFAS dan IFAS akan digunakan sebagai rekomendasi atau strategi baru dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok selanjutnya.

1.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian merupakan hal yang sangat penting. Terdapat kriteria utama yang harus dipenuhi pada data hasil penelitian adalah meliputi valid, reliabel, dan objektif. Validitas menurut Sugiyono (2013) menyatakan adalah data yang tidak berbeda atau sama antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar keabsahan data yang disajikan dapat memenuhi beberapa persyaratan dengan kriteria yang telah ditetapkan antara lain:

1. Standar Kepercayaan (*credibility*)

Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang sesuai dengan fakta di lapangan maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin memahami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya;
- b) melakukan triangulasi, baik triangulasi teknik maupun sumber data;

c) melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian. hal demikian perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan penelitian pada kompleksitas fenomena yang diteliti.

2. Standar Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada persamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut seseorang peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan kejadian-kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dalam penelitian kualitatif, keteralihan dilakukan dengan cara menguraikan secara rinci. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penafsiran mengenai temuan yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk uraian, dimana dalam memberikan penafsiran tersebut, peneliti perlu didukung oleh pengetahuan dan data yang kuat.

3. Standar Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan peneliti dilakukan dengan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reabilitas dapat terjadi maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan keilmuan dan komisi pembimbing. Setelah hasil penelitian dianggap benar oleh pembimbing maka dilakukan pertemuan baik formal maupun informal dengan rekan-rekan dan memperoleh masukan, salah satunya melalui seminar hasil penelitian.

4. Standar Kepastian (*confirmability*)

Menurut Sugiyono (2013) penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil

penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Untuk memperoleh standar pada penelitian ini dilakukan secara pengecekan atau penilaian oleh dosen pembimbing selama berlangsungnya konsultasi tesis bersamaan dengan pengecekan standar *dependability*.





BAB V**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****1.1 Hasil Penelitian**

Berikut ini adalah hasil yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan. Untuk mengurai lebih lanjut, secara lebih jelas dan rinci mengenai kondisi pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok antara lain adalah proses perencanaan itu sendiri, dan faktor yang menjadikan penghambat dan pendukung perencanaan yang kemudian mempengaruhi proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

1.1.1 Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok

Perencanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok secara abstrak termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah tahun 2013-2028) yang kemudian dijadikan acuan dan pedoman untuk menyusun perencanaan sektoral selanjutnya atau perencanaan yang berada dibawahnya, baik di lingkup regional itu sendiri maupun di tingkat lokal (kabupaten/kota).

Adapun RIPPARDA 2013-2028 memiliki 4 (empat) fokus pembangunan yang meliputi; **Pembangunan Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Industri Pariwisata; dan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.** Empat fokus tersebut bukanlah secara tiba-tiba ditetapkan dan tanpa pertimbangan, melainkan dasar sumber dari keempat

fokus tersebut bersumber pada Undang-undang No. 9 tahun 2010 tentang Kepariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Selain melalui Undang-undang, keempat fokus pengembangan tersebut juga telah dikenal sebagai pilar pembangunan pariwisata pada disiplin ilmu kepariwisataan.

Melalui visi RIPPARDA yakni "**Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia yang Berdaya Saing Internasional**". Provinsi NTB memiliki komitmen tinggi dalam membangun kepariwisataan yang unggul dan berkelanjutan. Hal demikian juga tercermin melalui misi yang meliputi:

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan

berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. RIPPARDA 2013-2028 juga menjadi penting sebagai pengatur peran dan keterlibatan *stakeholder* lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah atau wilayah dengan harapan agar mampu merangsang pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Secara tegas RIPPARDA juga mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus mencapai tujuan sebagaimana dapat; (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; (3) memajukan kebudayaan; (4) meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan (5) mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sehingga, pada akhirnya untuk mencapai hal tersebut, berbagai tujuan harus direfleksikan ke berbagai bentuk perencanaan yang lebih spesifik.

Selain menjadi rencana induk, RIPPARDA 2013-2028 juga menjadi pedoman dalam menyusun rencana-rencana selanjutnya di berbagai level, baik meliputi rencana kabupaten/kota atau rencana yang bersifat kepulauan (spesifik). RIPPARDA 2013-2028 adalah rencana induk pariwisata yang tertinggi di NTB, maka rencana di berbagai level dibawahnya berkewajiban mengacu pada rencana induk tersebut. Selain itu, RIPPARDA 2013-2028 sangat diperlukan juga sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik pada provinsi itu sendiri maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan pariwisata.

Akan tetapi hingga tahun 2017, pemerintah provinsi NTB saat ini telah menyusun berbagai bentuk perencanaan pariwisata berkelanjutan untuk pulau Lombok dan Sumbawa secara lebih spesifik. Namun terkait dengan rencana aksi berkelanjutan yang secara konkret dan spesifik hanya tersedia untuk pulau Lombok, sedangkan untuk pulau Sumbawa belum adanya dokumen atau perencanaan yang secara spesifik mengenai rencana aksi berkelanjutan, tentunya hal demikian terjadi karena adanya berbagai *rational foundation* (dasar pertimbangan). Namun untuk pembangunan pariwisata pada pulau Sumbawa tetap berpedoman pada RIPPARDA dan perencanaan masing-masing kabupaten/kota. Maka selanjutnya hasil penelitian ini akan berfokus pada **Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok atau *Sustainable Tourism Master Plan Lombok (STMP Lombok 2015-2019)***.

Perlu untuk diketahui bahwa disusunnya *STMP Lombok* diawali dengan inisiatif kerjasama *Green Tourism Initiative* (Inisiatif Pariwisata Hijau). Inisiatif tersebut di inisiasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*). Kerjasama Inisiatif Pariwisata Hijau kemudian ditindak lanjuti pada level provinsi, yakni khususnya oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Tindak lanjut kerja sama tersebut kemudian disepakati melalui dokumen tertulis, dimana dokumen tersebut adalah dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dengan nomor: 415/453.b/Budpar-I/2016. Perjanjian tersebut selain menjadi dasar komitmen juga menjadi *legal standing* untuk menyusun *STMP Lombok* secara kolektif agar pembangunan diarahkan menuju konsep pariwisata yang berorientasi pada berkelanjutan.

Berbagai alasan dan dasar pertimbangan menjadi acuan Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB terhadap rasionalitas dan pertimbangan prioritas penyusunan STMP Lombok dibandingkan dengan prioritas perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk pulau Sumbawa. Bagaimanapun fokus pembangunan pariwisata berkelanjutan Pulau Lombok, bukan berarti tidak dilaksanakannya pembangunan pariwisata pada Pulau Sumbawa. Namun, tetap dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada RIPPARDA NTB 2013-2028.

Adapun dasar kebijakan (*legal standing*) pembangunan tersebut didasarkan pada pembagian perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah yang termaktub didalam pasal 8 dan pasal 13 RIPPARDA NTB 2013-2028 sebagaimana meliputi; pembangunan DPD (Destinasi Pariwisata Daerah) yang berfokus pada kepulauan yakni pulau Lombok dan Sumbawa, dan pembangunan KSPD (Kawasan Strategi Pariwisata Daerah) berfokus pada kawasan pariwisata yang tersebar di masing-masing pulau Lombok dan Sumbawa. Artinya bahwa, pembangunan pariwisata yang dilakukan di Pulau Lombok tentu saja memiliki dasar hukum yang jelas dengan mengacu pada pembangunan berbasis pendekatan DPD dan kemudian didalamnya *include* dilakukan pembangunan di berbagai KSPD di wilayah DPD tersebut.

Dalam hal ini, pembangunan umumnya, baik di sektor manapun termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, berbagai pandangan menganggap bahwa pembangunan pariwisata di NTB tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan, melainkan bertahap dan bersifat parsial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak NG selaku pejabat fungsional Dinas Pariwisata NTB yang sekaligus sebagai informan dalam penelitian, menyatakan bahwa:

“...memang tidak bisa kita membuat kebijakan secara merata di bidang pariwisata, memang itu sangat rentan secara politis. Kenapa, kok, lombok-lombok saja? sebab begini, kalau ingin membangun di Sumbawa itu belum ada tamunya mau membangun, kan percuma – kasarannya begitu. Perencanaan wilayah-pun karena didalam perencanaan pariwisata jika tidak diaplikasikan mengundang unsur politis. Sehingga esensinya bahwa tidak bisa lepas dari unsur politis dalam mengambil keputusan untuk wilayah mana yang akan dibangun. Prinsipnya di bidang pariwisata tidak bisa kita majukan atau membangunkan secara keseluruhan secara bersamaan, karena dia butuh proses yang kemudian membangun karakter pariwisata.”

Melalui pernyataan tersebut jelas dinyatakan bahwa selain karena faktor kunjungan wisatawan yang kurang tersebar di Pulau Sumbawa dan pesatnya persebaran wisatawan di Pulau Lombok, faktor politis juga menjadi penentu pengambilan fokus dan lokus kebijakan pembangunan pariwisata di NTB. Faktor politis seringkali menjadi penting dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya memprioritaskan Pulau Lombok. sebagaimana dengan pernyataan Bapak NG, hal senada juga diucapkan oleh Bapak KW selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB sebagai berikut:

“...kita tidak bisa pungkiri, kalau STMP ini muncul tentu karena perhatian pemerintah pusat kepada kita akan adanya kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Artinya kan hal ini tidak terlepas dari adanya unsur politik lagi. Baik itu di pusat maupun di daerah. Akan tetapi ini juga sekaligus kemudian menjadi tantangan kedepannya.”

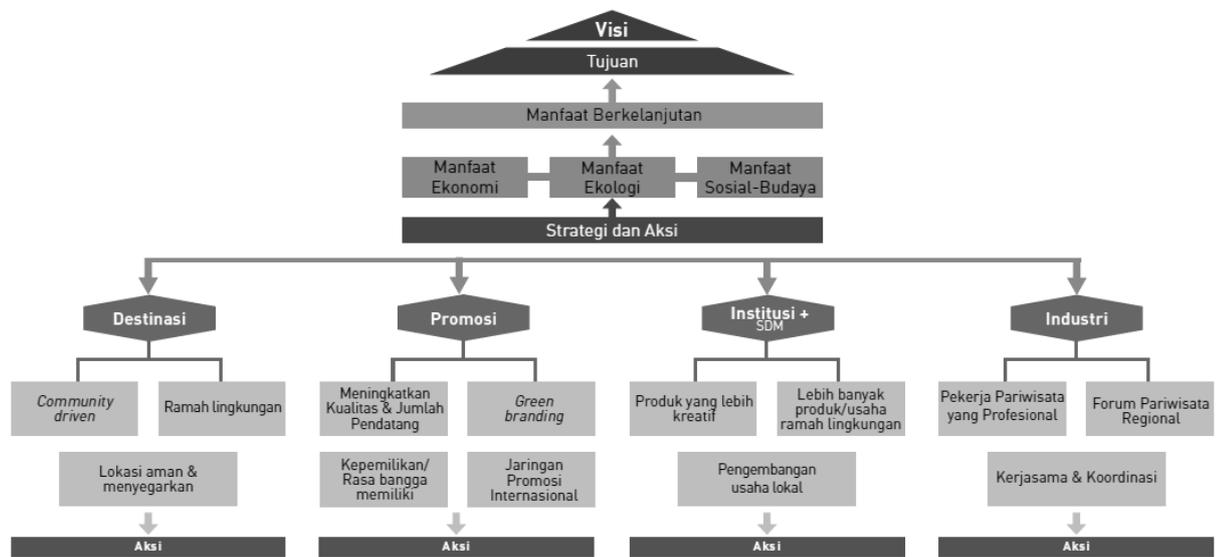
Selain dari adanya faktor politis yang dapat dibenarkan sebagai sesuatu yang menentukan pengambilan kebijakan pembangunan, melainkan juga adanya faktor lain ditemukan diluar data wawancara yang diperoleh peneliti yang kemudian disebut sebagai *rationale foundation*. *Rationale foundation* adalah data sekunder yakni media online detik.com (dengan judul

Indonesia dan Jerman Kerjasama Bangun Pariwisata Lombok) dijelaskan alasan mengapa pariwisata di Lombok dijadikan prioritas, yakni karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang diakibatkan oleh adanya Bandara Internasional Lombok. Selain itu, Pulau Lombok menjadi koridor V-MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025) yang berfokus pada pariwisata, dan Pulau Lombok dijadikan koridor Pengembangan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai daerah pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan industry kreatif.

Berbagai alasan tersebut dijadikan sebagai *rationale foundation* atau alasan mengapa Pulau Lombok sebagai prioritas, fokus dan lokus dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, selanjutnya akan dibahas mengenai proses maupun tahapan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan (STMP) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB (khususnya Dinas Pariwisata NTB dan berbagai stakeholder lainnya) dan faktor penghambat dan pendukungnya proses perencanaan sehingga kemudian menjadi dokumen STMP Lombok yang berlaku pada periode 2015-2019. Akan tetapi, sebelum masuk pada proses perencanaan, berikut akan diberikan gambaran secara ringkas pendekatan atau kerangka yang digunakan dalam merumuskan STMP Lombok dan tahapan-tahapan yang diadopsi dalam perencanaan pariwisata berkelanjutan pulau Lombok.

Gambar 5.1

Pendekatan Penyusunan STMP Lombok



Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Secara umum, pendekatan yang tersusun dalam penyusunan STMP Lombok sangatlah terstruktur dan tegas. Pencapaian visi pariwisata NTB akan tercapai melalui perumusan tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan yang dirumuskan tidaklah ditentukan secara awam, melainkan mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan mengakomodir manfaat ekonomi, ekologi dan sosial-budaya. Pencapaian visi, tujuan, dan pengadopsian manfaat berkelanjutan akan berjalan dan terakomodir apabila diaplikasikan secara sadar dan penuh komitmen. Pengaplikasian tersebut dirumuskan kemudian diakomodir melalui strategi dan berbagai jenis aksi yang terhubung dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga esensinya adalah, mencapai sebuah visi dan tujuan besar dalam pembangunan dilakukan melalui berbagai jenis strategi dan aksi-aksi yang telah dimasukkan nilai-nilai basis yakni berkelanjutan. Sebagaimana data tersebut, hal demikian juga dijelaskan oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ yang menjelaskan:

“...dalam STMP itu juga sudah tercantum pendekatannya, alurnya, sudah jells di gambarkan. Misalnya dia disusun berdasarkan 4 prinsip pariwisata yang dijelaskan di dalam RIPPARDA seperti ada destinasi, industry, kelembagaan, dan promosi. Kemudian dari prinsip tersebut di tindak lanjuti kedalam rencana-rencana selanjutnya.”

Selain pendekatan, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan Pulau Lombok juga memiliki berbagai siklus proses perencanaan. Secara umum, proses yang diaplikasikan meliputi; penilaian kondisi; proses analisis; merumuskan visi dan tujuan; penentuan area strategis; perumusan strategi kunci dan aksi prioritas; penetapan strategi dan aksi; dan monitoring dan evaluasi. Seagaiman yang dijelaskan juga oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ yang menjelaskan tahapan dari STMP tersebut:

“...kemudian prosesnya STMP, dasarnya perencanaan memang tahapannya seperti perencanaan pada umumnya. Jadi kita kaji dulu kondisi pariwisata di Lombok, kemudian kita analisis. Kita melibatkan konsultan juga dari UNRAM. Nah, setelah itu kita tentukan Visi dan Tujuannya, dan seterusnya sampai pada monev. Proses ini kita jalankan bersama-sama di semua kabupaten kota di Lombok dengan melakukan FGD.”

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, sesuai dengan yang dipaparkan, data dokumen juga memberikan tahapan proses perencanaan STMP Lombok sebagaimana berikut yang secara khusus, proses tersebut dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 5.2

Proses Perencanaan STMP



Sumber: STMP Lombok 2015-2019

1.1.1.1 Penilaian Kondisi Pariwisata dan Identifikasi Isu Strategis

Penilaian kondisi pariwisata, selain dilakukan dengan cara observasi, juga dilakukan berdasarkan data, statistik, dan informasi yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB berkaitan dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Penilaian kondisi pariwisata dilaksanakan dengan cara menganalisis destinasi secara langsung maupun analisis berbagai data yang diperoleh melalui sumber tertentu dengan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan selanjutnya dan menentukan arah pembangunan pariwisata. Berbagai pertimbangan dan *reasoning* berdasarkan hasil observasi peneliti maupun perencanaan, data, statistik, FGD dan informasi dimanfaatkan untuk menentukan wilayah yang akan dilakukan perhatian maupun pengembangan secara lebih terpadu.

1.1.1.1.1 Penelitian

Tahap penelitian bertujuan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami pariwisata Lombok, juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian secara umum dalam menunjang proses perencanaan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan cara-cara *mainstream*. Artinya proses penelitian dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah penelitian ilmiah pada umumnya.

Bagaimanapun proses penelitian yang dilakukan secara umum tersebut tidaklah terlepas dari peran akademisi. Keterlibatan akademisi adalah selain terjaminnya proses ilmiah juga sebagai bentuk partisipasi seluruh elemen *stakeholder*. Bapak Dr. Akhmad Saufi adalah salah satu akademisi Universitas Negeri Mataram sekaligus konsultan yang terlibat aktif dalam proses penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak SN sebagai informan selaku *Advisor Tourism* pada GIZ yang menjelaskan:

“...sudah ada referensi sebelumnya dan sudah ada kajian-kajian sebelumnya, kajian-kajian yang sudah ada itu kita jadikan acuan. Dalam proses ini, penelitian itu dilakukan oleh kami sendiri (GIZ) bersama-sama, dengan menggunakan konsultan dari UNRAM (Universitas Negeri Mataram) yakni Dr. Saufi sekaligus sebagai tim penyusun. Yang dikaji itu seperti angka kunjungan wisata, kita kaji dokumen strategis dari Dispar, kawasan-kawasan, dan destinasi itu di analisis. Selain itu ada kajian yang namanya desk study untuk melihat informasi dari data yang terkait sustainable tourism, laporan dari pemda, dan dinas terkait.”

Sejalan dengan pernyataan dari Bapak NG yang mengemukakan bahwa tradisi dalam menyusun rencana adalah didasarkan pada kajian-kajian. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak NG selaku Pejabat Fungsional Perencanaan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB:

“.....GIZ ini kan fasilitator, kami bebrapakali dilibatkan dalam penyusunan STMP, karena merekalah yang mengembangkan STMP tersebut. mereka sering meminta data-data dari kami untuk dilakukan kajian-kajian. Biasanya dalam satu forum ada diskusi juga membahas mengenai STMP ini.”

Berdasarkan data wawancara tersebut, secara lebih spesifik aktivitas penelitian atau kajian-kajian untuk STMP Lombok dilakukan dengan berbagai stakeholder dengan desain penelitian seperti pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan analisis tersebut diaplikasikan berdasarkan instrumen bisnis (*marketing mix*) yakni: *Product*, *Place*, *Promotion* dan *Price* (4Ps), sebagaimana sesuai dengan yang terkandung didalam dokumen STMP Lombok.

Tahap pengumpulan data dilakukan berdasarkan klasifikasi data primer dan data sekunder. Dimana data primer dikumpulkan melalui pendekatan wawancara dan dialog dengan pemangku kepentingan pariwisata, observasi lapangan, dokumentasi, pemetaan tata ruang (*spatial mapping*), penilaian (*assessment*) mengenai potensi kepariwisataan berkelanjutan serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan lintas kabupaten/kota di lima wilayah yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan data sekunder yang meliputi potensi daya tarik kepariwisataan, lingkungan, sosial budaya, ekonomi serta kelembagaan dan regulasi dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan dalam bentuk laporan, statistik maupun beberapa penelitian lainnya yang relevan.

Selain itu, yang menarik pada tahap ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan secara dinamis dan dikomparasikan sesuai kebutuhan. Maksudnya adalah hasil penelitian yang dimaksud akan di manfaatkan dan digunakan sesuai dengan fokus pembahasan penelitian dan fokus analisis kondisi pariwisata. Linearnya kedua fokus tersebut adalah menjadi syarat utama untuk pengutipan hasil penelitian. Sehingga dalam *STMP* Lombok tidak secara khusus diberikan ruang penuh untuk mengakomodir segala bentuk hasil penelitian terkait pariwisata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis *planner*. Sebagai contoh yakni, jika fokus analisis pariwisata pada dimensi sosial yakni pada lingkup “*lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata*”, maka akan dilakukan penyeleksian terhadap berbagai penelitian yang mengakomodir pembahasan tersebut (STMP Lombok, 2015-2019).

Salah satu contoh penelitian terdahulu yang digunakan dalam *STMP* Lombok adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saufi, Diswandi, dan Nurul di tahun 2010, dengan konteks pembahasan pemasaran pariwisata, sebagaimana dengan hasil temuan bahwa sebagian besar pelaku pariwisata di Lombok menjadi wisata alam sebagai basis utama produk pariwisata yang mereka jual baik secara konvensional maupun secara *online*. Sehingga kebutuhan akan *branding* pariwisata harus dibuat sesuai dengan karakteristik produk pariwisata yang dijual sehingga mampu menjadikan pariwisata Lombok setara dengan kemajuan pariwisata lainnya.

Diluar konteks penelitian terdahulu, proses wawancara, Desk Study dan FGD juga dilakukan oleh GIZ dan Konsultan UNRAM.

Tujuannya sebagai menampung aspirasi dari masyarakat setempat dengan harapan pemberian informasi terkait permasalahan destinasi.

Hal demikian di sampaikan informan (Bapak SN) kepada peneliti.

“...metode yang kita gunakan untuk kajian kebutuhan adalah dengan Desk Study dan FGD, jadi itu metodenya. Kajian ini kita lakukan pada destinasi yang sudah ada. Kita melakukan wawancara, FGD juga. Tapi kita tidak bisa melakukan wawancara satu per satu, akan memakan waktu. Jadi kita undang jadi sekali dengan kita sampaikan idenya, kita minta informasi tentang bagaimana pariwisata, bagaimana senggigi, bagaimana banyumulek, dan lain-lain. Jadi di Desk Study ada bagian seperti masalahnya apa, dan diberikan solusi yang seperti apa.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, penggunaan metode Desk Study dan FGD dilakukan demi mempertimbangkan akurasi solusi dan efisiensi waktu perencanaan. Dengan FGD kajian kebutuhan dapat terselesaikan dengan mudah, dan proses *Desk Study* mempermudah pencarian solusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pada destinasi tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak SN, berdasarkan data yang diperoleh dalam upaya mengkonfirmasi pernyataan, maka data dokumen yakni Desk Study umumnya terdapat 3 bagian, sebagaimana bagian pemaparan permasalahan, pemaparan tantangan, dan tentunya penentuan solusi terhadap masalah yang ada. Berikut adalah contoh desk study yang dimaksudkan dan dilakukan di desa wisata banyumulek Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang diperoleh melalui data dokumen:

Tabel 5.1

Masalah produksi yang dialami oleh perajin dan pengusaha dan usulan solusi di Desa Wisata Banyumulek

No	Proses Produksi	Masalah yang dihadapi	Solusi yang diusulkan
1.	Pengadaan Bahan Baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku mahal 2. Masalah permodalan 3. Masalah kesehatan (pegal-pegal) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan (dengan bunga yang rendah) 2. peralatan
2.	Pengolahan dan Penyiapan Bahan Baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan secara tradisional dan tidak memadai 2. Lokasi pada musim hujan 3. Masalah kesehatan (keseleo dan sakit pinggang) 	Peralatan
3.	Produksi dan Pembuatan Gerabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya cetakan untuk gerabah ukuran tinggi dan besar 2. Tidak adanya peralatan yang tepat guna 3. Masalah kesehatan (pusing, pegal, kram persediaan, keputihan pada wanita, dehidrasi) 	Alat dan teknik produksi yang inovatif
4.	Penjemuran, Perendaman dan Pencampuran	Pengangkutan	Peralatan (arco)
5.	Pembentukan adonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pengolahan yang sangat lama 2. Masalah kesehatan (kelelahan) 	Peralatan
6.	Pembuatan bentuk gerabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi tidak sesuai dengan standard pemesanan 2. Tidak mampu memenuhi bentuk yang dipesan 3. Tidak ada alat pemutar 	katalog/media/ccontoh
7.	Penjemuran gerabah basah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan 2. Tergantung pada matahari (pecah jika kurang penjemuran dan masalah pada musim hujan) 	
8.	Penyiapan Pembakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panas dan asap 2. Masalah kesehatan (sesak napas) 	Oven
9.	Proses Pembakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah lingkungan (asap dan jerami yang terbakar terbawa angin ke sekitarnya) 2. Oven sudah ada namun biaya mahal (dengan menggunakan gas) sehingga perajin tetap menggunakan cara tradisional 3. Jika menggunakan oven, warna gerabah terbatas pada warna merah bata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan oven dengan biaya yang rendah (seperti di Yogya) 2. Teknologi blower

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Proses produksi juga semakin lama karena tidak bisa langsung diwarnai. 5. Tergantung kepada cuaca 6. Masalah kesehatan (panas dan asap) 	
10.	Pewarnaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terampil 2. Desain pewarnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan bahan pewarnaan (dukungan) 2. lebih bervariasi supaya memenuhi selera pa
11.	Finishing	Penggunaan bahan untuk melapisi gerabah yang baunya sangat menyengat	pilihan bahan alternatif yang lebih aman
12.	Pengemasan dan Pengiriman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kayu untuk pengemasan tidak boleh masuk ke Eropa 2. Pengemasan kurang aman dengan jerami 	kardus tetapi mahal
13.	Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya harga/keuntungan 2. Keuntungan untuk perajin semakin sedikit 3. Order tidak tetap 	

Sumber: Analisis Gender Komoditas Gerabah di Banyumuek, Lombok Barat, NTB (GIZ)

Baik survey, *FGD* maupun proses *Desk Study* tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan, dengan memberikan atensi terhadap solusi-solusi baru dan tindak lanjut melalui usulan program. Pariwisata berkelanjutan selain memperhatikan aspek lingkungan, juga memperhatikan kebermanfaatan ekonomi yang di tumbulkan dan keberpihakan perekonomian pada masyarakat lokal. Proses penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui persoalan dan solusi apa yang seharusnya di tawarkan. Hal ini tentu akan berdampak jauh pada peningkatan produk pariwisata yang pada akhirnya

meningkatkan angka kunjungan wisatawan dan meningkatnya perekonomian pada suatu destinasi.

Jika pada penjelasan diatas berpusar pada metode penelitian yang digunakan dan sedikit konteks penelitian, maka pada penjelasan berikut akan dijelaskan beberapa konteks yang diteliti berdasarkan kaidah penelitian. Adapun beberapa konteks yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1.1.1.1.1 Kunjungan wisatawan

Data statistik kunjungan wisatawan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar penilaian kondisi pariwisata di Pulau Lombok. sebagaimana yang dijelaskan pada data wawancara sebelumnya bahwa subyek yang dikaji adalah saah satunya angka kunjungan wisatawa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ yang menjelaskan:

“...iya bener, memang kita kumpulkan data tahun 2010 sampai 2014 termasuk angka kunjungan wisatawan, kita analisis, kita telaah, wisatawan asal mana yang memiliki angka kunjungan yang tinggi, apakah setiap tahunnya kunjungan itu meningkat, maka dari situ juga kita cari tahu. Karena ini penting.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun data statistik perkembangan jumlah wisatawan yang digunakan adalah data tahun 2010-2014. Digunakannya data periode tersebut dikarenakan STMP Lombok tersusun pada tahun 2015 dengan masa periode 2015-2019. Hal demikian tentunya menjadi dasar pengambilan keputusan dan menjadi pendukung didalam penentuan kawasan wisatawan yang akan dilakukan

pengembangan. Berikut disajikan data perkembangan jumlah wisatawan.

Tabel 5.2

Perkembangan Jumlah Wisatawan ke Provinsi NTB Tahun 2010-2014

No	TAHUN	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	PERKEMBANGAN (%)
1	2010	282,161	443,227	725,388	17.12
2	2011	364,196	522,684	886,880	22.26
3	2012	471,706	691,436	1,163,142	31.15
4	2013	565,944	791,658	1,357,602	16.72
5	2014	752,306	876,816	1,629,122	20.00

Sumber: Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB 2014

Secara garis besar, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi persentase peningkatannya tidak terlalu signifikan, dalam artian peningkatan kunjungan wisatawan hanya mengalami peningkatan berkisar pada angka 9.00 persen. Selain tipisnya persentase peningkatan yang dialami, jumlah persentase peningkatan kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan yang fluktuatif dan tidak konstan ataupun meningkat. Artinya angka kunjungan wisatawan ke NTB mengalami peningkatan namun fluktuatif. Namun bagaimanapun selisih peningkatan yang terjadi tentunya tidak terlepas dari program unggulan “*Visit Lombok Sumbawa 2012*” dengan target kuantitatif satu juta kunjungan wisatawan pada tahun 2012.

Disamping meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun dan berdasarkan data statistik pariwisata NTB dari tahun ke tahun

hingga tahun 2016 menunjukkan mayoritas pengunjung wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) berusia antara 20-28 tahun. Dimana jumlah kunjungan wisman mayoritas berasal dari Australia dengan angka kunjungan sejumlah 256.744 jiwa dan Jerman sejumlah 110.154 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisnus mayoritas berasal dari DKI Jakarta sejumlah 29,04 persen dan Jawa timur sejumlah 23,15 persen. Antara kunjungan wisman dengan wisnus mayoritas memiliki tujuan berkunjung yang sama, yakni dengan tujuan ingin bersenang-senang atau menghabiskan waktu (*leisure*). Dimana persentase wisman sejumlah 71,00 persen untuk menghabiskan waktu dan sejumlah 51,21 persen wisnus bertujuan untuk bersenang-senang (Statistik Pariwisata, 2016).

Berdasarkan STMP Lombok, Australia sebagai negara penyumbang wisatawan terbanyak di tahun 2016 karena banyaknya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali dan kemudian meneruskan perjalanan ke Lombok sebagai perjalanan wisata selanjutnya. Wisatawan Australia selain dikenal sebagai penyumbang wisatawan terbanyak, juga dikenal sebagai wisatawan yang rata-rata lama menginap yang cukup lama. Tingginya angka kunjungan wisatawan Australia tidak terlepas dari faktor akses transportasi udara yang mudah yakni dengan dibukanya jalur penerbangan langsung di tahun 2014 dengan rute *Perth-Lombok* oleh maskapai *Jet Star* (STMP Lombok, 2015-2019). Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak NG selaku Pejabat Fungsional Perencanaan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB:

“...kalua kita lihat data statistik pariwisata, memang lebih banyak kunjungan mancanegara daripada nusantara. Nanti bisa dilihat di statistik pariwisata. Sepengetahuan kami Australi penyumbang

wisatawan terbesar. Ini adalah akibat dari adanya Bandara Internasional Lombok dan sekarang sudah dibuka rute langsung dari Australia ke Lombok. dan kebanyakan wisatawan asing ramai di Gili.”

Tingginya angka kunjungan wisatawan tidak selalu dapat memberikan dampak positif yang tersebar secara merata di Pulau Lombok khususnya dan NTB umumnya. Secara singkat, tingginya angka wisatawan memiliki kecenderungan terhadap sentralnya minat wisatawan pada suatu tempat atau suatu kawasan wisata. Hal demikian tercerminkan melalui data statistik pariwisata tahun 2016 misalnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan yang memberikan gambaran terhadap persentase kunjungan wisatawan ke kawasan wisata. Adapun tabelnya sebagai berikut.

Tabel 5.3

Persentase Kunjungan Wisatawan ke Kawasan Wisata

No.	Tujuan Kunjungan	Persentase
1.	Tiga Gili	32,30
2.	Senggigi	17,45
3.	Pantai Kuta	14,02
4.	Gunung Rinjani	6,04
5.	Dompu / Pantai Hu'u	1,81
6.	Tete Batu	6,0
7.	Bima / Sape	3,35
8.	Taman Mayura	2,51
9.	Taman Narmada	1,97
10.	Suranadi	1,70
11.	Sedang Gile	3,03
12.	Lingsar	1,36
13.	Tanjung Aan	3,46
14.	Gili Nanggu	2,26
15.	Lainnya	2,74
	Jumlah	100

Sumber: Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB
2016

Diantara 15 (lima belas) kawasan wisata yang paling diminati wisatawan, terdapat 4 (empat) kawasan wisata yang menjadi favorit berdasarkan rating persentase jumlah wisatawan dari tertinggi ke rendah. Kawasan yang dimaksud yakni kawasan Tiga Gili, Senggigi, Pantai Kuta, Gunung Rinjani, Tete Batu dan Tanjung Aan. Tingginya minat kunjungan terhadap keempat kawasan tersebut dikarenakan kawasan yang lebih dahulu dikenal wisatawan, akses informasi dan akses infrastruktur terbilang lebih dahulu tersedia dibandingkan dengan kawasan wisata yang lainnya. Sehingga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan terhadap suatu kawasan wisata. Hingga saat ini beberapa kawasan tersebut masih menjadi tren kunjungan yang banyak diminati wisatawan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa fokus kawasan prioritas pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan hal diatas, keempat kawasan tersebut menjadi dasar dalam penentuan fokus kawasan pengembangan atau pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal demikian tentunya diakibatkan oleh tingginya jumlah kunjungan yang berbanding lurus terhadap eksploitasi lingkungan yang di timbulkan. Maka kawasan tersebut dijadikan prioritas pembangunan dalam STMP Lombok 2015-2019 dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

1.1.1.1.2 Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis pembangunan kepariwisataan di NTB mengacu pada isu strategis yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Dengan tujuan sebagai dasar dalam menentukan strategi yang relevan dalam menjawab persoalan strategis. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh informan dalam hal isu strategis yang juga dijadikan bahan untuk dianalisis. Adapun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi NTB tahun 2013-2018 meliputi:

1. Kualitas dan kapasitas sumberdaya pariwisata yang didukung kelembagaan yang mandiri, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya dimaksud melalui Pendidikan dan pelatihan atau penyuluhan.
2. Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, kondisi keamanan yang kondusif belum memadai, serta belum adanya program mitigasi bencana dan risiko lain pada destinasi wisata sehingga kenyamanan dan keamanan berada dikawasan wisata belum terjamin.
3. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktifitas pemasaran pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran Bersama dengan para pelaku pariwisata atau *stakeholder* pariwisata lainnya.

4. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan dengan segala implikasi yang ditimbulkan masih kurang, sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kelembagaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kepariwisataan.

5. Investasi pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang kondusifnya iklim investasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan informasi potensi kepariwisataan yang memadai.

6. Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam impelementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah.

1.1.1.1.3 Pemetaan Kawasan Prioritas

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa adalah dua pulau yang membentuk Provinsi NTB secara menyeluruh memiliki 278 pulau kecil yang terletak di sekeliling kedua pulau tersebut. Dari sekian jumlah pulau-pulau kecil tersebut, berdasarkan data BPS NTB tahun 2012 menyatakan 32 pulau diantaranya yang telah berpenghuni. Provinsi dengan luas bentangan daratan dari timur kebarat adalah seluas 20.153.15 km². Dari

jumlah keseluruhan luas Provinsi NTB tersebut satu per tiga luasnya adalah luas Pulau Lombok yakni sekitar 4.725, dimana Pulau Lombok terdapat 5 (lima) kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB.

Tabel 5.4
Luas Kabupaten/Kota di Pulau Lombok

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)
1.	Lombok Barat	1.051
2.	Lombok Tengah	1.205
3.	Lombok Timur	1.602
4.	Lombok Utara	807
5.	Kota Mataram	60
	Jumlah	4.725

Sumber: BPS NTB (NTB dalam angka tahun 2014)

Berdasarkan data yang ter-input dalam dokumen perencanaan sektoral STMP Lombok 2015-2019, secara geografis pulau Lombok terletak pada segitiga emas destinasi pariwisata utama Indonesia yang meliputi Pulau Bali berada pada posisi sebelah barat, sedangkan Tana Toraja dan Bunaken berada di sebelah utara Pulau Lombok, dan Pulau Komodo berada tepat disebelah timur Pulau Lombok. Selain demikian, disebutkan juga Pulau Lombok dilalui garis Wallace, yakni garis pemisah antara kelompok spesies flora dan fauna Benua Asia dan Australia. Akibatnya Pulau Lombok memiliki spesies flora dan fauna yang unik, karena menjadi titik pertemuan pengaruh antara kedua Benua tersebut dan tentunya posisi tersebut menjadikan Pulau Lombok menjadi tempat

yang menarik untuk melakukan penelitian mengenai alam dan biologi (STMP Lombok, 2015-2019).

Sebagai pulau yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, secara umum pulau Lombok memiliki dua jenis atraksi wisata andalan, yakni keindahan akan wisata alam dan keunikan budaya yang ada didalam masyarakat. wisata alam yang dimiliki hampir tersebar diseluruh bagian pulau, mulai dari ketinggian Gunung Rinjani hingga hamparan pantai yang ada disekeliling pulau. Tidak hanya wisata alam seperti pantai, gunung, air terjun, sungai maupun danau yang dapat ditemukan di pulau Lombok, melainkan dapat ditemukan peristiwa alam yang unik yang tidak dapat ditemukan di destinasi wisata lainnya. Peristiwa alam tersebut yakni munculnya "nyale" atau cacing laut yang terjadi pada saat bulan tertentu yang dikarenakan oleh musim hujan di pantai selatan. Untuk lebih mendetail, berikut akan di jelaskan beberapa potensi wisata yang dimiliki pulau Lombok.

Baik wisata alam maupun budaya, masing-masing kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok memiliki keunikan tersendiri. Sehingga didalam dokumen RIPPARDA NTB Tahun 2013-2028 telah ditetapkan 11 (sebelas) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dimana diantaranya 4 (empat) KSPD untuk pulau Lombok dan 7 (tujuh) KSPD untuk pulau Sumbawa. Akan tetapi dikarenakan hasil penelitian ini akan berorientasi pada proses perencanaan yaitu proses STMP Lombok, maka berikut akan dijelaskan 4 (empat) KSPD pulau Lombok sebagai fokus pembangunan maupun pengembangan pariwisata berkelanjutan.

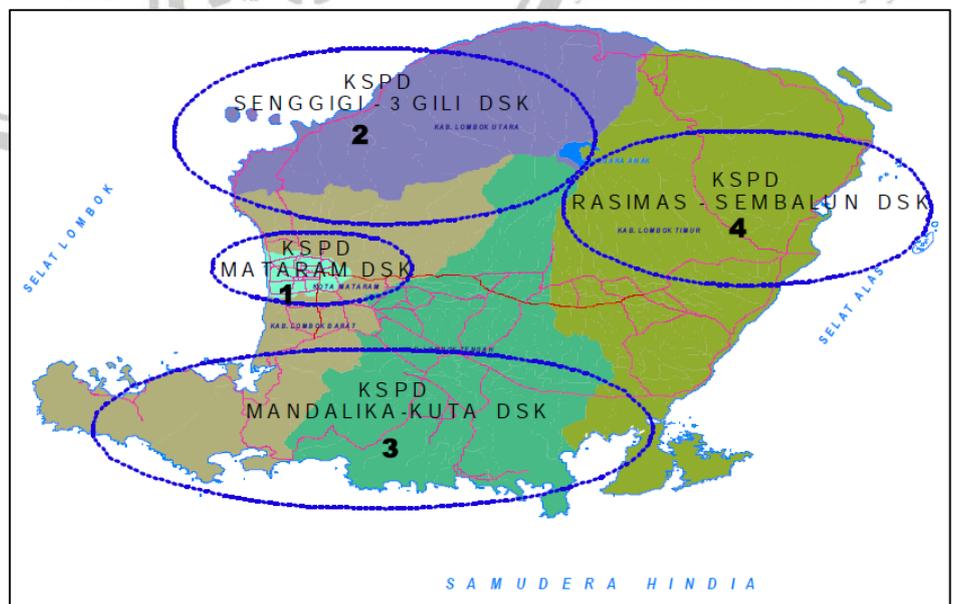
1. Pengembangan KSPD **Mataram** dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura,

Sekarbela, Banyumulek, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar sebagai kawasan wisata budaya, religi, kuliner, belanja dan MICE;

2. Pengembangan KSPD **Senggigi - Tiga Gili** dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gila, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner;
3. Pengembangan KSPD **Kuta Mandalika** dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Blanak, Sade, Kute, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya;
4. Pengembangan KSPD **Rasimas-Sembalun** dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq sebagai kawasan wisata agro, pegunungan dan kuliner; wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;

Gambar 5.3

Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Lombok



Sumber: Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang RIPPARDA NTB Tahun 2013-2028

Pemetaan KSPD tidaklah cukup untuk mengetahui secara detail potensi dan jenis daya tarik yang dimiliki pulau Lombok. Karena untuk mencapai kualitas perencanaan dan terstrukturanya proses perencanaan maka perlu untuk dilakukan pemetaan lebih mendalam terkait daya tarik wisata agar terarah dan tepat sasaran dalam implementasi dari perencanaan tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Bapak ISM selaku kepala Bidang Perencanaan Pariwisata pada Bappeda NTB sebagaimana menjelaskan bahwa:

“...dalam Ripparda NTB ada KSPD. KSPD itu adalah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. disana tertera potensi apa saja yang di miliki NTB maupun Lombok. misalnya ada destinasi Senggigi, dia di kabupaten apa dan masuk dalam KSPD mana.”

Hal demikian juga sejalan dan terkonfirmasi oleh data dokumen yang diperoleh peneliti melalui Dinas Pariwisata NTB. Berikut terdapat empat kelompok daya tarik wisata yang dimiliki Pulau Lombok yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota yang secara umum belum di bangun maupun dikembangkan secara optimal.

Tabel 5.5

Daya tarik wisata di masing-masing kabupaten/kota

Wilayah	Jenis Pariwisata			
	Pariwisata Pantai	Laut	Alam di darat	Tempat Budaya
Lombok Barat	Senggigi, Mekaki, Bangko-bangko	Gili Gede Gili Nanggu	Pusuk monkey forest, Hutan Sesoot	Desa Banyumulek, Suranadi, Narmada, Karang Bayan
Lombok Tengah	Kuta, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gerupuk		Air terjun Benang setokel, Kelambu, Rinjani	Desa Sukarara, Penujak, Sade
Lombok Timur	Pantai Pink, Pantai Surga	Gili Sudak Lampu Tangkong	Tete Batu, Air Terjun Kembang Kuning,	Desa Suwela, Penakak

			Rinjani	
Lombok Utara	Pantai Sepi	3 Gili	Rinjani, Air Terjun Sindang Gile	Desa tradisional Senaru dan Segenter
Mataram	Loang Baloq			Mayure, Shopping Mall, Desa Sekarbela

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Berdasarkan data tersebut kemudian oleh beberapa informan menyatakan bahwa untuk menetapkan kawasan prioritas dari data diatas, maka perlu untuk menganalisis tren pariwisata internasional.

Berikut pernyataan Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ:

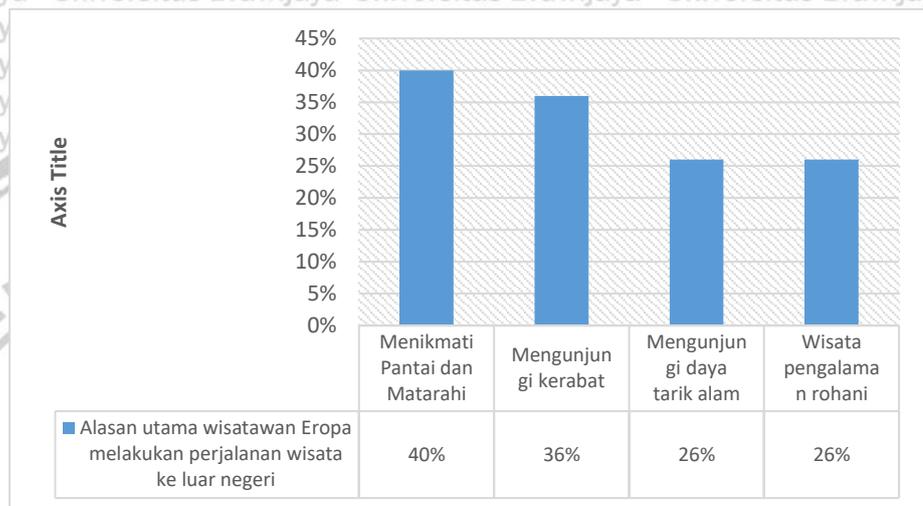
"...iya benar, tidak semua destinasi kita jadikan subyek untuk pengembangan. Memang STMP adalah rencana induk di Lombok. Tapi karena secara kuantitas destinasinya cukup banyak. Maka harus di pilih berdasarkan prioritas. Prioritas itu ditentukan berdasarkan hasil kajian kunjungan wisatawan dunia, dan mana destinasi yang membutuhkan pengembangan, dan perhatian untuk keberlanjutan."

Berdasarkan data tersebut, hal yang sama juga dapat dilihat pada dikumen STMP yang memuat data Komisi Eropa dalam *Tourism Bussines Portal* (2014) yang dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Sebagaimana STMP Lombok menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) alasan utama wisatawan Eropa melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. *Pertama*, sebanyak 40 persen wisatawan Eropa bertujuan melakukan perjalanan wisata dengan tujuan menikmati pantai dan matahari bersama keluarga ataupun kerabat untuk melepas diri dari rutinitas sehari-hari. *Kedua*, sebanyak 36 persen melakukan perjalanan wisata dengan alasan mengunjungi kerabat dan keluarga. Dan *Ketiga* adalah sebanyak 26 persen wisatawan melakukan

perjalanan wisata untuk mengunjungi daya tarik alam seperti gunung dan danau. Sedangkan *keempat* adalah dengan alasan mengunjungi wisata budaya yang memiliki pengalaman rohani dengan jumlah 26 persen.

Grafik 5.1

Alasan utama wisatawan Eropa melakukan perjalanan wisata ke luar negeri



Sumber: diolah sendiri melalui STMP Lombok

Data diatas selain menjadi gambaran tren wisata yang harus diperhatikan, juga menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan atas perencanaan pembangun. Karena meningkatnya tren perjalanan wisata berbanding lurus dengan kepuasan wisatawan. Mengingat Pulau Lombok memiliki potensi tren tersebut maka hal demikian dijadikan pertimbangan pengambilan fokus kebijakan pembangunan objek wisata yang sesuai dengan tren internasional dengan membangun citra positif destinasi yang kemudian akan berimplikasi pada rekomendasi perjalanan wisatawan satu ke wisatawan lainnya.

Sehingga melihat peluang tersebut, maka berdasarkan data pada STMP Lombok, ditetapkan beberapa lokasi prioritas pembangunan pariwisata berkelanjutan pulau Lombok berdasarkan peluang pasar internasional, dengan mengacu pada KSPD RIPPARDA NTB 2013-2028. Adapun kawasan yang menjadi prioritas yakni;

1. Kota Mataram yang meliputi Mataram dan sekitarnya;
2. Kabupaten Lombok Barat yang meliputi Senggigi, Banyumulek, Sesaot, Suranadi, Gili Gede, dan Bangko-bangko;
3. Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi Kuta Mandalika dan Sukarara;
4. Kabupaten Lombok Timur yang meliputi Sembalun dan Tete Batu; dan
5. Kabupaten Lombok Utara yang meliputi Kawasan 3 Gili (Trawangan, Meno dan Air) dan Senaru.

5.1.1.1.4 Analisis Destinasi

Setelah dilakukannya pemetaan kawasan prioritas dan fokus pembangunan wisata yang berkelanjutan, selanjutnya pada tahap ini dilakukannya kajian maupun analisis destinasi terhadap produk wisata untuk diketahui apa saja kemudian yang menjadi faktor terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata tersebut.

Hal demikian penting untuk dilakukan mengingat sebagai dasar didalam pengambilan tindakan terhadap konservasi lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Didalam STMP Lombok 2015-2019 dan berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan (observasi) akan dijelaskan beberapa

faktor yang menjadi tantangan dalam kinerja destinasi antara lain aktivitas pariwisata di Gili Trawangan yang tinggi yang tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam hal penggunaan volume air. Selain itu pada jalur destinasi selong belanak terdapat beberapa bencana longsor yang diakibatkan oleh aktivitas tambang, destinasi sembalun yang juga demikian. Hal tersebut juga dapat dibenarkan oleh data dokumen yang diperoleh sebagaimana berikut:

1. Adanya aktivitas penyedotan dan penggunaan air tanah di Gili Trawangan, Air dan Meno yang dikhawatirkan akan terjadi peningkatan rembesan air laut terhadap air tanah yang berpotensi terhadap meningkatkan kadar garam air tanah. Ini berpeluang terjadi karena aktivitas pariwisata yang terlampau aktif dan pemanfaatan air tanah yang tinggi. Tentu hal demikian menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup ikan laut, karang, dan juga tumbuhan disekitar kawasan Gili Trawangan, Air dan Meno.
2. Minimnya kesadaran masyarakat atas urgensi kebersihan lingkungan dan tingginya kebiasaan masyarakat terhadap buang sampah sembarangan. Demikian terjadi disebabkan oleh rendahnya aktivitas sosialisasi wisata keberlanjutan serta minimnya fasilitas kebersihan yang dimiliki pemerintah untuk ditempatkan diberbagai lokasi destinasi. Tingginya kebiasaan membuang sampah rekatif terjadi pada destinasi Gili Trawangan, Air, Meno dan Gunung Rinjani.
3. Terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di kaki Gunung Rinjani yakni daerah Sembalun dan Sambelia. Hal demikian terjadi karena akibat dari penebangan pohon secara liar pada kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan pemanfaatan

pohon maupun pembukaan lahan baru untuk aktivitas perkebunan.

Ancaman serius pada keberlangsungan hidup flora dan fauna kemudian menjadi ancaman serius pemerintah.

4. Penangkapan, perburuan, dan komersialisasi binatang-binatang endemik Lombok yang langka dan dilindungi dilakukan secara liar dan tidak terkendali. Binatang-binatang tersebut seperti penyu, monyet, dan berbagai jenis ikan langka yang dikonsumsi dan dijadikan hewan peliharaan. Begitu juga dengan nasib burung yang diburu untuk di komersilkan. Perdagangan ilegal burung terjadi cukup lama dan mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan tidak seimbang ekosistem dan lebih jauh lagi akan di khawatirkan menimbulkan petaka lingkungan dalam beberapa tahun mendatang.

5. Rusaknya terumbu karang dan penangkapan ikan laut menggunakan bahan peledak dan racun yang masih marak terjadi di sekitar Lombok dan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Penggunaan bahan peledak dan racun mengancam kelestarian terumbu karang dan ikan, pula termasuk kelangsungan hidup nelayan lokal yang menangkap ikan dengan metode tradisional. Selain itu, perusakan terumbu karang potensial terjadi akibat adanya aktivitas buang jangkar kapal yang dilakukan secara sembarangan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya koordinasi yang bersifat kolaboratif dan solid agar antar instansi pemerintah untuk secara bersama-sama menangani permasalahan tersebut.

6. Pada aspek lingkungan lainnya yakni adanya polusi suara yang ditimbulkan oleh pengeras suara dari tempat-tempat ibadah, kendaraan bermotor, karaoke, bar dan club yang berada di kawasan

wisata pada waktu-waktu tertentu juga acapkali dikeluhkan oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Akan tetapi khusus untuk pengeras suara di tempat ibadah adalah suatu kebutuhan sehingga dalam mengatasi fenomena tersebut diperlukan pendekatan yang bersifat hati-hati karena menyangkut konteks fenomena yang bersifat sensitif. Untuk itu perlunya pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

7. Terjadinya erosi lahan dan pantai yang disebabkan oleh konstruksi bangunan dan tambang pasir ilegal. Bangunan yang sudah berdiri maupun yang sedang didirikan kerap kali melanggar batas garis pantai dan masyarakat setempat yang secara kuantitas cukup banyak mengambil pasir ilegal untuk tujuan konstruksi.
8. Rusaknya infrastruktur (jalan penghubung antar destinasi pantai) pada kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya yang diakibatkan oleh hujan dan tanah longsor. Hal demikian terjadi oleh aktivitas tambang liar masyarakat setempat dan hasil pembuangan limbah tambang yang tidak terakomodir dengan baik sehingga mengganggu aktivitas perjalanan dan berpotensi pada terancamnya keselamatan pengunjung.
9. Rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya nelayan pada destinasi pantai Selong Belanak) terhadap kebiasaan parkir perahu pada pesisir pantai, hal demikian tentunya menjadi hambatan wisatawan dalam beraktivitas maupun dalam menikmati keindahan destinasi. Sehingga diperlukannya suatu aturan yang dapat dipatuhi bersama demi terjaganya kelestarian dan keindahan destinasi pada kawasan tersebut.

Melalui berbagai hasil analisis destinasi, tentunya tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak dalam upaya untuk mengkaji persoalan berbagai destinasi. Artinya baik tahapan analisis maupun diluar analisis tersebut partisipasi berbagai *stakeholder* sangat diperlukan guna menunjang keberlangsungan proses perencanaan secara utuh. Sehingga dalam melakukan tahap tersebut berbagai peran *stakeholder* tersebut terlibat baik dalam bentuk suplai data untuk dianalisis maupun statement-statement pelaku wisata dan masyarakat lokal yang dihasilkan melalui proses FGD (*Focus Group Discussions*).

5.1.1.2 Penentuan Tujuan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok yang termaktub dalam *STMP* Lombok, maka dilakukan wawancara dengan informan yang telah terlibat secara langsung dalam proses perencanaannya. Selain itu, identifikasi terhadap penentuan tujuan juga dilakukan dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang telah di kumpulkan melalui cara-cara atau teknik pengumpulan data yang telah ditentukan pada bab metode penelitian, sehingga dapat ditemukan sumber dalam penentuan tujuan dari proses perencanaan. Adapun salah satu informan yakni Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ memberikan pernyataan sebagai berikut:

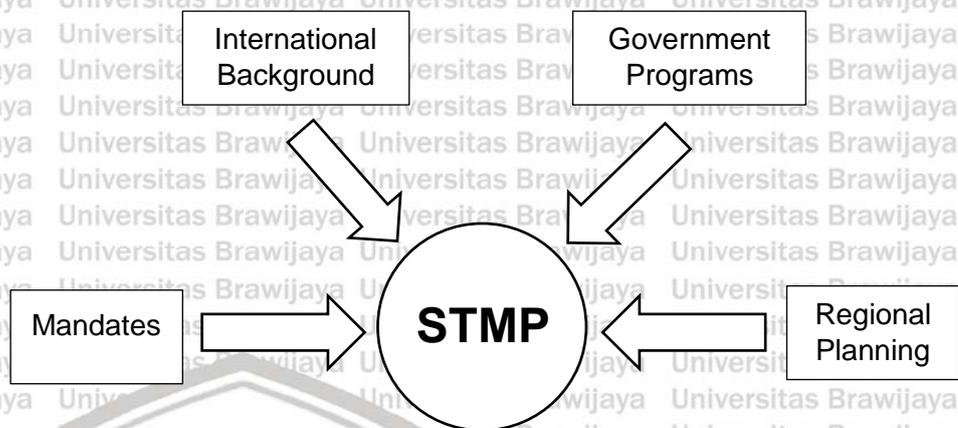
“...untuk tujuannya kita rumuskan dan tetapkan berdasarkan bebrapa pertimbangan, misalkan seperti Perda, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, sampai ke aturan-aturan Internasional. Selain menjadi dasar penyusunan juga dijadikan dasar sebagai menentukan tujuan.”

Proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok menghasilkan beberapa tahapan yang akan dijelaskan secara urut dan spesifik pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Akan tetapi dalam menyusun *STMP* Lombok, mainstreamnya, proses perencanaan dimulai dengan penentuan tujuan (*Determination of goals*). Walaupun secara tertulis digambarkan pada perencanaan bahwa proses dimulai pada tahap penilaian kondisi atau penilaian kebutuhan, akan tetapi beberapa hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan proses perencanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok diawali dengan ditentukannya suatu tujuan besar yakni tujuan untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan.

Penetapan tujuan secara *general* berdasarkan hasil wawancara maka dilakukan dengan meratifikasi konstitusi atau mengacu dan atau berpedoman pada aturan-aturan yang lebih tinggi baik itu aturan internasional, nasional, maupun regional. Adapun sumber-sumber tersebut yang meliputi empat kategori adalah seperti Undang-undang (*Mandates*), Aturan Internasional (*International Background*), Program Pemerintah (*Government Program*), dan Perencanaan Provinsi (*Regional Planning*) yang tergambar pada data dokumen atau draft inisiatif pariwisata hijau di Lombok (*outline* Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan di Lombok). Berikut akan dijelaskan secara mendetail:

Bagan 5.1

Outline Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan di Lombok



Sumber: draft inisiatif pariwisata hijau di Lombok (ppt)

a. Undang-undang (*Mandates*)

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 2 bahwa pengembangan pariwisata harus berdasarkan pada prinsip (a) manfaat, (b) kekeluargaan, (c) adil dan merata, (d) keseimbangan, (e) kemandirian, (f) kelestarian, (g) partisipatif, (h) berkelanjutan, (i) demokrasi, (j) kesetaraan dan (k) kesatuan. Untuk itu, *STMP* Lombok menargetkan tujuan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Menyetir keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,
2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,
3. Melestarikan lingkungan dan mengelola salah satu aset pariwisata utama di Indonesia,
4. Dalam skala nasional, perkembangan pariwisata berkontribusi terhadap beberapa komitmen dari Pemerintah sebagai berikut:

(a) Salah satu hasil dari konferensi Rio+20 yaitu mengenai persetujuan oleh anggota yang menyatakan akan melaksanakan proses untuk

mengembangkan satu set *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang disusun berdasarkan *Millenium Development Goals* dan menyatukannya dengan agenda pengembangan setelah tahun 2015.

(b) *10 Years Framework Programmes on Sustainable Consumption and Production* meningkatkan kerjasama internasional untuk mempercepat perubahan menuju *Sustainable Consumption Production* (SCP) di seluruh dunia. 10 YFP dikembangkan, direplikasi dan ditingkatkan disertai inisiatif sumber daya yang ada, baik di tingkat nasional dan regional, melepas keterkaitan antara degradasi lingkungan dan penggunaan sumber daya dari pertumbuhan ekonomi dan hal-hal yang meningkatkan kontribusi bersih dari aktivitas ekonomi terhadap pemberantasan kemiskinan dan perkembangan sosial.

(c) Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam perlawanan global terhadap perubahan iklim: sampai tahun 2020, pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari tingkat yang ada saat ini menjadi target untuk dicapai, didanai dari sumber daya sendiri dan 41% merupakan dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim (RAN-PI), Rencana Aksi Nasional untuk Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) memandu strategi dan aktivitas terkait mitigasi *Greenhouse Gas Emissions* (GHG) dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara sistematis. Pengenalan terhadap teknologi penghematan energi dan solusi untuk menghasilkan produk dan jasa adalah sebuah langkah penting untuk mengurangi

emisi karbondioksida. Pilar penting lainnya yaitu meningkatnya penggunaan sumber daya energi terbarukan.

- (d) *Travel* dan Pariwisata merupakan kebutuhan manusia, selain itu sektor ini membuka kesempatan bekerja secara langsung dan tidak langsung sebesar 8,3% pekerja (9,2 juta pekerja).

Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kesempatan kerja untuk sektor ini dengan mempekerjakan penduduk setempat dan meningkatkan peluang kerja secara signifikan berlandaskan budaya setempat dan lingkungan. Dalam rangka mengurangi *carbon footprint* dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam, pemerintah pusat bertugas mempromosikan panduan produk yang berkelanjutan khususnya untuk industri pariwisata. Karena, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memperkenalkan tidak hanya Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Nasional, tetapi juga standar keberlanjutan untuk industri pariwisata dan destinasi.

- (e) Dalam hal produk, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempromosikan program PROPER dan *Ecolabel*, dua kerangka kerja yang memberikan predikat “green”, produksi dan proses pengelolaan berkelanjutan. Walaupun jumlah industri yang berminat untuk mendapatkan predikat ini masih tergolong kecil, namun industri yang mampu memenuhi semua standar program yang dimaksud pantas mendapatkan manfaat dari keberhasilannya seperti mendapatkan bunga kredit yang lebih rendah atau sebagainya. Dalam kasus industri yang menjadi sumber polusi terberat, pihak terkait mempunyai wewenang untuk menarik izin usaha dari industri yang bersangkutan sebagai salah satu

konsekuensinya apabila industri yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi standar minimal dari program yang dimaksud.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi sumber atau *rational foundation* dalam menentukan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana undang-undang tersebut memberikan aturan dalam pelaksanaan pembangunan haruslah bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi kehidupan generasi saat ini dan generasi mendatang.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) juga menjadi peraturan penting terhadap dasar pengambilan keputusan maupun penentuan tujuan untuk pembangunan pariwisata Provinsi NTB. Hal demikian beralasan sebagai pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan nasional dengan perencanaan yang ada di daerah dengan maksud agar terhindar pada ketimpangan-ketimpangan dan bias-bias pembangunan secara umum dan pembangunan sektor pariwisata secara khusus.

Selain itu, terdapat sejumlah peraturan dan undang-undang lainnya yang meliputi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah; Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagaimana dalam RPJMN tersebut pariwisata merupakan satu dari 4 fokus yang akan dikembangkan.

Kemudian menjadi salah satu dari 39 Provinsi yang akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata nasional dan salah satunya yakni kawasan Gunung Rinjani di Pulau Lombok.

b. Aturan Internasional (*International Background*)

Sustainable Tourism Master Plan Lombok didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang berlaku secara global yang meliputi; Agenda 21 yang merupakan penerapan rencana aksi dari PBB untuk pengembangan berkelanjutan, agenda tersebut juga merupakan produk *Earth Summit (UN Conference on Environment and Development)* yang telah diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil di tahun 1992; Kode Etik Global UNWTO untuk Pariwisata (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip panduan untuk pemangku kepentingan (*Stakeholder*) utama pariwisata yakni pemerintah, industri pariwisata, dan wisatawan, dalam rangka mengoptimalkan dampak positif pariwisata dan secara bersamaan meminimalisir dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup; dan yang terakhir yakni *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* yang berkaitan dengan kriteria destinasi wisata berkelanjutan dan kriteria operasional hotel dan *tour operator* sebagaimana terdapat empat prinsip keberlanjutan yakni keberlangsungan manajemen, memaksimalkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal, meningkatkan dan melestarikan warisan budaya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Program Pemerintah (*Government Program*)

Adapun program Pemerintah yang menjadi acuan adalah Program SCP atau *Sustainable Consumption and Production Program* Indonesia

tahun 2013-2023, Program *Ecolebel and Green Public Procurement*, Program Industri Hijau, Program Pembangunan Hijau, Program Wisata Hijau, dan Program, dan Program Pengelolaan Limbah.

d. Perencanaan Provinsi (*Regional Planning*)

Sedangkan prinsip keberlanjutan juga didasarkan pada perencanaan di tingkat regional yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018; Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) NTB; dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang secara tegas juga mengarahkan tujuan pembangunan pariwisata daerah sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, industri secara profesional, efektif dan efisien.

Sehingga, berdasarkan dan mempertimbangkan beberapa penjelasan tersebut, maka dengan demikian visi *STMP* Lombok yakni ***“Lombok sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya, yang berdaya saing dan berkelanjutan”*** dan tujuan dari *STMP* Lombok yang tersusun dengan mengacu pada beberapa sumber tersebut diatas yakni:

1. Pembangunan destinasi pariwisata di Pulau Lombok

Tujuan 1: Partisipasi masyarakat lokal dalam membangun destinasi

Tujuan 2: Membangun destinasi pariwisata yang unik, bersih, otentik dan berkelanjutan

Tujuan 3: Membangun destinasi pariwisata yang aman dan nyaman

2. Pemasaran pariwisata di Pulau Lombok

Tujuan 4: Meningkatkan kualitas kunjungan dan kepuasan wisatawan

3. Industri pariwisata di Pulau Lombok

Tujuan 5: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh SDM pekerja pariwisata yang professional

Tujuan 6: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh publik yang berwawasan lingkungan

4. Kelembagaan pariwisata di Pulau Lombok

Tujuan 7: Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar industry pariwisata dapat menciptakan produk/jasa kreatif dan inovatif

Tujuan 8: Mewujudkan lingkungan usaha yang berorientasi pada prinsip kepariwisataan hijau dan usaha pariwisata berkelanjutan.

Melihat dari berbagai tujuan tersebut, tujuan STMP Lombok 2015-2019 dirumuskan, selain didasarkan pada RIPPARDA NTB, juga telah dirumuskan berdasarkan pertimbangan pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang meliputi 4 kriteria destinasi berkelanjutan. Sehingga apabila dianalisis tujuan tersebut dengan cara penandingan terhadap peraturan menteri pariwisata, maka dapat ditarik berbagai hasil analisis sebagai berikut:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan

Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan pada Peraturan Menteri Pariwisata no. 14 tahun 2016 memberikan syarat, bahwa dalam pengelolaan destinasi pariwisata perlunya melibatkan peran masyarakat lokal dalam aktivitas penyusunan strategi terhadap membangun destinasi pariwisata berkelanjutan. Artinya, hal demikian menandakan, perumusan tujuan telah mempertimbangkan

aspek keterlibatan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan.

Akan tetapi secara empiris, apabila dilakukan observasi pada salah satu destinasi. tujuan dari destinasi pariwisata berkelanjutan dengan mengedepankan aspek partisipasi masyarakat dan menjamin keamanan dan kenyamanan. Maka hal demikian tidak dapat ditemukan. Masyarakat secara umum dilibatkan dalam memanfaatkan pariwisata, namun tidak diberikan pemahaman atas merawat kebersihan dan menjaga keamanan serta kenyamanan. Artinya tujuan utama dalam pariwisata berkelanjutan merepresentasikan, namun tidak mampu mengarahkan pariwisata ke arah yang berkelanjutan. Diluar itu, tantangan dalam tujuan utama ini adalah berada pada tidak tersebarnya secara merata kunjungan wisatawan yang mengakibatkan masyarakat enggan terlibat dalam pengelolaan destinasi secara kontinu.

2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal

Pemanfaatan ekonomi lokal oleh masyarakat lokal terlihat antusias dalam memberikan partisipasi. Hal ini tercermin melalui destinasi sesaot yang memanfaatkan pariwisata untuk membangkitkan ekonomi lokal. Akan tetapi aktivitas pemanfaatan ekonomi lokal tersebut tidak datang dari STMP Lombok, melainkan datang dari rencana kerja masing-masing OPD. Artinya STMP Lombok tidak mampu juga mengarahkan perekonomian lokal. Akan tetapi secara konsep pariwisata berkelanjutan yang didasarkan pada pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, terhubungnya ekonomi masyarakat lokal terhadap aktivitas ekonomi pariwisata perlu di apresiasi dan memiliki dampak yang baik.

3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung;

Pelestarian budaya secara khusus tidak terefleksi kedalam beberapa tujuan STMP Lombok. Tidak terefleksikannya hal tersebut dikarenakan rumusan tujuan STMP Lombok didasarkan pada empat prinsip pembangunan pariwisata yang meliputi destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan. Tidak dirumuskan berdasarkan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan oleh Peraturan Kementerian Pariwisata No 14 tahun 2016.

Dengan demikian, STMP Lombok apabila ditinjau keberlanjutannya, maka tidak merefleksikan prinsip pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung secara prioritas, melainkan STMP Lombok memberikan ruang secara tidak khusus atas prinsip pelestarian budaya. Maka STMP Lombok pada sisi tertentu mengakomidir prinsip pariwisata berkelanjutan, dan sisi lainnya tidak merepresentasikan prinsip pariwisata berkelanjutan.

4. Pelestarian lingkungan.

Secara implisit, STMP Lombok dalam konteks pelestarian lingkungan, STMP Lombok memberikan ruang terhadap peestarian lingkungan. Pelestarian tersebut termaktub dalam berbagai strategi dalam mencapai tujuan-tujuan STMP Lombok. Namun, bersamaan dengan pelestarian budaya, pelestarian lingkungan tidak secara khusus diberikan ruang melalui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh pedoman dalam menentukan tujuan adalah prinsip pariwisata umumnya, dan tidak didasarkan pada pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan.

5.1.1.3 Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Agar tercapainya sinkronisasi atau keterkaitan antara perencanaan satu dengan yang lainnya, baik vertikal maupun horizontal. Maka untuk merumuskan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetap

mengacu pada strategi RIPPARDA NTB sebagaimana yang diampaikan oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ, berikut pernyataannya:

“...strategi untuk di STMP ini diklasifikasikan berdasarkan pada 4 prinsip pariwisata yang ada di RIPPARNAS maupun di RIPPARDA, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa strategi tidak boleh keluar dari jalur 4 prinsip itu.”

Hal tersebut juga senada diungkapkan oleh Bapak NG yang menyebutkan bahwa STMP memang secara mendasar harus tetap dibangun berdasarkan empat prinsip pariwisata. Berikut pernyataan oleh Bapak NG selaku Pejabat Fungsional Perencanaan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB:

“...memang kita tidak bisa membangun jika keluar dari 4 prinsip itu, karena itu adakah amanah Undang-undang dan amanah dari Praturan Daerah NTB atau RIPPARDA. Jadi mau dia STMP atau rencana apapun harus meliputi 4 prinsip tadi. Apa aja itu? Ada destinasi, industry, kelembagaan, dan promosi. Nah, kalau indikator keberlanjutannya dia menggunakan indikatr dari Jerman, diakui dunia.”

Melalui data informan tersebut, adapun strategi yang di tentukan terkategori berdasarkan prinsip pembangunan pariwisata yakni; destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata; industri pariwisata; dan kelembagaan pariwisata. Selain penentuan strategi berdasarkan tujuan, strategi juga harus di sandingkan dengan kriteria dan indikator pariwisata berkelanjutan oleh GSTC.

Berdasarkan STMP Lombok 2015-2019, pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan Lombok adalah menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* dengan prinsip-prinsip Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (STMP Lombok, 2015-

2019). Prinsip yang mengedepankan keseimbangan antara ketiga dimensi sebagai dasar dalam pengambilan strategi dan rencana aksi dalam perencanaan lima tahun. Dimana pada dimensi ekonomi, perencanaan pembangunan didasarkan pada upaya meningkatkan perekonomian lokal, mengurangi angka kemiskinan, mendorong tumbuh kembangnya perekonomian lokal melalui, membuka lapangan pekerjaan dengan memprioritaskan masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan data tersebut, Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ juga menyatakan demikian:

“...masalah penggunaan konsep berkelanjutannya kita pakai pendekatan 3 prinsip pada umumnya, yakni Triple Bottom Line. Diharapkan nanti adanya stabilitas atau keseimbangan baik dalam ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena ini kan pariwisata berkelanjutan.”

Sedangkan dimensi sosial berdasarkan data dokumen yakni STMP Lombok 2015-2019, menegaskan dalam pencapaian upaya-upaya mengembangkan dan melestarikan warisan budaya seperti tari seni, musik, maupun berupa situs budaya seperti event tahunan. Begitupun juga dengan dimensi lingkungan menitik beratkan pada kelestarian lingkungan dengan mengadopsi manajemen sampah pariwisata 3R, dan memberikan pendidikan dan pemahaman yang solid kepada masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya menggunakan prinsip tersebut sebagai pencapaian pariwisata berkelanjutan, melainkan diberlakukannya beberapa indikator internasional seperti GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) sebagai pedoman dalam mencapai pariwisata berkelanjutan (STMP Lombok 2015-2019).

Selain itu, untuk dapat menghasilkan berbagai strategi dalam STMP Lombok tentunya telah melalui berbagai proses perumusan dengan memanfaatkan analisis SWOT yang meliputi (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) dan secara langsung digunakan teknik penjabaran sekaligus penggabungan berbagai strategi yang dihasilkan terhadap beberapa tujuan yang telah dihasilkan. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak SN selaku Advisor Tourism pada GIZ sebagai berikut:

“...penyusunan strategi ini kita manfaatkan metode SWOT, kita cari tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang dan ancaman kita. Dari sini kita dapatkan berbagai strategi. Kalau untuk mendapatkan berbagai variabel SWOT itu kita dari observasi, kajian dokumen, FGD, dan lain-lain. Strateginya pun tidak hanya dari SWOT, tapi kita memutuskan berdasarkan aturan dan indikator GSTC yang di akui secara internasional untuk destinasi dan perhotelan.”

Hal demikian senada juga yang disampaikan oleh Bapak NG selaku Pejabat Fungsional Perencanaan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

“...sepengetahuan saya, untuk strategi itu umumnya menggunakan SWOT, memang kita tidak dilibatkan dalam mengembangkan strategi secara khusus, karena itu kan tugasnya mereka. Jadi kita hanya duduk bareng saat FGD saja. Pembahasan terkait persoalan di lapangan, dimintai pandangan tentang kondisi pariwisata. Ya seperti itu kira-kira.”

Berdasarkan data tersebut, dapat di simpulkan bahwa dalam merumuskan strategi STMP Lombok, perencana menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan berbagai strategi dengan mempertimbangkan beberapa indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan (GSTC Jerman) dan berbagai aturan yang tersedia. Sehingga melalui berbagai proses panjang perumusan strategi melalui FGD secara berseri di seluruh

kabupaten/kota di Pulau Lombok, maka berikut di jelaskan berbagai strategi yang telah dihasilkan melalui SWOT.

5.1.1.3.1 Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

RIPPARDA NTB 2013-2028 menjelaskan pembangunan destinasi berkelanjutan diartikulasikan sebagai upaya terpadu dan sistematis terhadap seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan destinasi pariwisata.

Dalam menentukan strategi khususnya pembangunan destinasi, terdapat tiga tujuan yang telah ditetapkan dan akan dijadikan dasar dalam perumusan strategi. Untuk mencapai suatu tujuan, maka perlu dilakukannya penjabaran atau dilakukannya spesifikasi terhadap tujuan untuk menjabarkan strategi apa yang akan digunakan didalam mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan. Proses-proses demikian akan berlaku pada tujuan-tujuan dan strategi-strategi berikutnya seperti; strategi pembangunan kelembagaan, pemasaran, dan industri yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Berkaitan dengan pembangunan destinasi pariwisata, hasil observasi menunjukkan bahwa di beberapa destinasi dapat dijumpai perilaku pengunjung dan masyarakat setempat terhadap kurangnya kesadaran akan kebersihan, terutama pada hari-hari libur besar dan hari peringatan-peringatan besar, seperti contoh peringatan tahun baru (1 Januari 2018) yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal atau wisatawan nusantara pada destinasi pantai Selong Belanak. Dampak pesatnya kunjungan pada akhirnya berakibat pada peningkatan volume sampah

pengunjung yang berasal dari kemasan makanan ringan dan makanan olahan.

Pada konteks persepsi, masyarakat lokal dan wisatawan nusantara memiliki berbagai pandangan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Namun tidak sedikit pula yang tidak memahami mengenai pariwisata berkelanjutan. Hal ini tercermin melalui rendahnya kesadaran akan kelestarian lingkungan. Persepsi masyarakat lokal hanya berfokus pada bagaimana memperoleh keuntungan jangka pendek atau pragmatis jangka pendek melalui aktivitas pariwisata. Hal demikian juga dipaparkan oleh informan yakni Bapak NG selaku Pejabat Fungsional Perencanaan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB:

“.....keberlanjutan itu menjadi prasyarat, sebab karena hasil ratifikasi pembangunan pariwisata dunia, harus itu menjadi kewajiban. Dan ini kemudian berat untuk kita lakukan karena untuk mengajak orang berfikir secara berkelanjutan adalah tidak mudah. Tantangannya masyarakat yang hanya memikirkan untuk makan hari ini, selain itu dalam hal investasi yang pasti mengeluarkan sesuatu untuk di panen untuk masa yang akan datang yakni mental. Sehingga antara kalangan yang mementingkan kebutuhan hari ini dan kebutuhan jangka panjang selalu menjadi versus (perdebatan), itulah yang menjadi tantangan di lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara informan maka dapat di ambil poinnya yakni adanya perbedaan pandangan dalam memahami pariwisata berkelanjutan, sehingga hal demikian yang menjadi tantangan kedepan dalam menjalankan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Mengingat tantangan tersebut harus diberikan perhatian khusus, maka berikut disajikan tabel tujuan dan strategi untuk menjawab berbagai persoalan destinasi dan mendukung berbagai pernyataan informan.

Tabel 5.6

Tujuan dan Strategi Pembangunan Destinasi

A. Pembangunan Destinasi	
Tujuan	Strategi
Tujuan 1: Partisipasi masyarakat lokal dalam membangun destinasi	1.1 Mengikutsertakan tokoh masyarakat serta para pendidik formal dan non-formal dalam proses promosi kepariwisataan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata; 1.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal;
Tujuan 2: Membangun destinasi pariwisata yang unik, bersih, otentik dan berkelanjutan	1.1 Meneliti dampak lingkungan secara komprehensif; 1.2 Membuat dan memberlakukan awig-awig ¹ di kawasan pariwisata; 1.3 Membangun sarana dan prasarana pariwisata skala kecil yang dikelola oleh masyarakat setempat. 1.4 Mengidentifikasi potensi pengembangan wisata maritim; 1.5 Mengembangkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim;
Tujuan 3: Membangun destinasi pariwisata yang aman dan nyaman	1.1 Membentuk pemswakarsa pariwisata; 1.2 Mencegah praktik seks komersial atau segala macam bentuk eksploitasi dan pelecehan terhadap siapapun, khususnya anak-anak, remaja, wanita, dan minoritas;

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

5.1.1.3.2 Strategi Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan ke-4 dari STMP Lombok adalah meningkatkan kualitas kunjungan dan kepuasan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan sejak lama telah

¹ Awig-awig: Hukum adat warisan leluhur, atau nilai-nilai masyarakat yang dijadikan peraturan yang disusun dan diakui eksistensinya secara bersama-sama oleh anggota masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

dilakukan Dinas Pariwisata NTB dan *stakeholder* terkait melalui program-program promosi dan pemasaran, baik pemasaran di dalam dan di luar negeri. Hal demikian juga didukung oleh adanya Badan Promosi Pariwisata NTB yang dibentuk melalui peraturan Gubernur NTB.

Namun, meningkatkan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun tidak selalu memberikan dampak yang baik. Pemasaran yang telah dilakukan acapkali tidak proporsional terhadap potensi destinasi dan budaya yang dimiliki. Hal demikian berakibat pada tidak adanya pergerakan wisatawan dari satu destinasi ke destinasi lain dalam artian pergerakan pariwisata tidak merata di berbagai destinasi di Pulau Lombok sebagaimana hasil observasi lapangan yang menunjukkan sentralistiknya wisatawan pada suatu destinasi yakni Gili Trawangan, sedangkan pada destinasi banyumulek dan sesot sangat minimnya dikunjungi wisatawan. Hal demikian tentu diakibatkan oleh minimnya informasi melalui media cetak, online dan televisi terhadap suatu destinasi yang baru dikembangkan.

Maka untuk meminimalisir dan menyelesaikan beberapa tantangan tersebut, dirumuskan beberapa strategi pemasaran pariwisata secara global dengan tujuan agar pesatnya kunjungan beriringan dengan kualitas pergerakan dan pengalaman wisatawan baik di segala aspek yang diharapkan. Berikut tujuan dan spesifikasi tujuan yang menjadi beberapa strategi:

Tabel 5.7
Tujuan dan Strategi Pemasaran Pariwisata

B. Pemasaran Pariwisata	
Tujuan	Strategi
Tujuan 4:	5.2 pemasaran terpadu (antara sektor pemerintah dan swasta) dengan strategi

<p>Meningkatkan kualitas kunjungan dan kepuasan wisatawan</p>	<p>yang menggunakan pendekatan terstandarisasi; 5.3 menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan dari pasar pariwisata yang paling menjanjikan;</p>
---	---

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

5.1.1.5.3 Strategi Industri Pariwisata Berkelanjutan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) tahun 2013-2028 menjelaskan bahwa pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong ataupun mengupayakan penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pembangunan industri pariwisata dalam beberapa tahun terakhir memiliki beragam problem, salah satunya adalah problem terhadap kualitas sumber daya manusia pada sektor industri pariwisata. Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi hambatan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lombok khususnya pada wilayah destinasi Pantai Kuta (Kanom, 2015).

Rendahnya kualitas SDM tersebut tentunya berdampak pada pola komunikasi dan interaksi antara wisatawan dengan pemandu wisata. Mengingat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni tentunya menjadi hambatan dalam memberikan perjalanan pariwisata dan pengalaman wisata. Lebih jauh lagi, hal demikian akan berdampak pada rendahnya kepuasan pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara melalui informan juga menunjukkan beberapa masalah industri pariwisata, salah satunya yakni, rendahnya pemahaman atas pentingnya pariwisata berkelanjutan, sulitnya memonitoring pemandu wisata yang acapkali memiliki kerjasama dengan pemodal besar usaha souvenir dalam menentukan rute perjalanan wisata. Hal demikian tentunya berdampak pada produk-produk tradisional (pengerajin kecil) yang tidak memiliki akses terhadap perekonomian pariwisata. Untuk itu, dalam mencapai tujuan selanjutnya, maka disusunnya beberapa strategi sebagai upaya meminimalisir dan membangkitkan perekonomian lokal melalui dampak-dampak perjalanan pariwisata.

Tabel 5.8

Tujuan dan Strategi Industri Pariwisata

C. Industri Pariwisata	
Tujuan	Strategi
Tujuan 5: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh SDM pekerja pariwisata yang professional	1.1 Pemberian kursus, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja khususnya untuk pemandu wisata, anggota pokdarwis, tenaga kerja pariwisata dan siswa SMK Pariwisata;
Tujuan 6: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh publik yang berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan destinasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata lainnya dan bisnis pariwisata (hotel dan tour operator);

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

5.1.1.5.4 Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan kelembagaan pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan,

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Pembangunan kelembagaan ini menitik beratkan pada pencapaian kualitas SDM, pemberian kesempatan terhadap UMKM, memberikan akses terhadap produk lokal dalam menunjang kegiatan pariwisata, dan pemberian insentif melalui lembaga sertifikasi pengusaha wisata lokal.

Tersusunnya beberapa strategi tersebut didasarkan pada beberapa problematika yang telah terjadi, dimana produk lokal tidak memperoleh akses atau tidak terhubungnya produk lokal kepada pemodal usaha pariwisata sehingga produk lokal acapkali tidak memiliki tempat dan daya jual yang tinggi, selain demikian masyarakat lokal yang tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan produk kerajinan (suvenir), dan minat masyarakat yang tinggi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) namun tidak diimbangi dengan kebijakan akses keuangan (modal) bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 5.9

Tujuan dan Strategi Kelembagaan Pariwisata

D. Kelembagaan Pariwisata	
Tujuan	Strategi
<p>Tujuan 7: Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar industri pariwisata dapat menciptakan produk/jasa yang kreatif dan inovatif</p>	<p>1.1 Mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dan perdagangan yang adil (<i>fair trade</i>); 1.2 Memberikan akses keuangan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha kecil mandiri di industri suvenir dan kuliner; 1.3 Menghubungkan kelompok produk lokal</p>
<p>Tujuan 8: Mewujudkan lingkungan usaha yang berorientasi pada prinsip</p>	<p>8.1 Memberikan insentif dan mendirikan lembaga sertifikasi untuk pengusaha wisata lokal.</p>

kepariwisataan hijau dan usaha pariwisata berkelanjutan

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

1.1.1.4 Rencana Aksi

Rencana aksi adalah tahapan terakhir dari serangkaian tahapan dalam sirkulasi perencanaan pembangunan pada umumnya. Rencana aksi dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok (STMP Lombok) juga sebagai rencana yang bersifat terperinci atau terjemahan terhadap tahap perencanaan sebelumnya yakni strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam STMP Lombok, rencana aksi, selain penjabaran secara terperinci, juga mengandung atau memuat; indikator kinerja, periode pelaksanaan dari suatu rencana aksi, dan tentunya *lead agency* atau stakeholder yang bertanggung jawab atas implementasi rencana aksi tersebut. Namun, secara sederhana, rencana aksi dirumuskan dan dihasilkan melalui proses FGD secara berseri di kabupaten/kota di Pulau Lombok. sedangkan keputusan atau pemilihan rencana aksi tentunya diputuskan atas dasar kemudahan dalam mencapai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan haruslah berdasarkan empat prinsip yakni pembangunan destinasi, kelembagaan, industri, dan pemasaran. Sehingga demikian pula dalam penjabaran strategi ke dalam rencana aksi pembangunan haruslah berdasarkan empat prinsip pembangunan kepariwisataan tersebut. Sehingga demikianlah beberapa rencana aksi yang telah di tentukan dan dikembangkan oleh GIZ dan Dinas Pariwisata

NTB sebagai upaya maupun aksi dalam upaya mencapai pariwisata berkelanjutan.

a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Lombok

Tujuan 1: Partisipasi masyarakat lokal dalam membangun destinasi

Strategi:

1. Mengikuti sertakan tokoh masyarakat serta para pendidik formal dan non-formal dalam proses promosi kepariwisataan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tabel 5.10

Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 1

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
A1	Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat local mengenai pariwisata berkelanjutan agar mengerti dan mendukung program “Sadar Wisata yang Berkelanjutan”							
A1.1	Mengadakan <i>workshop</i> kepariwisataan berkelanjutan untuk: 1. forum tokoh masyarakat di Pulau Lombok 2. kalangan para pendidik formal dan non-formal 3. pemangku kepentingan (SKPD terkait)	x	x				Disbudpar Provinsi NTB*, BPBD, Forum Pariwisata Daerah, Forum Pondok Pesantren, sekolah /akademi /universitas pariwisata, Dinas Pendidikan.	Laporan tertulis pelaksanaan workshop Kurikulum mulok (muatan lokal)

	4. pelaku pariwisata							
A1.2	Mengangkat beberapa tokoh masyarakat (<i>public figure</i>), seperti misalnya pemuka agama, pendidik formal dan non-formal, dll sebagai <i>key person</i> pendukung pariwisata	x					Disbudpar Provinsi NTB*	Munculnya <i>key person</i> pendukung kepariwisataan
A1.3	Mencetak <i>leaflet</i> yang ditulis para pemuka agama serta pendidik formal dan non-formal bertemakan kepariwisataan berkelanjutan: konservasi lingkungan alam, konservasi lingkungan budaya, kebersihan, keamanan, dan interaksi dengan wisatawan.	x		x			Disbudpar Provinsi NTB*, Forum Pondok Pesantren, sekolah/akademi/universitas pariwisata, Dibas Pendidikan, BLH Provinsi NTB.	Ter tercataknya <i>leaflet</i> bertemakan kepariwisataan
A1.4	Menyebarkan <i>leaflet</i> bertemakan kepariwisataan berkelanjutan dan Sapta Pesona ke seluruh tempat ibadah dan ssekolah/akademik/universitas di Pulau Lombok.	x	x	x	x	x	Disbudpar Provinsi NTB*, Disbudpar Kabupaten/Kota	Tersebar nya <i>leaflet</i> kepariwisataan di seluruh tempat ibadah dan sekolah/akademi/uiversitas parwisiata di Pulau Lombok
A1.5	Menyebarkan informasi dan praktik-praktik mengenai kepariwistaan berkelanjutan melalui media yang berbeda, seperti misalnya media cetak, media sosial, dll		x	x			BPPD*, Disbudpar Provinsi NTB, Forum Pariwisata Daerah	Terbitnya <i>artikel</i> terkait kepariwisataan berkelanjutan baik di media cetak meupun media sosial
A1.6	Menyelenggarakan forum kajian kepariwisataan bertemakan konservasi alam, konservasi budaya, kebersihan, keamanan dan interaksi dengan wisatawan di lima destinasi wisata, melalui pendekatan	x	x	x	x	x	Dikpora Provinsi NTB*, Forum Pondok Pesantren, sekolah/akademi/universitas pariwisata	Terbentuknya forum kajian bulanan dengan tema pariwisata di empat KSPD se-Pulau Lombok



	agama, budaya dan pendidikan							
A2	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terkait pelaksanaan kajian pariwisata melalui pendekatan agama, budaya dan pendidikan	x	x	x	x	x	Disbudpar Provinsi NTB*, Pokdarwis	Laporan tertulis setiap akhir tahun hasil monitoring pengkajian kepariwisataan di masing-masing destinasi

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Pada dasarnya dalam merumuskan tujuan dan strategi maupun rencana aksi, acapkali berangkat (*starting point*) melalui sejumlah pokok

persoalan yang terjadi dilalapangan dan yang dialami oleh masyarakat

Lombok secara luas. Kebutuhan akan *conclution* tersebut kemudian

memanfaatkan berbagai bentuk strategi dan aksi. Sehingga dengan

demikian, pokok persoalan yang dimaksudkan adalah adanya *multy*

perception yang terjadi di masyarakat didalam memahami pariwisata

berkelanjutan atau destinasi yang berkelanjutan. Selain banyaknya

persepsi, tidak sedikit juga penduduk lokal dan pelaku bisnis disekitar

destinasi yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam

pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diberikannya pemahaman atau persepsi

adalah sebagai langkah awal didalam pembangunan pariwisata

berkelanjutan. Penyeragaman atau soliditas persepsi adalah sangat

pening dilakukan, karena tujuan pariwisata berklelanjutan relative sulit di

capai ketika masyarakat memiliki persepsi masing-masing terhadap

pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan

akan mampu tercapai apabila masyarakat lokal dan pelaku bisnis telah

memiliki kapasitas terhadap pengelolaan destinasi yang berkelanjutan

melalui berbagai aksi-aksi yang telah direncanakan.

Namun, berdasarkan hasil kajian data yang diperoleh melalui Dinas Pariwisata NTB, peneliti tidak dapat menemukan beberapa program yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata NTB yang memiliki kesesuaian dengan rencana aksi yang telah dirumuskan dalam STMP Lombok. Artinya adalah rencana aksi STMP Lombok tidak terakomodir oleh Dinas Pariwisata NTB. Hal demikian dapat dianalisis dengan menyandingkan dua dokumen yang berbeda yakni antara STMP Lombok dan dokumen Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata NTB tahun 2015.

Sebagai contoh, didalam rencana aksi STMP Lombok dalam upaya mencapai tujuan satu (tujuan 1) dirumuskan rencana aksi seperti Mengadakan *workshop* kepariwisataan berkelanjutan untuk: (1) forum tokoh masyarakat di Pulau Lombok, (2) kalangan para pendidik formal dan non-formal, (3) pemangku kepentingan (OPD terkait), (4) pelaku pariwisata. Dijalankan pada tahun 2015 dan 2016 oleh Dinas Pariwisata NTB (sebagai *lead agency*) dengan indikator keberhasilan yakni adanya laporan tertulis pelaksanaan *workshop* kurikulum mulok (muatan lokal).

Akan tetapi hasil analisis dokumen Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata NTB tahun 2015 menunjukkan tidak adanya program yang menyangkut tentang sosialisasi atau lebih spesifik terhadap program pelaksanaan *workshop* kurikulum muatan lokal yang termaktub didalam STMP Lombok. Artinya adalah belum terjalinnnya kontrol ataupun sesuatu yang mampu menjamin terhadap Dinas Pariwisata untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Komitmen terhadap rencana aksi hanya sampai pada penyusunan saja,

tetapi tidak saat implementasi. Selain itu, pendanaan program juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan rencana aksi.

Tujuan 2: Membangun destinasi pariwisata yang unik, bersih, otentik dan berkelanjutan

Strategi:

1. Meneliti dampak lingkungan secara komprehensif (fokus area Gili Trawangan)
2. Membuat dan memberlakukan awig-awig di kawasan pariwisata (fokus area: Senaru, Bayan, dan Sembalun, dan Fili Trawangan, Meno, dan Air)
3. Membangaun sarana dan prasarana parwiisata sekala kecil yang dikelola leh masyarakat setempat (fokus area rute tracking rinjani, Banyumulek, dan sesaot, suranadi)
4. Mengidentifikasi potensi pengembangan wisata maritime
5. Mengembangkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim

Tabel 5.11

Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 2

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
A3	Mengidentifikasi risiko lingkungan dan menciptakan system penanganan risiko dan pelestarian lingkungan seperti habitat, spesies dan ekosistem							
A3.1	Melakukan evaluasi dampak lingkungan di Gili Trawangan bekerjasama dengan peneliti lingkungan, antara lain yang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan iklim 2. emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 3. konservasi energy 4. pengelolaan air, limbah cair dan padat 5. perlindungan ekosistem 6. polusi cahaya dan suara 7. transportasi ramah lingkungan 8. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 9. daya dukung 	x	x				BLH Provinsi NTB*, BLH Kabupaten Lombok Utara	Adanya laporan tertulis oleh ahli lingkungan hidup terkait dampak lingkungan di Gili Trawangan
A3.2	Mengambil langkah-langkah konservasi lingkungan Gili Trawangan sesuai rekomendasi para peneliti, antara lain yang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan iklim 2. emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 3. konservasi energy 4. pengelolaan air, limbah cair dan padat 		x	x	x	x	KLH Kabupaten Lombok Utara*	Kebijakan dan insentif untuk konservasi lingkungan yang berlaku di Gili Trawangan, Meno, dan Air. Program konservasi energy dan pengelolaan air dan limbah. Peningkatan efisiensi energy, adopsi dan penggunaan teknologi energy

	<p>5. perlindungan ekosistem</p> <p>6. polusi cahaya dan suara</p> <p>7. transportasi ramah lingkungan</p> <p>8. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)</p> <p>9. daya dukung</p>					<p>terbarukan, pengolahan air dan limbah.</p>
A4	<p>Penerapan kearifan lokal dalam bentuk aturan adat (awig-awig) sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di destinasi pariwisata, yaitu di Rinjani dan 3 Gili</p>					
A4.1	<p>Merumuskan awig-awig pariwisata Rinjani bersama kelompok masyarakat destinasi (tokoh masyarakat, pelaku usaha pariwisata, pokdarwis, pemerintah desa) Senaru, Bayan, dan Sembalun</p>	x	x			<p>Majelis Adat Sasak*, Disbudpar KLH Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur</p> <p>Tercetaknya awig-awig yang melindungi lingkungan alam dan budaya Rinjani dan sekitarnya dalam sebuah buku</p>
A4.2	<p>Merumuskan awig-awig pariwisata 3 Gili (Trawangan, Meno dan Air) bersama anggota masyarakat dan pengusaha pariwisata Desa Pemenang dan 3 Gili</p>	x	x			<p>Majelis Adat Sasak*, KLH Kabupaten Lombok Utara, Gili Eco Trust, Balai Konservasi Perairan Nasional wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Tercetaknya awig-awig yang melindungi lingkungan Gili Trawangan, Meno dan Air dalam sebuah buku</p>
A4.3	<p>Membentuk kelompok penegak awig-awig pariwisata Rinjani dan awig-awig pariwisata 3 Gili yang anggota dan sistem kerjanya didasarkan pada kesepakatan para tokoh agama dan masyarakat, pokdarwis dan pelaku usaha setempat</p>	x				<p>Majelis Adat Sasak*, Disbudpar Kab. Lombok Utara, Perangkat Desa</p> <p>Terbentuknya kelompok penegak awig-awig lokal Rinjani di Senaru, Bayan, dan Sembalun, dan kelompok penegak awig-awig lokal 3 Gili</p>
A4.4	<p>Membuat papan/prasasti pengumuman awigawig di tempat-tempat strategis di Senaru,</p>	x	x			<p>Disbudpar Provinsi NTB*, BAPPEDA</p> <p>Dibangunnya papan/prasasti pengumuman awig-awig di</p>

	<p>Bayan, Sembalun, gerbang masuk Rinjani, dan di 3 Gili dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak mengganggu keindahan pemandangan di destinasi pariwisata 2. memberikan informasi yang akurat, sesuai dengan budaya lokal, dikembangkan bersama dengan masyarakat lokal, dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengunjung 					tempat-tempat strategis di Senaru, Bayan, Sembalun, sepanjang rute trekking Rinjani, dan 3 Gili
A4.5	<p>Mensosialisasikan awig-awig pariwisata Rinjani dan 3 Gili kepada para pelaku usaha pariwisata di kawasan Rinjani dan 3 Gili</p>	x	x			<p>Disbudpar Provinsi NTB*, ASITA, PHRI, BPPD</p> <p>Seluruh hotel dan tour operators di kawasan Rinjani dan 3 Gili mendapatkan buku awig-awig pariwisata, memahami dan Menerapkannya</p>
A5	<p>Menciptakan produk wisata disertai dengan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wisata maritim di Lombok Barat dan/atau Lombok Timur 2. Desa wisata hijau (Desa Banyumulek dan desa lainnya) 3. teater seni di kawasan Suranadi 	x	x			
A5.1	<p>Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi area yang berpotensi untuk pengembangan wisata maritim sebagai salah satu produk wisata Lombok (community based tourism)</p>		x			<p>Disbudpar Provinsi NTB*, ASITA, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB</p> <p>Wisata maritim mulai ditawarkan oleh tour operator sebagai salah satu paket tur unggulan</p>
A5.2	<p>Membangun teater tempat pertunjukan seni budaya lokal sebagai produk wisata</p>	x	x			<p>Disbudpar Provinsi NTB*, BPPD, ASITA</p> <p>Teater tempat pertunjukan seni budaya lokal</p>

	budaya di kawasan Suranadi							
A5.3	Membentuk sanggar seni pengelola teater, dan memonitor operasional pertunjukan teater	x	x	x	x	x	Disbudpar Provinsi NTB*, ASITA	Pertunjukan rutin seni budaya lokal kepada wisatawan. Laporan tertulis operasional teater per semester.

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Ragam produk pariwisata yang dimiliki Pulau Lombok memiliki potensi terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan. Walaupun demikian, di berbagai destinasi (khususnya di Gili Trawangan) menghadapi pilihan-pilihan yang bersifat dilematis atau sulit terhadap pengalokasian sumber daya termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang dihasilkan dari kemajuan destinasi itu sendiri. Beberapa dampak tersebut diantisipasi melalui rencana aksi dengan point menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, pentingnya pengintegrasian kearifan lokal dan mengajak masyarakat luas untuk beradaptasi dalam perencanaan dan pengelolaan. Selain itu pentingnya dilakukan penelitian dampak lingkungan secara komprehensif terutama di area prioritas Gili Trawangan dengan output hasil penelitian dijadikan acuan dalam merencanakan aksi-aksi yang diupayakan dalam menekan dampak negatif.

Jika melihat pada rencana aksi diatas, terdapat tiga fokus perencanaan yakni berputar pada upaya penekanan dampak negatif dengan melakukan seperti; kajian dampak lingkungan; menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan; dan



mengintegrasikan kearifan lokal. Akan tetapi dari ketiga upaya tersebut, hanya pengintegrasian kearifan lokal yang sejak dulu hingga saat ini masih berlaku didalam aktifitas pariwisata. Maksudnya adalah, kajian dampak lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat secara luas kurang terjalin sebagaimana yang di harapkan pada rencana aksi diatas.

Sedangkan hasil atau wujud dari pengintegrasian kearifan lokal adalah tersedia dan berlakunya *awig-awig* di daerah destinasi Gili Trawangan. *Awig-awig* adalah hukum adat warisan leluhur, atau nilai-nilai masyarakat yang di jaidkan peraturan yang disusun dan diakui eksistensinya secara bersama-sama oleh anggota masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi dan mengeloa sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan 3: Membangun destinasi pariwisata yang aman dan nyaman

Strategi:

1. Membentuk pemwakarsa pariwisata (fokus area Kuta, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gili Gede dan Bnakgo-Bangko)
2. Mencegah praktik seks komersial atau segala macam bentuk eksploitasi dan pelecahan terhadap siapapun, khususnya anak-anak, remaja, wanita, dan minoritas (fokus area Gili Trawangan, Senggigi dan Pantai Kuta)

Tabel 5.12

Rencana Aksi Pembangunan Destinasi Tujuan 3

NO.	Aksi	Rentang Waktu	Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
-----	------	---------------	------------------------	---------------------------------

		2015	2016	2017	2018	2019		
A6	Terciptanya sistem pemantauan, pencegahan dan pelaporan kepada publik dalam menanggapi bahaya akibat kejahatan, keamanan dan kesehatan							
A6.1	Melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan pokdarwis di Kuta, Tanjung Aan, Selong Belanak dan Mawun, Gili Gede dan Bangko-Bangko terkait keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi tersebut.	x					Kepolisian Daerah NTB*, Disbudpar Kabupaten Loteng, perangkat desa, ASITA, PHRI, HPI	Tersedianya konsep keamanan dan keselamatan untuk obyek wisata
A6.2	Bekerja sama dengan kepolisian Daerah NTB dan masyarakat destinasi membentuk pamswakarsa pariwisata yang beranggotakan masyarakat dan pokdarwis di Pantai Kuta, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gili Gede dan Banko-Bangko	x					Kepolisian Daerah NTB*, Disbudpar Kabupaten Loteng, perangkat desa, ASITA, PHRI, HPI	Terbentuknya kelompok pamswakarsa pariwisata dengan sistem kerja yang terkoordinasi dengan pihak kepolisian
A6.3	Memberikan pelatihan kepada para anggota Pamswakarsa pariwisata tentang cara menjaga keamanan di tempat masing-masing	x	x				Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat*	Anggota-anggota pamswakarsa pariwisata memiliki sertifikat pelatihan dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan
A6.4	Memberikan pelatihan kepada para anggota pamswakarsa pariwisata tentang cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan wisatawan di darat maupun laut	x					Dispar Kabupaten Loteng*, Puskesmas setempat, Kepolisian, perangkat desa	Terlaksananya pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi wisatawan di darat maupun laut
A6.5	Membangun pos-pos pamswakarsa pariwisata di obyek wisata Pantai Kuta,	x	x	x			Disbudpar Prov. NTB*, BUMD (CSR)	Terbangunnya pos pengamanan pariwisata di wisata Pantai Kuta,

	Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gili Gede dan Banko-Bangko						Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gili Gede dan Banko-Bangko
A7	Membangun sarana prasarana dan fasilitas serta penerapan praktik-praktik terkait dengan aspek kesehatan, sanitasi dan keselamatan di destinasi wisata						
A7.1	Membangun toilet untuk wisatawan di Desa Banyumulek dan Desa Sesaot Suranadi yang dikelola oleh anggota pokdarwis setempat	x				Dinas PU Kab. Lombok Barat*, Disbudpar Kab. Lombok Barat dan perangkat desa Banyumulek dan Sesaot	Terbangunnya toilet untuk para wisatawan di Banyumulek dan Sesaot. Setiap toilet memiliki penanggung jawab dalam hal pengelolaan.
A7.2	Mengajarkan pokdarwis Banyumulek dan Sesaot Suranadi manajemen "tea and pee" untuk pengelolaan toilet di kawasan pariwisata	x	x			Disbudpar Kab. Lombok Barat*	Beroperasinya toilet umum yang dikelola masyarakat setempat di Banyumulek dan Sesaot dengan prinsip "tea and pee"
A7.3	Membangun toilet umum untuk wisatawan di sekitar Danau Segara Anak Rinjani yang dikelola oleh persatuan masyarakat Senaru, Bayan, dan Sembalun		x			Disbudpar Prov. NTB*, Disbudpar Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, DMO Rinjani	Terbangunnya toilet untuk para wisatawan di sekitar Danau Segara Anak. Setiap toilet memiliki penanggung jawab.
A7.4	Membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik seks komersial atau segala macam bentuk eksploitasi dan pelecehan terhadap siapapun, khususnya anak-anak, remaja, wanita, dan minoritas			x	x	BP3AKB*, Disbudpar Prov. NTB, GIZ	1. Peraturan dan program untuk mencegah praktik seks komersial atau segala macam bentuk eksploitasi, diskriminasi atau pelecehan terhadap penduduk atau pengunjung. 2. Peraturan dan program dikomunikasikan kepada masyarakat umum.

A7.5	Meningkatkan pelayanan Puskesmas di lokasi terdekat dengan objek wisata agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada wisatawan			x				DiKes Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB	Beroperasionalnya Puskesmas dengan pelayanan yang lebih memadai
A8	Pengelolaan sampah di destinasi wisata								
A8.1	Melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat lokal dan pengunjung mengenai perlunya mengelola sampah dengan baik dan benar: 1. Prinsip 3R: Reuse, Reduce, Recycle 2. Membuang sampah pada tempatnya 3. Mengumpulkan dan memilah sampah berdasarkan jenisnya	x	x	x	x	x		BLH Prov.NTB*, Disbudpar NTB	Masyarakat mulai melakukan praktik 3R dan pengelolaan sampah lainnya
A8.2	Membentuk bank sampah (waste bank) di Senggigi, Banyumulek, Senaru, dan Sembalun	x	x	x	x	x		Disbudpar Prov. NTB*, Disbudpar Kabupaten / Kota	Terbentuknya bank sampah di empat desa wisata utama. Terdapat sistem pengelolaan sampah yang berprinsip 3R pada keempat desa wisata utama
A8.3	Memonitor pengelolaan sampah di empat destinasi wisata utama (Senggigi, Kuta, Gili Trawangan dan kawasan Rinjani)	x	x	x	x	x		Disbudpar Prov. NTB*, Disbudpar Kabupaten / Kota	Laporan monitoring pengelolaan sampah di empat desa wisata utama
A8.4	Membagikan masing-masing seratus bak sampah kepada masyarakat di Banyumulek dan Sesaot Suranadi	x	x	x	x	x		Disbudpar Kabupaten Lombok Barat*, ASITA, PHRI, BUMD	Tersedianya bak-bak sampah yang cukup di Banyumulek dan Sesaot. Terbentuknya sistem pengelolaan sampah oleh masyarakat Banyumulek dan Sesaot dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
A8.5	Memantau pengelolaan toilet umum dan sampah di Banyumulek dan Sesaot	x	x	x	x	x		Disbudpar Kabupaten Lombok Barat*	Laporan tertulis tentang pengelolaan WC umum dan sampah

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Untuk menjamin terselenggaranya atau tercapainya kesuksesan maupun kegagalan kegiatan perekonomian pada sebuah destinasi pariwisata adalah sangat bergantung pada keamanan dan keselamatan lingkungan kawasan destinasi. Keamanan dan keselamatan adalah seharusnya menjadi jaminan kepuasan wisatawan yang sifatnya utama, karena beberapa permasalahan kriminalisasi menjadi faktor dalam menentukan citra pariwisata. Misalnya salah satu kasus kriminalisasi yang dimuat oleh media online "HarianNusa.com – Coreng Pariwisata, Wisatawan Asing Kembali Dibegal di Kuta" tanggal 19 september 2017 yang kemudian menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten setempat harus memainkan peran yang aktif didalam penjaminan keamanan wisatawan.

Tidak hanya keamanan didalam konteks kriminalisasi, tetapi juga keamanan dan keselamatan yang harus diatasi terkait dengan pengelolaan risiko bencana dengan mentaati peraturan yang telah tersedia. Jika peraturan yang telah ada mampu untuk diikuti secara bersama maka ini akan menjadi pengurangan risiko bencana, sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kondisi yang kondusif bagi iklim investasi dan konsumsi produk-produk wisata.

Mengenai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, beberapa destinasi memiliki problematika yang khas. Misalnya, Gili Trawangan dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan polusi udara yang rendah akan tetapi memiliki tingkat eksploitasi lingkungan dan pencemaran limbah dengan persentase yang tinggi. Peneliti telah melakukan observasi

lapangan dengan menyandingkan dan membandingkan rencana aksi yang telah disusun pada STMP Lombok dengan realitas lapangan yang ada.

Sehingga hasil temuannya adalah terdapat beberapa rencana aksi yang telah terimplementasi dan sebagian rencana aksi masih belum dapat berjalan karena beberapa rencana aksi baru diimplementasikan di tahun-tahun berikutnya.

Pengelolaan sampah atau limbah di Gili Trawangan misalnya, yang menggunakan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Secara umum, masyarakat luas Gili Terawangan memahami pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah, akan tetapi pemahaman tersebut hanya sebatas atensi. Aksi dalam menjalankan pendekatan tersebut belum berjalan secara utuh dan masih sebatas mengumpulkan limbah. Sedangkan *recycle* (mendaur ulang) belum di temukan peneliti hingga kegiatan observasi berakhir.

b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Lombok

Tujuan 4: Meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan

Strategi:

1. Pemasaran terpadu (antara sektor pemerintah dan swasta) dengan strategi yang menggunakan pendekatan terstandarisasi
2. Menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan dari pasar pariwisata yang paling menjanjikan.

Tabel 5.13

Rencana Aksi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Tujuan 4

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
B1	Pemasaran terpadu (antara pemerintah dan swasta) dengan strategi yang menggunakan pendekatan terstandarisasi							
B1.1	Membuat <i>official website</i> kepariwisataan Pulau Lombok yang komprehensif dan kredibel	x	x				BPPD*, Disbudpar Provinsi NTB	Tersedianya dan beroperasinya <i>website</i> kepariwisataan Lombok yang komprehensif, professional dan <i>up to date</i>
B1.2	Meletakkan materi promosi berupa brosur dan majalah pariwisata di tempat-tempat strategis		x		x		BPPD*, Disbudpar Prov. NTB	Tersedianya bahan promosi yang <i>up to date</i> di bandara, pelabuhan, kantor imigrasi
B1.3	Menginisiasi pelaksanaan Lombok Travel-Mart pada Bulan Februari setiap 2 tahun sekali		x		x		BPPD*, ASITA, PHRI	Terselenggaranya acara 2 tahunan Lombok Travel-Mart setiap bulan Februari di Lombok (tahun 2016 & 2018)
B1.4	Mengirim perwakilan BPPD ke acara tahunan Pasar Wisata Jakarta	x	x	x	x	x	BPPD	Hadirnya perwakilan anggota BPPD di acara tahunan pasar wisata Jakarta.
B1.5	Mengirim perwakilan BPPD ke acara tahunan ATF (Asean Travel Forum)	x	x	x	x	x	BPPD	Hadirnya perwakilan anggota BPPD di acara tahunan ATF
B1.6	Mengirim perwakilan BPPD ke gelaran tahunan ITB Berlin	x	x	x	x	x	BPPD	Hadirnya perwakilan BPPD di gelaran tahunan ITB Berlin
B1.7	Membuka rute penerbangan baru (langsung) dari beberapa kota baik domestik dan internasional	x	x				Wakil Gubernur Prov. NTB	Dibukanya rute penerbangan baru domestik dan internasional

B1.8	Mengundang para publik figur dunia untuk menjadi duta pariwisata Pulau Lombok			x	x	x	Disbudpar Prov. NTB*, BPPD	Kunjungan para publik figur dunia ke Lombok sebagai duta wisata
B1.9	Membuat "Green" brand image (logo) kepariwisataan Pulau Lombok sebagai simbol aktivitas kepariwisataan yang terpadu	x	x				Disbudpar Prov. NTB*, BPPD	Terciptanya "Green" brand image (logo) kepariwisataan Pulau Lombok
B1.10	Sosialisasi brand image pariwisata Pulau Lombok ke seluruh hotel dan tour operator di Lombok	x	x				BPPD	Logo kepariwisataan Pulau Lombok dipakai dalam setiap promosi pariwisata
B1.11	Membangun kerjasama dengan VITO (Visit Indonesia Tourism Officer) yang berada di negara-negara leading market pariwisata Lombok	x	x	x	x	x	BPPD	Materi Promosi Lombok berada di VITO Amerika Serikat, Eropa, Singapura, Malaysia, Australia
B1.12	Memasang baliho wisata Lombok di bandara internasional yang menjadi pintu masuk utama ke Indonesia, seperti di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Ngurah Rai, Bali		x				BPPD	Tersedianya bahan promosi pariwisata berupa baliho di Bandara internasional yang merupakan pintu masuk utama seperti Ngurah Rai dan Soekarno Hatta
B1.13	Memasang iklan pariwisata Lombok di jaringan televisi internasional					x	BPPD	Ditayangkannya iklan pariwisata mengenai Lombok di jaringan televisi internasional
B2	Menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan dari pasar pariwisata yang paling menjanjika							
B2.1	Membuat database yang berisi seluruh data kepariwisataan yang ada di Lombok	x	x	x	x	x	Pusat Data Daerah Bale Ite	Tersedianya data kepariwisataan Lombok secara lengkap dan up to date

B2.2	Membuat penelitian pariwisata terkait pengembangan produk wisata yang kreatif dan berkelanjutan, dan segmentasi pasar wisata Pulau Lombok	x		x		x	Disperindag Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB, BPPD, Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat rekomendasi dan petunjuk tentang strategi pengembangan produk wisata yang kreatif dan berkelanjutan. 2. Terdapat laporan tentang posisi pasar wisata Lombok di pasar nasional dan internasional. 3. Terdapat rekomendasi dan petunjuk tentang strategi menentukan dan meningkatkan segmen pasar pariwisata Lombok.
B2.3	Mengadakan survei kepuasan wisatawan	x	x	x	x	x	Disudpar Prov. NTB*, GIZ, PHRI	Laporan tahunan mengenai hasil survei kepuasan wisatawan
B3	Menyusun peraturan gubernur terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi Pariwisata 2. Investasi Pariwisata 	x					Disbudpar NTB, BAPPEDA	Terbentuknya Peraturan Gubernur mengenai Promosi dan Investasi Pariwisata yang berkelanjutan

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Disusunnya berbagai rencana aksi yang meliputi kolaborasi pemerintah dengan swasta dan rancangan aksi yang meliputi pemasaran yang mampu mengakomodir kepentingan pasar pariwisata adalah beberapa upaya dalam memberikan konklusi berbagai persoalan di dalam melakukan aktivitas promosi pariwisata berkelanjutan. Akan tetapi hingga rencana aksi ini tersusun, peneliti tidak menemukan kesesuaian antara program yang dijalankan Dikbudpar dengan rencana aksi yang telah ditetapkan di tahun yang sama.

Melihat beberapa rencana aksi pada STMP Lombok tersebut, salah satu contohnya yakni terdapat rencana aksi tentang penyusunan peraturan gubernur mengenai promosi pariwisata dan investasi pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan lead agency Dikbudpar Provinsi NTB. Namun jika disandingkan dan dianalisis antara STMP Lombok dengan dokumen Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB tahun 2015, maka hasilnya adalah tidak terakomodirnya rencana aksi di dalam program yang dijalankan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB. Hal demikian dibuktikan melalui peninjauan program Dikbudpar yang hanya memuat program pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dengan indikator terpenuhinya jumlah publikasi promosi di media cetak dan elektronik. Tentunya tidak terakomodirnya rencana aksi tersebut berdampak pada tidak terstrukturinya kegiatan promosi dan secara bersamaan mencerminkan bahwa pemahaman promosi hanya sebatas publikasi produk unggulan pariwisata.

Berikut di tampilkan beberapa program yang dijalankan Dikbudpar pada tahun 2016, sehingga dapat mempermudah analisis terhadap beberapa program yang telah tersinkronisasi dan bias yang terjadi antar dokumen:

Tabel 5.14

Program Pengembangan Kepariwisata NTB

Program Pengembangan Kepariwisata		Ket
1	Pengembangan Pasar Asia Tenggara	
a.	<i>Promosi Mobile Branding</i>	1 thn
b.	<i>Sales Mission Malaysia- MATTA</i>	1 pkt

2		Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika	
	a.	<i>Pendukung Dalam Rangka Hari Pers Nasional</i>	1 pkt
	b.	<i>Perjalanan Luar Negeri</i>	1 thn
	c.	<i>Administrasi Sekretariat</i>	1 thn
3		Pengembangan Komunikasi Pemasaran Nusantara	
	a.	<i>Pembuatan Video Pariwisata</i>	1 pkt
	b.	<i>Penggandaan Media Promosi</i>	1 thn
	c.	<i>Dukungan Festival Tambora</i>	1 pkt
4		Pengembangan Segmen Pasar Personal	
	a.	Pembuatan Video Pariwisata di Bus Trans-Jakarta	1 pkt
	b.	Kalender	1 pkt
	c.	Dokumentasi	1 thn

Sumber: Dikbudpar NTB 2016

c. Pembangunan Kelembagaan dan SDM Pariwisata Lombok

Tujuan 5: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh SDM pekerja pariwisata yang professional

Strategi:

1. Pemberian kursus, pelatihan, dan sertifikasi khususnya untuk pemandu wisata, anggota, pokdarwis, tenaga kerja pariwisata dan siswa SMK pariwisata

Tabel 5.15

Rencana Aksi Pembangunan Kelembagaan dan SDM Tujuan 5

NO.	Aksi	Rentang Waktu	Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
-----	------	---------------	------------------------	---------------------------------

		2015	2016	2017	2018	2019		
C1	Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas untuk tenaga kerja pariwisata secara berkala mengenai peran dan tanggung jawab mereka sehubungan dengan isu lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kualitas, kesehatan dan keselamatan							
C1.1	Menyelenggarakan training needs assessment untuk tenaga kerja pariwisata (termasuk pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan)	x					Disbudpar Provinsi NTB*, ASITA, HPI, GIZ	Tersedianya laporan mengenai pelatihan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja pariwisata
C1.2	Menyelenggarakan kursus pramuwisata untuk pramuwisata muda dan madya berlisensi setiap tahun	x	x	x	x	x	Disbudpar Provinsi NTB*, ASITA, HPI	Bertambahnya jumlah pramuwisata yang berlisensi baik pramuwisata muda maupun madya di Pulau Lombok. Setiap destinasi wisata memiliki pramuwisata lokal yang berlisensi.
C1.3	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan pariwisata kepada para anggota pokdarwis dan masyarakat yang tinggal di destinasi.		x	x			Disbudpar Prov. NTB* , Dinas Koperasi, PLUT, GIZ	Munculnya usaha-usaha kecil pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat setempat
C1.4	Memberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan pariwisata kepada siswa SMK jurusan pariwisata dan siswa SMA pariwisata		x		x		Dikpora Kabupaten/Kota	Terbina dan terlatihnya calon tenaga pariwisata
C2	Membentuk lembaga sertifikasi tenaga kerja pariwisata Lombok							
C2.1	Membentuk lembaga sertifikasi tenaga kerja pariwisata di Lombok (hotel dan			x	x		Disnaker Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB, ASITA, PHRI, HPI	Tersedianya lembaga sertifikasi tenaga kerja pariwisata di

	tour operators)						Lombok (hotel dan tour operator)
C2.2	Mensosialisasikan lembaga sertifikasi tenaga kerja pariwisata Lombok (hotel dan tour operators)				x	Lembaga Sertifikasi*, Disnaker Prov. NTB, ASITA, HPI, PHRI	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata di Pulau Lombok yang tersertifikasi

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Kesuksesan sebuah destinasi pariwisata sengatlah dipengaruhi oleh aspek kualitas petualangan, pengalaman, budaya dan *ecotourism* yang telah dijanjikan. Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pariwisata haruslah didukung oleh pelayanan yang baik dan berkualitas, serta merepresentasikan budaya dan keramah tamahan masyarakat lokal. Kualitas pelayanan yang diberikan menjadi pemicu ketertarikan pasar. Sehingga untuk memastika hal tersebut perlunya dilakukan sertifikasi dan peningkatan kapasitas pemandu pariwisata melalui proses akademin maupun pelatihan-pelatihan.

Untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, berbagai level pemandu pariwisata selain memiliki kemampuan terhadap pemberian pelayanan yang berkualitas, juga dituntut untuk menguasai konsep pariwisata berkelanjutan. Menganalisis rencana aksi tersebut, rencana aksi lebih ditekankan pada sertifikasi tenaga pariwisata atau proses sertifikasi pariwisata, sedangkan pemberian edukasi terhadap pentingnya menyelenggarakan pariwisata berkelanjutan hanya dilakukan pada tahun 2015 dan tidak bersifat kontinuitas.

Tujuan 6: Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh publik berwawasan lingkungan

Strategi:



1. Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan destinasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata lainnya dan bisnins pariwisata (*hotel and operators*).

Tabel 5.16

Rencana Aksi Pembangunan Kelembagaan dan SDM Tujuan 6

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
C3	Membentuk Forum Pariwisata Daerah yang keanggotaannya terdiri dari pemangku kepentingan inti pariwisata Lombok: Lembaga pemerintah: Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan & LH, Koperasi & UKM, Disperindag, Dinas Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Kepolisian, Imigrasi, Unsur Pem-Kab/Pem-Kot, Taman Nasional Gunung Rinjani, BKSDA Industri: ASITA, PHRI, BPPD, HPI, INCCA, KADIN Masyarakat /NGOs: Forum Pondok Pesantren, Majelis Adat Sasak, PHDI, WWF, Gili Eco Trust, DMO Rinjani Institusi Pendidikan: UNRAM, AKPAR, STPN Lombok, Pusat Studi Pariwisata, Akademi Komunitas, SMK Pariwisata							
C3.1	Membuat Peraturan Gubernur yang berisi tata cara pembentukan	x					Disbudpar Provinsi NTB*, Biro Hukum	Tersedianya Peraturan Gubernur mengenai tata cara

	Forum Pariwisata Daerah dilengkapi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Forum Pariwisata Daerah						Setda NTB, Universitas	pembentukan Forum Pariwisata Daerah
C3.2	Membagi tugas Forum Pariwisata Daerah berdasarkan 4 pilar pembangunan pariwisata yakni: Pengembangan, Destinasi, Pemasaran, Industri, dan Kelembagaan	x					Disbudpar Provinsi NTB*, Forum Pariwisata Daerah	Terbentuknya unit kerja dan rencana kerja tahunan dari forum pariwisata daerah
C3.3	Monitoring pelaksanaan tugas Forum Pariwisata Daerah	x	x	x	x	x	Disbudpar Provinsi NTB*	Rapat berkala Forum Pariwisata Daerah dan laporan tahunan kepada Gubernur Prov. NTB terkait kinerja Forum Pariwisata Daerah Lombok
C4	Pelatihan tentang kepariwisataan berkelanjutan untuk asosiasi pariwisata seperti PHRI, ASITA dan HPI	x	x	x			Disbudpar Provinsi NTB*, BAPPEDA, GIZ, BPPD, Forum Pariwisata Daerah	Meningkatnya pengusaha hotel, tour operators dan pemandu wisata yang mulai menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan
C5				x			Disbudpar Prov. NTB, GIZ	Terbentuknya LBPB yang terbuka bagi pelaku bisnis pariwisata yang telah mengadopsi praktik-praktik pariwisata berkelanjutan

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Untuk menjamin terselenggaranya pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang, peran pemangku kepentingan secara luas baik di lingkup nasional maupun lokal harus sangat dibutuhkan. Kebutuhan kolaborasi pemangku kepentingan haruslah terjalin secara baik. Untuk mencapai hal demikian, pemerintah, dalam hal ini, khususnya Dinas Pariwisata NTB haruslah menjadi garda terdepan dalam memimpin stakeholder lainnya. Memberi arahan dan koordinasi secara bersama-sama dengan dinas-

dinas lainnya, pihak swasta maupun akademisi. Tanpa supporting seluruh pemangku kepentingan, mustahil pariwisata berkelanjutan dapat dicapai.

Forum Kepariwisataan Daerah (FKD) adalah forum pemersatu segala jenis pemangku kepentingan dengan komposisi yang mencakup akademisi, *Destination Management Organization* (DMO), bisnis pariwisata dan intitusi pemerintah. FKD memainkan peran yang mendasar, menyeluruh dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan membangun dan membina kerjasama, dinamika pariwisata akan mampu teratasi secara lebih efektif dan secara parallel menyediakan ruang partisipasi masyarakat.

Namun, dibentuknya FKD tersebut jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas terhadap pentingnya atensi terhadap perekonomian lokal, ekologi, sosial dan budaya hanya akan menjadi harapan-harapan pariwisata berkelanjutan belaka. Untuk itu, bagi para pelaku usaha melalui FKD diharapkan akan secara totalitas memahami bahwa pentingnya bersama-sama terhadap komitmen peningkatan perhatian akan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dalam menjalankan usaha pariwisata.

Secara umum, rencana aksi dalam konteks institusi pariwisata sebagian kecilnya tercapai dengan adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisataan Daerah sebagai wujud dari pengaplikasian rencana aksi C3.1 yakni Membuat Peraturan Gubernur yang berisi tata cara pembentukan Forum Pariwisata Daerah dilengkapi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Forum Pariwisata Daerah.

d. Pembangunan Industri Pariwisata Lombok

Tujuan 7: Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif agar industry pariwisata dapat menciptakan produk/jasa yang kreatif dan inovatif

Strategi:

1. Pengembangan produk lokal yang berkelanjutan dan perdagangan yang adil (*fair trade*)
2. Memberikan akses keuangan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha kecil mandiri di industry souvenir dan kuliner (fokus area Senaru, Sembalun, dan Sesaot)
3. Menghubungkan kelompok produk lokal dengan bisnins pariwisata (fokus area Sembalun dan Mataram)
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pariwisata dikalangan masyarakat destinasi

Tabel 5.17

Rencana Aksi Pembangunan Industri Pariwisata Tujuan 7

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
D1	Mendukung masyarakat lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mempromosikan dan Mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan (suvenir, pertunjukan kesenian, produk pertanian, dll) dan prinsip perdagangan yang adil berdasarkan alam dan budaya setempat							

D1.1	Melakukan dialog dengan pengusaha produk lokal di Banyumulek, Sukarara, dan Sekarbela	x				Disbudpar Kabupaten Loteng, Lobar dan Kota Mataram*, Forum PEL	Terbentuknya konsep pengembangan produk lokal yang berkelanjutan bagi pengusaha	
D1.2	Membentuk kelompok pengusaha produk lokal di Banyumulek, Sukarara dan Sekarbela	x				Disperindag Kab. Loteng, Lobar dan Kota Mataram*, Forum Klaster	Munculnya kelompok pengusaha souvenir di Banyumulek, Sukarara, dan Sekarbela	
D1.3	Memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha pariwisata bagi pengusaha produk lokal serta melaksanakan studi banding ke Bali, Yogyakarta dan Bandung	x	x		x	Disbudpar Kab. Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur*	Munculnya UKM souvenir dan kuliner di Senaru, Sembalun, dan Sesaot. BAPPEDA Kab. Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur, Disperindag Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur Laporan Studi banding kreatif ke Bali, Yogyakarta dan Bandung.	
D1.4	Mengembangkan standar produk lokal, termasuk produk pertanian, yang sesuai dengan kebutuhan usaha pariwisata	x	x			Dinas Pertanian Prov. NTB*, PHRI, GIZ, Kelompok Tani dan pemasok	Digunakannya panduan standar produk pertanian oleh petani dan pemasok untuk memenuhi kebutuhan usaha pariwisata	
D1.5	Memperkuat dan mengoptimalkan peran inkubator bisnis dalam menciptakan wirausaha baru di sektor pariwisata	x	x	x		Dinas Koperasi Prov. NTB*, UNRAM, PLUT, GIZ	Bertambahnya jumlah dan jenis usaha pariwisata di Lombok	
D1.6	Membuat kode etik usaha yang berlaku antara para pengusaha produk lokal serta membentuk tim penegak kode etik usaha		x			Disperindag Kab. Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram*, Forum Klaster, HPI	Terciptanya kode etik usaha souvenir di Banyumulek, Sukarara, dan Sekarbela	
D1.7	Membentuk tim penegak kode etik usaha bagi para pengusaha produk lokal		x			Disperindag Kab. Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram*, Forum Klaster, HPI	Terbentuknya tim penegak kode etik usaha pariwisata di ketiga destinasi di atas	
D1.8	Memonitor pelaksanaan kode etik usaha pariwisata dimasingmasing		x	x	x	x	Disbudpar Kabupaten dan Kota	Laporan tertulis pelaksanaan kode etik usaha souvenir di Banyumulek,

	destinasi					Sukarara, dan Sekarbela
D2	Menyusun Peraturan Gubernur mengenai produk lokal berkelanjutan yang mendukung pariwisata	x			Disbudpar NTB, BAPPEDA	Terbentuknya Peraturan Gubernur tentang produk pariwisata berkelanjutan
D3	Implementasi kerjasama sustainable finance					
D3.1	Membentuk MOU antara Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. NTB dengan Bank NTB terkait sustainable finance	x			Disbudpar Prov. NTB, Disperindag Kab. / Kota, Bank NTB	Dokumentasi MOU antara Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. NTB dengan Bank NTB
D3.1	Pelatihan mengenai sustainable finance	x			Bank NTB*, GIZ	Terselenggaranya pelatihan sustainable finance dua kali setahun
D3.2	Membuat skema sustainable finance bagi pengusaha lokal	x			Bank NTB	Tersedianya berbagai jenis kredit usaha yang diberikan oleh Bank NTB kepada para pengusaha lokal

Sumber: STMP Lombok 2015-2019

Pengembangan produk berkelanjutan (*green product*) dan menghubungkan produk lokal dengan kegiatan pariwisata adalah bentuk strategi yang mengupayakan distribusi kebermanfaatannya ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan memberikan dampak positif pariwisata bagi perekonomian masyarakat lokal adalah pengaplikasian dari sayarat dan indikator dalam mencapai pemabngunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pada rencana aksi ini, berbagai langkah dilakukan dalam optimalisasi peluang usaha lokal berbasis masyarakat yang akan memberikan keterlibatan yang otentik dan pengalaman yang lebih memuaskan untuk wisatawan yang mencari pengalaman interaksi dengan

masyarakat setempat. Selain itu, rencana aksi ini mengupayakan untuk berbagai langkah dalam mendorong penjualan produk lokal demi terciptanya keberpihakan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Tidak sampai disitu, persoalan selanjutnya yang menjadi tantangan dalam persaingan usaha berbasis masyarakat lokal adalah persaingan *brand* (merk). Maka untuk mengatasi isu pemasaran produk lokal diterapkan kebijakan *brand* yang bertemakan lokal. Dengan penggunaan *brand* lokal adalah bentuk dari representatif produk lokal yang otentik.

Mengacu pada rencana aksi diatas, khushs pada rencana aksi D1.3 dengan maksud memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha pariwisata bagi pengusaha produk lokal serta melaksanakan studi banding ke Bali, Yokyakarta dan Bandung di tahun 2015, 2017, dan 2019 dengan indikator keberhasilan munculnya UKM souvenir dan kuliner di Senaru, Sembalun, dan Sesaut adalah rencana aksi yang telah terimplementasi dengan baik.

Hasil observasi menunjukkan terdapatnya UMKM kuliner di salah satu destinasi sesaut di Kabupaten Lombok barat. Kuliner lokal dengan nama Sate Bulayak adalah makanan khas daerah setempat telah mampu menjangkau kegiatan pariwisata dengan fasilitas dan insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat secara bertahap. Produk lokal yang menjangkau kegiatan pariwisata adalah bentuk nyata dari rencana aksi yang menghubungkan produk lekal dengan pariwisata.

Akan tetapi pada destinasi Sesot baru tersedia produk kuliner saja, sedangkan produk lokal souvenir hingga saat ini belum tersedia. Hal

demikian dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisatawan lokal yang kurang memiliki ketertarikan terhadap suvenir lokal dan proses implementasi rencana aksi yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, *brand image* UMKM telah menggunakan *brand* lokal seperti pada foto dokumentasi berikut:

Gambar 5.5

Gambar UMKM Kuliner Pariwisata di Destinasi Sesaoet



Sumber: diambil sendiri pada tanggal 11 Januari 2018

Hasil wawancara peneliti dengan informan sekaligus sebagai salah satu pedangan kuliner lokal, juga menunjukkan bahwa beberapa fasilitas UMKM telah dan akan disediakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa ruangan tempat berjualan dan gerobak jualan.

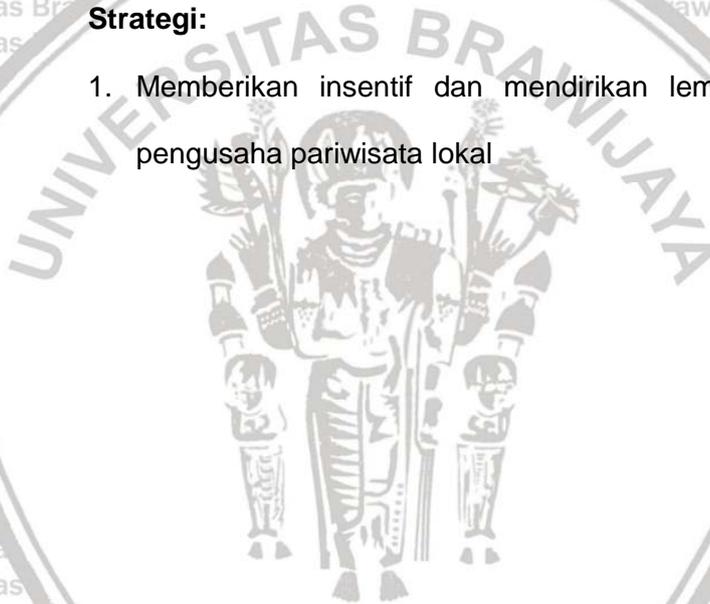
“.....kita dapat dari pemerintah, semua yang pernah jualan disini dapat rombongan (gerobak) dan tempat berjualan. Syaratnya Cuma KTP dan KK. Besok akan di perbaiki lagi, ditambahkan atap dari dinas melalui desa. Alhamdulillah sejak ada perbaikan sekarang jadi ramai, penghasilan juga nambah” (Ibu JN).

Adapun syarat untuk memperoleh fasilitas tersebut adalah dengan kriteria lama berjualan, keluarga kurang mampu dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dengan syarat tersebut masyarakat lokal dapat menerima fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan 8: Mewujudkan lingkungan usaha yang berorientasi pada prinsip kepariwisataan hijau dan usaha pariwisata berkelanjutan

Strategi:

1. Memberikan insentif dan mendirikan lembaga sertifikasi untuk pengusaha pariwisata lokal



Tabel 5.18

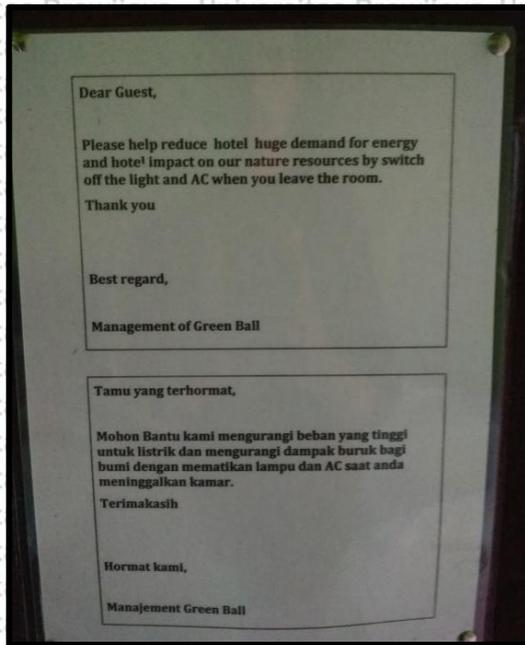
Rencana Aksi Pembangunan Industri Pariwisata Tujuan 8

NO.	Aksi	Rentang Waktu					Badan Penanggung Jawab	Indikator Kinerja/ Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
D4	Mereplikasi program efisiensi sumber daya dalam bisnis pariwisata (Hotel & Tour Operators)							
D4.1	Membuat buku panduan mengenai program penghematan sumber daya bagi hotel & tour operators	x					BLH Prov. NTB*, PHRI, ASITA, GIZ	Tersedianya buku panduan mengenai Penghematan sumber daya bagi hotel & tour operators
D4.2	Mempromosikan program penghematan sumber daya kepada anggota asosiasi pariwisata (hotel & tour operators)	x					Disbudpar Prov. NTB*, PHRI, ASITA	Bertambahnya jumlah anggota asosiasi yang menerapkan praktik-praktik penghematan sumber daya
D4.3	Memberikan insentif kepada anggota asosiasi pariwisata (hotel & tour operators) yang berhasil menerapkan program penghematan sumber daya secara berkelanjutan			x	x	x	Disbudpar Prov. NTB*, PHRI, ASITA	Munculnya anggota asosiasi pariwisata unggul dalam menerapkan program penghematan sumber daya
D5	Standarisasi dan sertifikasi usaha wisata berkelanjutan sesuai prinsip GSTC							
D5.1	Mengembangkan standarisasi usaha wisata berkelanjutan sesuai prinsip GSTC	x					BLH Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB, PHRI, ASITA, GIZ	Terbentuknya standar usaha pariwisata berkelanjutan bagi hotel & tour operators
D5.2	Mensosialisasikan standar usaha wisata berkelanjutan kepada anggota asosiasi pariwisata	x					BLH Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB, PHRI, ASITA, GIZ	Muncul dan bertambahnya jumlah usaha wisata yang menerapkan praktik



							usaha wisata berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	
D5.3	Memberikan sertifikasi bagi usaha wisata berkelanjutan yang telah menerapkan standar yang berlaku			x	x	x	BLH Prov. NTB*, Disbudpar Prov. NTB, PHRI, ASITA	Munculnya dan bertambahnya usaha wisata berkelanjutan yang tersertifikasi
D6	Membuka peluang kerja di bidang pariwisata untuk masyarakat lokal, termasuk kesempatan kerja yang sama, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, keselamatan kerja dan upah kerja yang adil untuk semua						Disnaker Prov. NTB*, PHRI, LHA, ASITA, HPI	Kebijakan yang mendukung persamaan kesempatan kerja bagi semua pihak, termasuk wanita, kaum muda, orang berkebutuhan khusus, minoritas dan lainnya. Program pelatihan yang menyediakan akses yang sama bagi semua pihak termasuk wanita, kaum muda, kaum muda, orang berkebutuhan khusus, minoritas dan lainnya. Kebijakan yang mendukung keselamatan kerja bagi semua. Kebijakan yang mendukung upah kerja yang adil bagi semua pihak, termasuk wanita, kaum muda, orang berkebutuhan khusus, minoritas dan lainnya.
D7	Menciptakan program dukungan untuk masyarakat oleh perusahaan dan wisatawan untuk berkontribusi kepada masyarakat setempat dengan inisiatif yang berkelanjutan						Disbudpar Prov. NTB*, PHRI, LHA, ASITA, Pokdarwis	Program bagi perusahaan dan wisatawan untuk berkontribusi/berdonasi kepada masyarakat setempat dan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan/atau pengembangan infrastruktur





Sumber: diambil sendiri di hotel Green Ball Trawangan pada tanggal 26 November 2017

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di NTB

Mengingat penelitian ini berfokus pada proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lombok (NTB), maka pada

prosesnya tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagaimana yang akan maupun telah direncanakan. Artinya bahwa pada prosesnya, berbagai faktor sumber daya dapat dimanfaatkan didalam maksimalkan prosesnya atau menjadi faktor pendukung, tetapi disisi lain terdapat juga berbagai faktor penghambat didalam proses perencanaan yang harus mampu di minimalisir dengan upaya-upaya yang professional.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini dihasilkan atau diketahui melalui proses analisis SWOT. Namun tidak sepenuhnya melaksanakan kaidah-kaidah atau ketentuan SWOT. Sehingga, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari pembangunan pariwisata berkelanjutan Lombok diperoleh melalui wawancara dengan informan. Menganalisis hasil wawancara sebagai proses dalam pengklasifikasian berbagai variable dalam SWOT.

Memanfaatkan proses wawancara untuk SWOT oleh peneliti dirasa lebih mampu mendekati kepada sifat naturalnya suatu jawaban informan. Selain itu, digunakannya teknik tersebut karena berdasarkan pada teknik analisis data yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya. Dalam memperoleh beberapa statemen yang berkaitan dengan faktor-faktor SWOT, selain melalui wawancara, peneliti juga melakukan proses analisis faktor-faktor melalui dokumen atau data.

Setelah dilakukannya proses analisis atau identifikasi berbagai faktor SWOT melalui wawancara kepada informan, kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan rekomendasi terhadap strategi baru berdasarkan variabel SWOT dengan memanfaatkan rumus dalam matriks SWOT.

1. Analisis Faktor Eksternal dan Internal Strategis Pariwisata Berkelanjutan

Dilakukannya analisis faktor strategis internal adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Setidaknya dilakukan analisis terhadap pembangunan destinasi pariwisata, promosi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata dan tentunya pada proses perencanaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya akan jelaskan beberapa hasil identifikasi faktor strategis yang dimaksud.

Analisis faktor internal dimulai dengan pengidentifikasian faktor kekuatan pariwisata Lombok. Salah satu kekuatan pariwisata Lombok adalah terletak pada keunikan gunung rinjani dan keunikan alamnya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Bapak NG yang merupakan Pejabat Fungsional Perencanaan Dinas Pariwisata menyatakan:

“.....dibandingkan dengan di Lombok, Lombok lebih baik dan potensial apalagi dengan adanya rinjani, kute, sengigi dan lain-lain. Dan fakta bahwa menunjukkan kunjungan wisata itu terjadi disini.”

Hal tersebut juga dijelaskan dalam dokumen STMP Lombok sebagaimana ditekankan bahwasan gunung rinjani dikenal sebagai sentra destinasi Lombok dengan aktivitas yang beragam seperti petualangan, penelitian dan pendidikan, kesehatan, *sightseeing*, *soft and hard tracking*, dan keistimewaan yang dimiliki danau segara anak (STMP Lombok, 2015-2019).

Faktor kekuatan pariwisata Lombok selanjutnya adalah terkait dengan posisi geografis yang strategis. Dimana hasil analisis dokumen menjelaskan bahwa posisi Lombok berada pada segitiga emas destinasi pariwisata utama di Indonesia yakni Bali, Tana Toraja, Bunaken dan Pulau Komodo. Lombok juga

berada pada segitiga emas pelayaran nasional dan internasional yakni Surabaya, Makasar, dan Darwin Australia (STMP Lombok 2015-2019).

Faktor kekuatan pariwisata Lombok lainnya adalah keberagaman agama dan budaya yang tersebar di seluruh pulau Lombok. Hal demikian tentu menjadi potensi dan memiliki daya jual sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak KW selaku informan di Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB menyatakan:

“.....segala sesuatu yang ada di Lombok ini bias menjadi produk pariwisata, orang bertani saja asalakan kita bias mengemasnya bias menjadi potensi wisata dan mendatangkan wisatawan. Missal di Desa Sade, dia kan beraktifitas seperti biasa karena tradisi mereka, sehingga bisa menghasilkan dan menjadi destinasi wisata.”

Selain itu, faktor internal yang menjadi kekuatan selanjutnya adalah semangat masyarakat dalam memanfaatkan pariwisata. Hal demikian disampaikan oleh Bapak NG selaku pejabat fungsional perencanaan Dinas Pariwisata menyatakan:

“.....dibandingkan dengan di Sumbawa, masyarakat kita lebih antusias terlibat dalam pemanfaatan pariwisata, misalnya banyak teman-teman yang punya usaha jasa travel, penginapan, dan lain-lain.”

Setelah melihat kekuatan melalui analisis faktor internal, maka selanjutnya juga dilakukan identifikasi kelemahan dari pariwisata Lombok. Salah satu kelemahan yang dimaksudkan adalah kurangnya infrastruktur yang memadai dalam menunjang kegiatan pariwisata. Hal demikian dijelaskan secara tegas dalam dokumen statistik kebudayaan dan pariwisata provinsi NTB tahun 2014 menjelaskan rendahnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang sifatnya masih terbatas dalam pembangunannya. Tentu ini menyebabkan rendahnya investasi

pariwisata dan juga disebabkan oleh lemahnya kebijakan pemerintah daerah dibidang pariwisata (Statistik Disbudpar, 2014).

Kelemahan pada proses perencanaan pariwisata Lombok selanjutnya adalah lemahnya dalam penganggaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak JN selaku mantan pejabat bidang program pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB mengatakan:

“.....nah terus implementasinya akhirnya secara langsung agak mandeg, karena pentunjuk pelaksanaannya tidak ada. Karena ada konektivitas, infrastruktur, pehubungan ikut. Nah bagaimana mau melaksanakan jika tidak ada petunjuk teknis dan kenapa tidak di anggarkan secara nyata di masing-masing sektor terkait.”

Kelemahan lainnya juga disampaikan oleh Bapak KW selaku informan di Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB yang menjelaskan bahwa kurangnya sinergitas antar daerah, sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

“.....terus penjabarannya kebawah gimana nih, kan kembali ke daerah. kan seperti itu, cita-citanya kita di atas, begitu kita sampaikan dia ke bawah dan tidak teradopsi secara baik, kan menjadi cita-cita provinsi bukan cita-cita bersama, itu sebenarnya menjadi titik sentranya, saya bilang kan STMP konsep besarnya dari pusat, begitu dia turun ke bawah, kita seberapa banyak mengadopsinya atau seberapa besar, mungkin tidak banyak, tidak lebih dari 10 persen.”

Kurangnya kualitas SDM pariwisata yang professional dan kompeten baik dalam menunjang pariwisata maupun memiliki persepsi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai kelemahan lainnya, hal ini juga disampaikan oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ, berikut pernyataannya:

“...apalagi dengan adanya mandalika, ada kekhawatiran dari pemda, dia khawatir tidak dapat mensuplai sdm yang berkualitas, khawatirnya nanti malah mensuplai dari luar, kan kasian. Makanya kita lakukan program peningkatan kapasitas SDM, jadi begitu selesai siap di tempatkan.”

Disisi lain misalnya, Bapak NG juga membenarkan bahwa berbagai kelemahan dalam membangun pariwisata berkelanjutan dengan sulitnya menyatukan pemahaman. Berikut pernyataan yang di kemukakan:

“.....keberlanjutan itu menjadi prasyarat, sebab karena hasil ratifikasi pembangunan pariwisata dunia harus itu menjadi kewajiban, dan ini kemudian berat untuk kita lakukan karena untuk mengajak orang berfikir secara berkelanjutan adalah tidak mudah.”

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis berbagai dokumen lainnya, maka identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok adalah dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.19
Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor-faktor Strategi Internal	
KEKUATAN (S):	
1.	Keindahan gunung rinjani dan keunikan alamnya
2.	Posisi geografis yang strategis
3.	Pulau kecil yang tersebar dan memiliki keunikan masing-masing
4.	Keberagaman agama dan budaya
5.	Antusias masyarakat dalam memanfaatkan pariwisata
KELEMAHAN (W):	
1.	Infrastruktur pariwisata yang kurang memadai
2.	Lemahnya Penganggaran
3.	Kurangnya kualitas SDM pariwisata yang profesional
4.	Sistem pengelolaan destinasi yang belum terpadu
5.	Kurangnya pemahaman masyarakat luas akan pariwisata yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan
6.	Kurangnya sinergitas antar daerah

Sumber: disusun dan diolah sendiri dari berbagai sumber, 2018

Selain kelemahan, dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lombok memiliki peluang, salah satunya yakni Lombok ditetapkan

sebagai pintu gerbang pariwisata koridor 5 MP3EI, sehingga aktivitas pariwisata di Lombok mendapatkan momentumnya sebagai sektor unggulan, ini dijelaskan dan ditegaskan melalui data dokumen STMP Lombok 2015-2019.

Peluang selanjutnya adalah perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Lombok tercermin melalui adanya inisiatif pariwisata hijau, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak SN sebagai informan selaku *Advisor Tourism* pada GIZ menjelaskan:

“.....karena projek kita di Lombok, nah, kebetulan program kami tentang pariwisata berkelanjutan. Ini ada request dari Bappenas di Jakarta, Bappenas meminta kita fokus di Lombok. Iya, ini inisiatif bersama Kemenpar dan koordinasi dengan lainnya akhirnya iya sudah lanjutkan.”

Selain itu, peluang yang potensial adalah ditetapkannya Lombok sebagai salah satu dari 10 kawasan pariwisata nasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak SN selaku *Advisor Tourism* pada GIZ:

“.....yang kedua kenapa Lombok, Lombok juga ditetapkan sebagai destinasi nasional, selain Bali ya, salah satu dari 10 destinasi dan disana ada Lombok, selain ada Jogja.”

Berbicara pariwisata berkelanjutan Lombok, tidak hanya kekuatan, kelemahan, dan peluang dapat diidentifikasi, tetapi juga pada bagian ini akan dijelaskan ancaman pada pariwisata berkelanjutan Lombok salah satunya adalah belum kondusifnya kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada, sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak JN yang mengandung unsur sosial sebagai berikut:

“.....karena ini lingkupnya Lombok, tapi temen-temen Sumbawa bilang, ya istiahnya iri, karena ini pariwisata hijau ini, kelanjutan daripada kerjasama dengan Kore kalau pemerintah daerah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak NG selaku Pejabat Fungsional

Perencana Dinas Pariwisata NTB menjelaskan dengan menekankan memicu timbulnya unsur politis:

“.....memang tidak bisa kita membuat kebijakan secara merata di bidang pariwisata, memang itu sangat rentan secara politis, kenapa kok lombok-lombok saja? sebab begini, kalau ingin membangun di sumbawa itu belum ada tamunya mau membangun kan percuma –kasarannya begitu Perencanaan wilayah-pun karena didalam perencanaan pariwisata jika tidak diaplikasikan mengundang unsur politis. Sehingga Esensinya bahwa tidak bisa lepas dari unsur politis dalam mengambil keputusan untuk wilayah mana yang akan dibangun.”

Selain unsur politis, ancaman yang dijelaskan oleh Bapak NG yakni terhadap semakin pesatnya pembangunan pariwisata yang dapat berakibat pada ketidak mampuan pemerintah daerah dalam membendung pertumbuhan tersebut, hal demikian disampaikan Bapak NG selaku Fungsional Perencana Dinas Pariwisata NTB sebagai berikut:

“.....sekarang kan pertumbuhan di suatu daerah, sekarang pertumbuhan di utara sangat pesat sekali. Saking pesatnya sampai-sampai suatu saat pemerintah Kabupaten Lombok Utara kualahan juga untuk membentuk pertumbuhan yang besar itu, membendung dalam konsep pembinaan, pengendalian yang berhubungan dengan tata ruang, yang ujung-ujungnya adalah pariwisata berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai gambaran diatas, proses identifikasi hasil wawancara beserta dokumen atau data yang ada, maka faktor peluang dan ancaman dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.20

Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor-faktor Strategi Eksternal



PELUANG (O):
1. Pasar pariwisata yang membaik
2. Kemunculan institusi pendidikan kepariwisataan
3. Perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Lombok
4. Lombok sebagai pintu gerbang pariwisata koridor 5 MP3EI
5. Beroperasinya Lombok International Airport
6. Lombok ditetapkan sebagai kawasan pariwisata nasional.
ANCAMAN (T):
1. Semakin pesatnya pembangunan pariwisata
2. Belum kondusifnya kondisi sosial, ekonomi dan politik
3. Meningkatnya dampak perubahan iklim dan meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada tingginya <i>carbon footprint</i>
4. Lemahnya pemahaman masyarakat luas dan wisatawan terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan

Sumber: disusun dan diolah sendiri dari berbagai sumber, 2018

1.1.2.1 Faktor Pendukung

Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok khususnya di Pulau Lombok, maka berbagai faktor pendukung yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber termasuk hasil daripada identifikasi *SWOT* dengan mengambil faktor peluang dan kekuatan sebagaimana pada penjelasan diatas. Sehingga jika dijelaskan secara umum dan ringkas maka dapat dikatakan bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam perencanaan ini adalah **ragamnya sumber daya alam dan budaya, regulasi, iklim pasar pariwisata, komitmen kelembagaan (komitmen pemerintah pusat).**

Ragam sumber daya alam dan budaya adalah menjadi pendukung dalam proses perencanaan pariwisata, ini dikarenakan proses perencanaan akan mudah untuk dilaksanakan apabila sumber daya alam telah mampu diidentifikasi secara langsung tanpa melalui berbagai kajian yang bersifat pencarian. Melalui posisi geografis, dalam hal perencanaan mudah untuk dilakukan justifikasi bahwa sektor unggulan NTB berada pada komoditas wisata.

Dari sisi regulasi, faktor pendukung lainnya adalah dengan tersedianya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, selain itu tersedianya Perda No 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan pariwisata. Ditetapkannya Lombok sebagai pintu masuk pariwisata koridor 5 MP3EI juga sebagai pendukung dalam proses perencanaan yang menjadikan dasar dalam komitmen nasional untuk memajukan kepariwisataan di Pulau Lombok.

Komitmen kelembagaan juga sebagai pendukung dalam mensukseskan perencanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok, Dinas Pariwisata misalnya dengan GIZ Jerman melakukan kerjasama sebagai bentuk komitmen dalam mengupayakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, beroperasinya Bandara Internasional Lombok tentunya sebagai pendukung dalam menumbuhkan aktifitas pariwisata. Ini tentu menjadi modal besar dalam kesuksesan sebuah perencanaan baik dalam sisi pembagian tugas, porsi tugas, dan kepedulian bersama.

Perencanaan, jika tidak melibatkan berbagai institusi dan berkolaborasi secara sadar dan aktif hanya akan menjadikan proses perencanaan begitu mustahil dapat terlaksana. Maka oleh sebab itu, proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di NTB adalah output dari inisiatif pariwisata hijau antara Kementerian Pariwisata dengan GIZ Jerman dan sekaligus membuktikan bahwa proses

perencanaan akan terlaksana apabila kelembagaan yang kuat dapat terjalin.

Selain itu, iklim pasar pariwisata sangat baik, sehingga perencanaan akan menjadi mudah dalam menyesuaikan strategi dalam peningkatan kualitas kunjungan dan konsumsi produk pariwisata.

Berdasarkan STMP Lombok jelas dideskripsikan bahwa pasar pariwisata yang membaik dapat ditinjau melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke NTB meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Informan juga memaparkan bahwa “.....pada fakta kunjungan pariwisata memang terjadi di Pulau Lombok” (NG, 2017). Tentu ini menjadi dasar utama dan modal pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata sebagai upaya dalam penyesuaian kebutuhan pasar dan mengarahkan pada keberlanjutan.

Jika dipetakan secara eksplisit, beberapa faktor yang menjadi pendukung proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lombok adalah sebagai dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21
Faktor Pendukung

No	Faktor Pendukung (S dan O)
1.	Pasar pariwisata yang membaik
2.	Kemunculan institusi pendidikan pariwisata
3.	Perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Lombok
4.	Lombok sebagai pintu gerbang pariwisata koridor 5 MP3EI
5.	Beroperasinya Lombok Intenational Airport
6.	Lombok ditetapkan sebagai salah satu kawasan pariwisata nasional
7.	Posisi geografis yang strategis
8.	Pulau kecil yang tersebar dan memiliki keunikan masing-masing
9.	Keberagaman agama dan budaya lokal
10.	Antusias masyarakat dalam memanfaatkan pariwisata

Sumber: Data diolah, 2018

1.1.2.2 Faktor Penghambat

Selain memiliki faktor pendukung yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam proses perencanaan juga terdapat berbagai faktor penghambat atau kendala dalam mensukseskan keberlangsungan proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di NTB yang bersumber dari hasil identifikasi SWOT khususnya yakni Kelemahan (W) dan Ancaman (T). Adapun beberapa faktor menjadi penghambat dalam proses perencanaan yang diperoleh melalui berbagai meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur, rendahnya pemahaman masyarakat, pesatnya pembangunan pariwisata, tingginya dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata dan beberapa peraturan yang tumpang tindih antara peraturan satu dengan lainnya.

Akan tetapi, faktor anggaran menjadi faktor yang acapkali menjadi penghambat diberbagai bidang perencanaan, termasuk dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Baik nasional maupun lokal, faktor anggaran menjadi faktor penghambat yang bersifat umum, artinya umum terjadi di mana saja dan disetiap proses perencanaan selalu dihambat oleh keterbatasan anggaran. Pada perumusan STMP Lombok 2015-2019 misalnya, keterbatasan anggaran menjadi pemicu kurang maksimalnya proses perencanaan. Hal tersebut sejalan dengan paparan oleh Bapak JN selaku mantan pejabat bidang program di Dinas Pariwisata menerangkan:

“.....paket rencana induk ini di GIZ dengan pembiayaan dari kementerian berkerjasama dengan GIZ, kita di penganggaran tidak ada andil untuk rencana induk ini. Misalnya dia mau sosialisasi di seluruh kabupaten/kota kita hanya fasilitasi akomodasi, koordinasi dan konsumsi saja.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, keterbatasan anggaran adalah penyebab tidak maksimalnya perencanaan. Hal demikian tercermin melalui pemberian fasilitas oleh Dinas Pariwisata, sedangkan sumber anggaran dalam melakukan perencanaan adalah berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan lembaga donor internasional yakni GIZ Jerman. Keterbatasan anggaran bukan hanya menghambat proses koordinasi, melainkan menjadikan potensi terhadap gagalnya perencanaan akibat tidak memiliki legalitas. Maksudnya adalah, hasil temuan mengindikasikan bahwa *STMP* Lombok tidak dapat ditetapkannya atau diberikannya status legalitas hukum sebagai peraturan gubernur NTB yang dikarenakan oleh keterbatasan anggaran.

Sehingga berdasarkan identifikasi SWOT diatas beberapa faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di NTB khususnya di Lombok, yang didapatkan melalui hasil Kelemahan (W) dan Ancaman (T) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Faktor Penghambat

No.	Faktor Penghambat (W) dan (T)
1.	Semakin pesatnya pembangunan pariwisata
2.	Belum kondusifnya kondisi politik
3.	Meningkatnya dampak perubahan iklim dan meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada tingginya <i>carbon footprint</i>
4.	Lemahnya pemahaman masyarakat luas dan wisatawan terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan
5.	Infrastruktur pariwisata yang kurang memadai
6.	Lemahnya Penganggaran
7.	Kurangnya pemahaman masyarakat luas akan pariwisata yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan
8.	Kurangnya sinergitas antar daerah

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2018

5.2 Pembahasan

Berdasarkan pada tujuan penelitian, fokus penelitian dan hasil penelitian, maka pembahasa penelitian ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengidentifikasi (1) proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok sesuai pada fokus penelitian yakni menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Robert. R. Mayer dalam bukunya yang berjudul *policy and program planning: a developmental perspective*; (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut:

5.2.1 Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok

Pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok menjadi titik pangkal pencerahan terhadap teori-teori pembangunan yang belakangan ini hanya mengukur keberhasilan pembangunan melalui sudut pandang pertumbuhan perekonomian. Selain itu, pembangunan pariwisata bekrelanjutan juga menjadi pangkal perubahan atas pengelolaan pariwisata konvensional. Beberapa ilmuan Barat seperti Rostow, Myrdal, Marx, Martinusen misalnya yang mendasarkan capaian keberhasilan pembangunan secara umum melalui orientasi pertumbuhan perekonomian. Dalam artian pembangunan yang hanya berpusar pada pencapaian ekonomi (Suryanti, 2014).

Akan tetapi Diana Conyers selanjutnya memberikan paradigma baru terhadap orientasi pembangunan yakni pembangunan sosial. Demikian juga

pakar-pakar atau ilmuwan lainnya kemudian menawarkan teori pembangunan yang berkelanjutan dengan mengakomodir berbagai kepentingan seperti sosial, ekonomi dan lingkungan yang pada akhirnya diadopsi di berbagai sektor, termasuk di sektor pariwisata, kemudian berlaku secara global. Harapan pembangunan berkelanjutan secara sederhana adalah agar produk pariwisata dapat dinikmati dari generasi ke generasi.

Proses pembangunan umumnya sangat relevan dilaksanakan atau diaplikasikan di Negara Dunia Ketiga termasuk di Indonesia umumnya dan di Pulau Lombok khususnya. Proses pembangunan pariwisata berkelanjutan juga sangat penting dilakukan dengan system perencanaan, mengingat beberapa faktor yang mempengaruhi pentingnya dilakukannya perencanaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sjafrizal (2016) sebagai berikut:

1. Karena belum adanya stabilitas mekanise pasar (*Market Failure*), maka kondisi masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan belum mampu berkompetisi dengan golongan yang telah maju. Di sisi lain misalnya, kurang meratanya persebaran informasi yang disebabkan oleh berbagai daerah yang masih teriosolir karena keterbatasan infrastruktur pendukung. Sehingga campur tangan pemerintah yang dilakukan secara terencana menjadi penting dan menentkan terlaksananya prose pembangunan di bidang pariwisata.
2. Karena adanya ketidakpastian masa datang terhadap sumber daya alam yang menyebabkan perlunya perencanaan pembangunan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk dimasa datang dan mnsiasati sifat dari sumber daya alam yang terbatas melalui kebijakan preventif dan melalui kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

3. Untuk dapat memberikan arahan pembangunan dan koordinasi yang lebih baik kepada pelaku pembangunan, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat umum dibidang pariwisata.

Pembangunan pariwisata di Pulau Lombok-pun demikian, proses perencanaan dilakukan dalam upaya pencapaian pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berorientasi pada kepentingan sosial-budaya dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut tercermin melalui adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTB 2013-2018 dan dokumen *Sustainable Tourism Master Plan* (Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan – STMP) Lombok 2015-2019.

Umumnya, kedua rencana induk tersebut sejatinya telah memuat kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai usaha konkret dalam penekanan kerusakan Sumber Daya Alam atau lingkungan yang mayoritas disebabkan oleh cara pandang dan akibat pola pikir pembangunan yang bersifat sektoral dan reduksionis (Nugroho dan Dahuri, 2017). Akan tetapi jika kedua rencana tersebut di urutkan secara hirarki, maka RIPPARDA NTB adalah menjadi rencana induk tertinggi atau Perda tertinggi di bidang pariwisata yang ada di Pulau Lombok.

Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

STMP Lombok 2013-2019 adalah rencana induk yang berfokus pada pembangunan pariwisata berkelanjutan pulau Lombok. Secara teoritis, jika ditelaah

secara mendalam bahwa perencanaan tersebut menginterpretasikan bahwa perencanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok dilakukan atas dasar konsep pembangunan wilayah sebagaimana dijelaskan Nugroho dan Dahuri (2017) bahwa suatu proses pembangunan wilayah terjadi apabila memiliki berbagai aspek seperti; *pertama*, keunggulan komparatif yang berhubungan dengan keadaan bahwa suatu wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam, daya tarik khas, dan tingginya aktifitas konsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor lokal yang memiliki sifat khas atau endemik seperti, iklim, budaya dan sebagainya sehingga wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif.

Kedua, adanya aglomerasi yang merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa peningkatan keuntungan-keuntungan sebagai akibat pemusatan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena kemudahan akses informasi terhadap konsumsi sumber daya alam. *Ketiga*, *transport cost* yang paling terlihat secara kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Ini terjadi karena biaya-biaya yang berkaitan dengan jarak dan lokasi tidak dapat diabaikan dalam pembangunan wilayah.

Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 7 tahun 2013 tentang RIPPARDA 2013-2028 memberikan ruang terhadap proses pembangunan yang dapat dilakukan berdasarkan perwilayahan. Seperti pada pasal 8, 9, 10 dan 13 yang secara umum dijelaskan bahwa pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi perwilayahan DPD (Destinasi Pariwisata Daerah) dan KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah). Dimana DPD ditentukan berdasarkan kriteria:

a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota yang terdiri dari kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah yang diantaranya merupakan KSPD;

- b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jaringan jejaring produk wisata dalam bentuk pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektoral

Mengingat Provinsi NTB memiliki dua pulau yakni pulau Lombok dan pulau Sumbawa, maka dalam pembangunan pariwisata daerah, dilakukan proses pembangunan berbasis wilayah yakni terefleksi melalui DPD Pulau Lombok dan DPD Pulau Sumbawa. Dimana STMP Lombok berfokus pada DPD Pulau Lombok dengan 4 KSPD yang berada didalamnya. Dalam artian DPD tersebut terdiri dari masing-masing KSPD lintas kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok. Melihat pada Perda tersebut secara eksplisit menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan bekerja berdasarkan konsep pembangunan wilayah.

Pendekatan Perencanaan

Telah dijelaskan diatas, bahwa agar pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok khususnya di Lombok dapat bekerja dengan maksimal dan berorientasi pada tujuan dan visi, maka perlu dilakukannya perencanaan. Teori perencanaan dewasa ini telah memiliki berbagai variasi.

Dalam buku "*Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*" oleh Suharto P. Hadi (2013), misalnya yang menjelaskan berbagai klasifikasi teori perencanaan

yang meliputi; Friedman (1987) mengembangkan empat kategori yakni reformasi sosial, analisis kebijakan, pembelajaran sosial, dan mobilitas. Hudson (1979) membagi teori perencanaan kedalam lima kategori yang meliputi sinoptik, incremental, transaktif, advokatif dan radikal. Sementara Walker (1984) yang mengajukan tiga kategori yang meliputi incremental, komprehensif dan structural. Sedangkan Faludi yang mengajukan dua kategori teori perencanaan yang meliputi komprehensif termasuk rasional komprehensif, inkremental dan perencanaan positif.

Berdasarkan beberapa ketegori perencanaan tersebut, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan Pulau Lombok jika disandingkan dan diamati berdasarkan beberapa model perencanaan diatas, maka Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok (*STMP* Lombok) termasuk ke dalam model perencanaan sinoptik yang dikembangkan oleh Hudson, karena memiliki titik tekan relevansi terhadap proses yang ilmiah. Hal lainnya juga dapat dibuktikan melalui pernyataan Hudson (1979) dalam tulisannya berjudul "*Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions*" menjelaskan bahwa: Perencanaan Sinoptik (*synoptic planning*) adalah tradisi perencanaan yang dominan digunakan dengan memiliki empat elemen klasik meliputi penetapan tujuan, identifikasi alternative kebijakan, alat evaluasi dalam mencapai tujuan, dan penerapan kebijakan (Hudson, 1979).

Perencanaan sinoptik merupakan tradisi yang dominan digunakan dalam melakukan perencanaan, karena perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang ilmiah, rasional dan non-politis. Rasional ilmiah menunjuk pada metode yang digunakan pada dasar pemilihan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan memilih jawaban yang benar dan mendasarkan pada kajian dari konsekuensi dari alternative solusi. Selain disebut sebagai perencanaan rasional, Hadi (2013)

menyebutkan perencanaan sinoptik juga disebut sebagai perencanaan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dengan ditandai tujuan yang jelas, proses evaluasi yang eksplisit dan jangkauan yang komprehensif.

Secara umum, perencanaan sinoptik oleh Hudson memiliki kemiripan terhadap perencanaan yang dikembangkan oleh Mayer di tahun 1985. Akan tetapi beberapa tahapan sinoptik oleh Mayer memiliki tahapan yang rinci atau tahapan rasional dan komprehensif dibandingkan dengan model yang di kembangkan Hudson. Sehingga berbagai kritik diajukan untuk menyempurnakan berbagai tahapannya. Karena sinoptik terkesan menyederhanakan persoalan (Hadi, 2013).

Sedangkan Mayer (1985) dalam bukunya yang berjudul "*Policy and Program Planning: A Developmental Perspective*" menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan meliputi (1) *determination of goals*, (2) *assessment of needs*, (3) *specification of objectives*, (4) *desaign of alternative action*, (5) *estimation of concequences of alternative action*, (6) *selection of course of action*, (7) *implemmentation*, (8) *evaluation* (Mayer, 1985). Yang secara universal menunjukkan langkah yang rasional, prosnya ilmiah, dan memandang dengan cara yang komprehensif.

Baik Hudson dengan sinoptiknya dan Mayer dengan rasionalnya memiliki perbedaan yang kontras terhadap proses perencanaan, dimana langkah-langkah mayer terlihat lebih kompleks dibandingkan dengan proses Hudson. Akan tetapi antara kedua pandangan tersebut, secara umum memiliki klasifikasi teori perencanaan yang sama, yakni klasifikasi teori perencanaan yang melihat perencanaan secara komprehensif, rasional dan ilmiah. Sehingga jika kemudian kedua kriteria perencanaan tersebut disandingkan dan dibandingkan dengan STMP Lombok, maka proses perencanaan Mayer bekerja lebih dekat dengan proses STMP Lombok. Dimana sederhananya proses STMP Lombok memiliki

relevansi dengan proses perencanaan rasional oleh Mayer. Relevansi kriteria selanjutnya adalah dengan melihat pada berbagai contoh perencanaan komprehensif yang meliputi *City Beautiful*, *Chicago Housing Authority*, *Blueprint Planning*. Sedangkan contoh perencanaan komprehensif yang berlaku di Indonesia adalah *Master Plan* yang terefleksi ke dalam RTRW dan STMP Lombok.

Namun, relevansi positif antara Mayer dengan STMP Lombok tersebut bukan semata-mata mampu memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan empiris pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ada di Pulau Lombok. Proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang panjang juga sebagai tantangan selanjutnya. Selain itu, kebutuhan pembiayaan yang tinggi dapat berpotensi terhadap kegagalan suatu perencanaan sebagaimana yang terjadi pada STMP Lombok. Mengingat keterbatasan sumber daya materil, tentunya kemudian berdampak pada tidak bekerjanya beberapa tahapan secara rasional.

Beberapa ahli menunjukkan adanya kelamahan yang melekat terhadap model tersebut seperti yang diungkapkan oleh Winarno (2002) dalam Suharto (2015):

- a. Karena masalah dan alternatif yang diusulkan oleh model ini memiliki sifat komprehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan seringkali tidak mampu merespon masalah dengan cara-cara yang lebih spesifik yang konkrit.
- b. Teori tersebut juga seringkali tidak realistis terhadap informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan alternatif-alternatif yang diajukan seringkali menghadapi hambatan, seperti contoh dalam konteks waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.
- c. Para pembuat keputusan umumnya acapkali berhadapan dengan situasi konflik kepentingan antar berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam prosesnya.

Mengingat siklus perencanaan pembangunan pada umumnya adalah meliputi; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pada penjelasan selanjutnya akan dibahas sedikit mengenai keterkaitan antar tahap perencanaan dan berbagai proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok khususnya di Pulau Lombok.

Hubungan antara tahapan

Mayer (1985) dalam bukunya *Policy and Program Planning: A Developmental Perspective* menjelaskan penilaian kondisi saat ini, atau yang disebut oleh Mayer sebagai penilaian kebutuhan adalah menjadi langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan. Akan tetapi Ia juga menjelaskan bahwa antara penentuan tujuan, penilaian kebutuhan, dan spesifikasi tujuan dapat saling berkaitan layaknya segitiga. Selain berkaitan, masing-masing tahap tersebut bersifat dinamis dan mampu bekerja secara spiral bukan linier. Sederhananya adalah bahwa salah satu tahapan dari ketiga tahapan tersebut dapat memulai suatu proses perencanaan pembangunan dengan bergantung pada kebutuhan. Berikut masing-masing tahapan digambarkan secara singkat:

1. Penentuan tujuan, dapat diilustrasikan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang acapkali dimulai dalam penilaian kondisi yang terrefleksi kedalam gambaran umum kinerja pariwisata dalam memengaruhi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Hasil analisis kebutuhan tersebut hakikatnya dijadikan dasar dalam menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan keseimbangan dimensi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Jika berdasarkan hal tersebut maka bekerjalah tahap penilaian kebutuhan dalam memulai proses perencanaan. Mayer (1985) juga menegaskan bahwa penentuan tujuan berfungsi sebagai kerangka kerja

untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penilaian untuk menilai dan tujuan apa yang akan dikejar.

2. Penilaian kebutuhan juga dapat memulai proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan apabila dihadapkan berbagai persoalan seperti tingginya disparitas, terjadinya abrasi, tingginya volume sampah dan lain sebagainya yang kemudian mengarah pada bencana. Artinya bahwa penilaian kebutuhan dalam proses perencanaan dapat dilakukan tanpa adanya diskusi publik mengenai tujuan atau sasaran mengingat sifat *urgent* yang dimunculkan persoalan hingga bekerjanya penilaian kebutuhan yang dekat dengan output tujuan.

3. Spesifikasi tujuan, juga memungkinkan untuk memulai proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Mayer (1985) dapat terjadi apabila adanya aksi publik yang menghasilkan tindakan politik oleh kelompok kepentingan yang terorganisir. Sehingga dalam hal perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan tahap penilaian menjadi tidak bekerja karena kelompok kepentingan menganggap bahwa kepentingan mereka tidak didistribusikan secara merata.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penentuan tujuan, kebutuhan penilaian, dan spesifikasi tujuan adalah tahapan-tahapan yang saling bergantung dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi proses tersebut mungkin dimulai pada satu tahap yang harus berorientasi pada tujuan dan didasarkan pada penilaian kebutuhan yang akurat serta mencakup spesifikasi tujuan apabila proses perencanaan pembangunan berjalan secara rasional (Mayer, 1985). Berdasarkan pada hal tersebut, pembahasan selanjutnya akan membahas proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok:

5.2.1.1 Penilaian Kondisi Pariwisata dan Identifikasi Isu Strategis

Berbagai referensi maupun pakar menjelaskan proses perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan tahap penilaian kondisi, tinjauan keadaan daerah, identifikasi masalah, analisis masalah yang sedang terjadi dan sebagainya. Suharto (2015) misalnya menyebutkan, langkah awal dalam perencanaan pembangunan adalah dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan direpson oleh suatu kebijakan pembangunan atau program pembangunan.

Tjokroamidjojo (1987) juga demikian, dalam proses perencanaan pembangunan, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa suatu kegiatan peninjauan keadaan adalah kegiatan sebelum perencanaan dilakukan atau *pre-planning*. Artinya bahwa, penilaian kondisi di anggap terpisah dari proses perencanaan secara utuh sehingga masuk kedalam ruang *pre-planning*. Akan tetapi Ia tetap menekankan bahwa aktivitas tinjauan keadaan adalah tetap bagian dari satu-kesatuan dalam proses perencanaan.

Sedangkan khusus pada pembahasan penilaian kondisi pariwisata, baik tinjauan keadaan, penilaian kebutuhan dan identifikasi masalah, oleh Suharto (2015) dianggap penting dilakukan secara komprehensif. Artinya tinjauan keadaan tidaklah dilakukan secara sempit dan kaku, melainkan haruslah dapat diidentifikasi dan dianalisis secara inklusif atau komprehensif dengan memberlakukan teknik-teknik dan indikator-indikator yang tepat.

Sebagai contoh, jika masalah pencemaran lingkungan pada destinasi pariwisata dirumuskan sebagai akibat dari perilaku wisatawan dalam membuang sampah sembarangan, maka alternatif-alternatif yang dirumuskan menjadi sempit

serta berfokus pada *behavioralism*. Pemecahan masalah pencemaran lingkungan pada destinasi pariwisata menjadi sebatas meningkatkan pemahan terhadap dampak perilaku negatif buang sampah sembarangan. Namun demikian, mungkin saja masalah pencemaran lingkungan pada destinasi yang sesungguhnya memiliki relasi terhadap pesatnya kegiatan pariwisata melalui eksploitasi sumberdaya alam dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi. Karenanya, pemecahan masalah dapat dilakukan melalui kegiatan lain seperti kegiatan konservasi, pemberlakuan aturan tertentu, himbuan dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung proses penilaian kondisi kepariwisataan, identifikasi masalah maupun analisis kebutuhan, STMP Lombok dalam prosesnya mengaplikasikan kaidah-kaidah penelitian sebagai teknik dalam mencapai hasil identifikasi masalah, analisis kebutuhan dan proses penilaian. Mengingat penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan melibatkan penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, serta memperkuat teori dalam rangka pemecahan masalah yang timbul secara ilmiah dalam aktivitas pariwisata.

Pada STMP Lombok, proses penelitian dimanfaatkan sebagai upaya terhadap mencapai suatu pengetahuan akan kondisi pariwisata di Lombok dengan menggunakan desain penelitian seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Desain penelitian yang dimanfaatkan tersebut juga secara paralel memperhatikan instrument bisnis (*marketing mix*) yang meliputi: *Product, Place, Promotion, dan Price* (4Ps). Marzuki (2010) dalam Nizma (2016) menjelaskan bahwa *marketing mix* merupakan daftar ketegori mengenai variabel-variabel pemasaran yang diawali dengan cara mendefinisikan atau mendeskripsikan fenomena perdagangan. *Mix marketing* adalah gabungan atau penggunaan

kombinasi unsur-unsur produk, harga, promosi yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi yang ideal, yang memiliki kesesuaian dengan kondisi sasaran pembeli (Nizman, 2016). Artinya bahwa, metode penelitian yang digunakan dalam STMP Lombok berfokus pada analisis pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan konsumen dalam capaian pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dalam mendukung proses penelitian tersebut maka diberlakukan metode pengumpulan data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam STMP Lombok dikumpulkan melalui pendekatan wawancara dan dialog dengan pemangku kepentingan pariwisata, observasi lapangan, dokumentasi, pemetaan ruang, penilaian, mengenai potensi kepariwisataan berkelanjutan, serta FGD lintas kabupaten/kota. Sedangkan data primer berdasarkan pada data seperti daya tarik kepariwisataan, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, serta kelambagaan dan regulasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, laporan, statistik, maupun penelitian lainnya.

Kaidah-kaidah penelitian tersebut digunakan sebagai menganalisis dan mengidentifikasi (1) kunjungan wisatawan, (2) identifikasi isu strategis, (3) pemetaan kawasan prioritas, (4) analisis destinasi yang merupakan bagian dari tinjauan keadaan. Pada aspek kunjungan wisatawan misalnya, analisis data bekerja dalam upaya menemukan perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ketahun. Sedangkan isu strategis dimanfaatkan sebagai pendukung dalam pengintegrasian kebutuhan akan tujuan melalui gambaran umum mengenai berbagai persoalan selanjutnya. Pemetaan kawasan prioritas kemudian dilakukan dengan memanfaatkan kaidah penelitian seperti observasi, wawancara dan FGD dalam upaya menghasilkan temuan-temuan varian permasalahan pada setiap KSPD di Lombok. Yang terakhir adalah analisis destinasi sebagai tahapan

penentuan prioritas kawasan destinasi wisata yang bersifat *urgent* dalam diberikan perhatian lebih terhadap pembangunan sebagai upaya pencapaian tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, Tjokroamdiyo (1987) memandang bahwa tinjauan keadaan dilakukan sebagai bentuk pengetahuan terhadap potensi dan masalah pembangunan. Lebih lanjut Ia menganggap bahwa tinjauan keadaan dilakukan secara umum terhadap sifat, tingkatan dan struktur kegiatan sosial ekonomi. Pada konteks ekonomi misalnya perlu dilakukan peninjauan terhadap sumber daya manusia yang memengaruhi efektifitas dan produktifitas kerja, keterampilan atau keahlian. Tinjauan lainnya juga dapat dilakukan pada aspek ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber produksi. Aspek politik, kebudayaan dan aspek kemandirian pun demikian penting ditinjau karena beberapa hal tersebut dianggap menentukan.

Kegiatan penelitian tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan kelambagaan adalah merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebagai pijakan dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Kunarjo, 2002:71 dalam Tjokroamdiyo (1995:75). Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa kegiatan tinjauan keadaan yang meliputi identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya sangatlah memerlukan bahan dukungan seperti data statistik dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan dan analisis data statistik secara akurat sangat menentukan terhadap kondisi wilayah perencanaan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan secara keseluruhan, proses penilaian kondisi pariwisata dilakukan berdasarkan pada konsep atau kaidah-kaidah penelitian pada umumnya dan juga berdasarkan pada tradisi penilaian kondisi pada proses perencanaan. Akan tetapi, jika mengacu pada upaya dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan, proses penilaian pada

umumnya hanya berfokus pada kondisi ekonomi dan sosial. Padahal ketika ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan pada proses perencanaan secara menyeluruh semestinya mampu mengakomodir dimensi ekonomi, lingkungan, sosial-budaya secara proporsional baik dalam upaya mencapai maupun dalam cara-cara mencapainya.

5.2.1.2 Penentuan Tujuan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa tujuan merupakan suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dari berbagai tujuan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tujuan tersebut meliputi: 1) Partisipasi masyarakat local dalam membangun destinasi yang unik, bersih, otentik, aman, nyaman dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan kualitas kunjungan dan kepuasan wisatawan; 3) Memiliki institusi pariwisata yang didukung oleh SDM pekerja pariwisata yang professional dan didukung oleh publik yang berwawasan lingkungan; 4) Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang berorientasi pada prinsip kepariwisataan hijau dan usaha pariwisata berkelanjutan.

Ditentukannya tujuan tersebut tentunya di dasarnya pada realitas empiris atau problematika empiris yang bersifat komprehensif atas kondisi pariwisata di Pulau Lombok. Keinginan untuk menangani permasalahan yang terjadi serta memanfaatkan peluang sebagai upaya meningkatkan kualitas pariwisata menuju pariwisata yang berkelanjutan melalui rencana induk pembangunan pariwisata berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019.

Melihat pada cara-cara dalam menetapkan tujuan yang dilakukan oleh konsultan ahli di bidang pariwisata yang terdiri dari Tim dan Panitia Pengarah (pemerintah, swasta, dan masyarakat) memahami adanya fakta permasalahan lapangan yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan aktivitas kepariwisataan secara konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Maka dengan demikian penentuan tujuan dilakukan berdasarkan tinjauan keadaan terhadap pemikiran mengenai masa yang akan dilalui (Tjokroamidjojo, 1995:62). Penentuan tujuan pada proses perencanaan juga oleh Syamsi (1983) di dasarnya pada berbagai macam prakiraan. Dimana dalam hal ini tujuan ditetapkan pada beberapa prakiraan dan pertimbangan mengenai prospek pariwisata di pulau Lombok dengan titik tekan insiatif pariwisata yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Suharto (2015) memiliki pandangan terhadap penentuan tujuan yang di definisikan sebagai kondisi di masa depan yang hendak dicapai. Maksudnya adalah penentuan tujuan adalah sebagai cara dalam membimbing program-program kepariwisataan kearah rekonsiliasi masalah yang sedang terjadi. Sedangkan Mayer (1985) menjelaskan bahwa tujuan dapat didefinisikan sebagai ekspresi dari sebuah nilai dalam hal keadaan atau kondisi masa depan yang di idealkan.

Mengingat tujuan adalah representasi masa depan yang akan dicapai, maka Suharto (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program pembangunan. Oleh Suharto (2015), penentuan tujuan dibagi kedalam 2 (dua) jenis atau 2 (dua) tingkatan tujuan yakni tujuan yang bersifat umum (*goal*) dan tujuan yang bersifat khusus (*objective*).

Tujuan yang bersifat umum (*goals*) dirumuskan secara general sehingga pencapaiannya tidak dapat untuk di ukur, sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang bersifat spesifik dan terukur terhadap hasil yang menunjukkan kemajuan kearah pencapaian tujuan umum (Suharto, 2015). Untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang bersifat umum dan khusus, berikut Mayer (2015) memaparkan beberapa karakteristik tujuan umum (*goals*) sekaligus sebagai pembeda dari tujuan yang bersifat khusus (*objective*):

1. Tujuan bersifat luas, pernyataan yang umum dan menciptakan rasa tujuan bersama. Tujuan seperti itu merupakan dasar untuk menyekesaikan berbagai sudut pandang tujuang yang spesifik.
2. Tujuan tersebut dinyatakan ke dalam kata kerja yang tak terbatas untuk merepresentasikan keinginan untuk bertindak.

3. Sebagai tujuan yang luas, pernyataan umum pencapaian tujuan tidak dapat diukur jika hanya berdasarkan tujuan spesifik yang diperoleh darinya.
4. Sebagai penggambaran ideal masa depan, tujuan umum tidak mudah direalisasikan dengan konteks apapun pada rencana yang diberikan. Kondisi terukur yang khusus yang terkandung dalam suatu tujuan tidak akan pernah benar-benar menangkap esensi dari sebuah tujuan. Selain itu, kendala realitas membatasi pencapaian tujuan yang ideal. Oleh karena itu, tujuan biasanya bertahan di luar siklus perencanaan yang memiliki sifat tunggal.
5. Terhadap ekspresi nilai, tujuan hanya memiliki makna dalam kaitannya dengan system pengambilan keputusan di mana tujuan didukung. Karena sebuah tujuan merepresentasikan preferensi untuk nilai tertentu, maka tidak ada validitas di luar kelompok sosial yang preferensinya diungkapkan.

Penentuan tujuan, atau disebutkan oleh Tjokroamidjojo (1995:79) sebagai perumusan strategi pembangunan, di definisikan sebagai cara dalam mencapai tujuan berdasarkan sumber daya dan dana yang ada serta mampu untuk dikerahkan. Perumusan kebijaksanaan pembangunan ini didasarkan oleh pengetahuan atas kondisi sosial-ekonomi masyarakat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya (Tjokroamidjojo, 1995:79). Akan tetapi, selain penentuan tujuan yang didasarkan pada hasil kajian terhadap kondisi-kondisi dan permasalahan yang ada, Mayer (1985) justru memiliki pandangan terhadap penentuan tujuan yakni bahwa tujuan selain bersumber pada penilaian kondisi juga dapat bersumber dari berbagai sistem pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, di NTB, sumber tujuan adalah berupa konstitusi yakni RIPPARDA NTB tahun 2013-2018. Hal ini oleh Dyckman (1979) dalam Mayer (1985) mengamati bahwa perencanaan dalam konteks definisinya yang paling mendasar adalah proses penulisan konstitusi dan sumber yang paling sering

digunakan untuk menentukan tujuan pembangunan adalah dengan pemberlakuan badan legislatif. Artinya bahwa, perencanaan pembangunan pariwisata di Pulau Lombok khususnya Lombok memiliki berbagai sumber dalam penentuan tujuan yakni seperti; konstitusi, aturan, tugas pokok fungsi organisasi, opini publik yang termaktub didalam Koran dan TV, dan tentunya hasil penilaian kondisi pariwisata yang telah dilakukan (Mayer, 1985).

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dalam pengambilan keputusannya atau penentuan tujuan pembangunannya menurut Hadi (2013) haruslah didasarkan pada etika. Maksudnya adalah bagaimana suatu keputusan pembangunan didasarkan pada etika yang menyangkut aspek nilai (Finsterbusch, 1989 dalam Hadi, 2013). Etika pengambilan keputusan oleh Finsterbusch (1989) dalam Hadi (2013) mengacu pada lima prinsip etika yang biasa dijadikan dasar dalam pengambian keputusan pemabngunan yakni (1) *utilitarianism*, (2) *libertarianism*, (3) *Teori Keadilan Rawls*, (4) *Demokratis*, dan (5) *Ethical Pluralism*. Tiga prinsip pertama adalah menekankan pada hasil atau *output*, sedangkan Demokrasi menekankan pada proses dan yang terakhir adalah mempertimbangkan berbagai unsur kepentingan tanpa mengabaikan salah satu sebagai yang paling dominan (Hadi, 2013).

5.2.1.3 Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pada tahap ini, perumusan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan atau yang dibahasakan oleh Mayer (1985:149) sebagai tindakan alternatif (*design of alternative action*), menyebutkan bahwa dalam melakukan perencanaan, dimana perencana (*planner*) acapkali dihadapkan pada situasi dimana semua alternative strategi sangatlah relevan dengan tujuan yang dimaksud dan semua akan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Terhadap

fenomena tersebut, Mayer kemudian menjelaskan perlunya penjabaran dari sifat alternatif untuk memungkinkan identifikasi situasi-situasi yang dibutuhkan oleh perencana secara realistis. Berikut penjabaran (Mayer, 1985:150) yang dimaksud:

1. Tindakan alternatif dapat didefinisikan sebagai sebagai serangkaian tindakan bersifat diskrit yang saling terkait secara negatif. Dimana maksudnya adalah penerapan satu tindakan mengakibatkan tindakan yang lain tidak dapat diadopsi. Artinya tindakan tersebut dikatakan mewakili pertukaran yang dapat timbul dari beberapa sumber tindakan yang lain. Maka yang harus dilakukan adalah menentukan satu tindakan dengan merepresentasikan atau mewakili tindakan yang lain.
2. Alternatif juga dapat dibentuk kedalam berbagai tingkat intensitas satu tindakan. Hal seperti ini muncul ketika tidak memiliki hubungan linier yang sederhana antara tindakan satu dengan tindakan yang lain terhadap pencapaian satu tujuan spesifik. Maka dalam mencapai kondisi tertentu atau tujuan spesifik dapat dilakukan dengan memberlakukan berbagai tindakan dengan efek atau pengaruh yang ditimbulkan berbeda-beda dalam lingkup satu kesatuan tujuan. Mayer (1985) mengilustrasikan seperti: A1....A2....A3 dan seterusnya.
3. Satu kesatuan tindakan alternatif mungkin memiliki efek positif pada kondisi yang ingin dicapai atau bersifat eksklusif. Artinya mengadopsi satu tindakan tidak menutup kemungkinan akan mengadopsi tindakan yang lainnya. Oleh karena itu rencana yang ideal adalah rencana yang mengadopsi semua tindakan, tetapi secara bersamaan berpotensi memiliki keterbatasan sumber daya dalam pengadopsian dua tindakan atau lebih. Maka dalam hal ini dapat dilakukan rangkaian tindakan yang lebih besar sebagai alternatifnya dengan diilustrasikan seperti: AB...BC...AC dan seterusnya.

Melihat dari penjelasan diatas, berbagai alternative ditawarkan oleh Mayer dalam mengatasi berbagai persoalan dalam memilih alternatif tindakan, akan tetapi beberapa penjelasan menekankan pada pemberlakuan system prioritas mengingat keterbatasan sumber daya (dana). Maka untuk itu STMP Lombok-pun demikian memberlakukan prioritas dan kombinasi-kombinasi antara berbagai strategi. Strategi prioritas pembangunan pariwisata berkelanjutan di pulau Lombok dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang paling di anggap mendesak dan memerlukan perhatian yang bersifat kontinu demi tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kurniasih (2005) dalam Hilamah dan Karyana (2017) juga menyatakan bahwa dalam pembangunan, skala prioritas sebuah proyek atau program pembangunan dapat dinilai dari urgensitasnya, segi kemanfaatannya, aspek pemeliharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat bagi proyek pembangunan dan kemampuan atau ketersediaan sumber daya.

Strategi prioritas pembangunan pariwisata berkelanjutan ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan pariwisata dengan proses pemilihan dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang termaktub dalam sebuah daftar usulan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Daftar Skala Prioritas (DSP) strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah instrument yang digunakan untuk melakukan penilaian, melakukan evaluasi dan memandu agar usulan berbagai macam strategi pembangunan yang berasal dari urgensitas penanganan yang tinggi dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat lokal secara umum (Hilamah dan Karyana, 2017)

Selain urgensi sebagai dasar dilakukannya DSP, keterbatasan sumber daya keuangan (dana) juga sebagai salah satu faktor yang menentukan bekerjanya DPS. Komprehensifnya suatu masalah pariwisata, keterlibatan multi-stakeholder, dan berbagai macam strategi dirumuskan dalam menyelesaikan masalah tentunya menentukan jumlah besaran anggaran yang dibutuhkan. Semakin banyak strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan maka semakin banyak pula jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Artinya bahwa antara jumlah strategi dan jumlah kebutuhan pendanaan dalam proses perencanaan adalah berbanding lurus. Maka atas hal demikian perlu untuk diberlakukannya sebuah instrument DPS.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, secara umum, strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan *output* dari proses panjang penentuan alternatif tindakan atau pemberlakuan DPS. Nawawi (2003:175-176) dalam Nugroho dan Nurcahyanto (2016:5) misalnya menyebutkan dalam pemilihan strategi maupun menetapkan strategi dapat dilakukan berdasarkan teknik-teknik berikut ini:

1. Teknik Matrik Faktor Internal dan Eksternal, yang dilakukan dengan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan.
2. Teknik Matrik Profit Kompetitif, dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan organisasi non-profit sejenis, agar diadaptasi strateginya.
3. Teknik Matrik Memperkuat dan Mengevaluasi Posisi, dilakukan dengan mencocokkan kemampuan sumber daya internal yang dimiliki untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari risiko faktor internal.

4. Teknik Matrik Dari Kelompok Konsultan Boston, dilakukan dengan memnetapkan strategi yang berbeda untuk setiap bidang.

5. Teknik Matrik Strategi Induk atau Utama, yang dilakukan dengan menetapkan posisi yang kompetitif diukur dari tingkatan keberhasilan maksimum yang dicapai.

5.2.1.4 Rencana Aksi

Jika pada pembahasan sebelumnya menjelaskan mengenai proses dan sumber dalam penentuan tujuan, pertimbangan dan cara dalam melakukan spesifikasi tujuan secara khusus, dan menyusun strategi dalam mencapai tujuan.

Maka pada penjelasan ini, akan ditekankan pada rencana aksi sebagai proses akhir dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

Mayer (1985) menjelaskan bahwa pada tahap ini, proses perencanaan, khususnya pemilihan tindakan atau aksi, bertujuan untuk mencapai tujuan rencana yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pemilihan tindakan atau aksi bukanlah suatu tindakan yang mudah mengingat terdapat alasan yang seringkali menjadi permasalahan selanjutnya, yakni *pertama*, tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian besar pekerjaan yang terlibat dalam tahap sebelumnya biasanya didelegasikan oleh pengambil keputusan di luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang berwenang) ke beberapa pihak lain namun masih dalam system pengambilan keputusan yang berpotensi terhadap pengeluaran anggaran dengan jumlah yang sangat besar.

Kedua, pemilihan suatu tindakan atau aksi merupakan tahapan yang paling kontroversial dalam proses perencanaan. Maksudnya adalah pada tahap ini melibatkan komitmen untuk bertindak, yang dapat menyebabkan pengambil

keputusan untuk melihat dari perspektif baru mengenai keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Isu-isu sebelumnya dapat saja diselesaikan dengan baik, akan tetapi berpotensi secara tiba-tiba menjadi *unstable* (tidak stabil). Selain itu, selama perdebatan mengenai alternatif aksi, kepentingan atau konsekuensi baru juga berpotensi muncul ke permukaan bahkan terungkap yang secara langsung menyebabkan peninjauan ulang terhadap beberapa tahapan seperti: tujuan dan sasarannya, penilaian kebutuhan, alternative yang dipertimbangkan yang kemudian berdampak pada estimasi waktu perencanaan. Sederhananya, pada tahap ini proses politik dengan proses perencanaan (teknis) bertemu dan menghasilkan aksi-aksi baru.

Dalam pemilihan rencana aksi ini, Mayer kemudian menjelaskan bahwa tidaklah mudah untuk melakukan pemilihan-pemilihan aksi, meskipun pada tahap ini merupakan tahap yang bersifat sosial daripada teknik yang rasional. Namun, perlu di ingat juga bahwa tahap ini harus didasarkan pada kehati-hatian dan mempertimbangkan etika pengambilan keputusan untuk memaksimalkan hasil yang baik. Selain itu, hal yang wajib di pertimbangkan dalam tahap ini adalah “siapa melakukan apa” atau “siapa yang berpartisipasi dalam sebuah tindakan apa”, hal ini menjadi penting mengingat urusan pariwisata berkelanjutan di NTB merupakan tugas lintas sektor.

5.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Perencanaan

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pada pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang beberapa diantaranya dihasilkan melalui analisis SWOT. Akan tetapi,

berbagai faktor yang sangat mempengaruhi-lah yang kemudian mendapatkan penekanan dalam pembahasan ini.

5.2.2.1 Faktor Pendukung

Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka faktor-faktor pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok perlu dibahas maupun dikemukakan sebagai referensi dan pembelajaran terhadap aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu perencanaan. Maka, berdasar hal tersebut, berikut beberapa faktor pendukung yang dirasa paling berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok:

1. Regulasi

Perlu untuk diketahui, dalam proses perencanaan bukanlah semata-mata melakukan atau penyusunan sebuah dokumen tertulis secara spontan dan bebas terhadap nilai legal, melainkan segala proses perencanaan merupakan sebuah mandat. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan pembangunan akan terlaksana apabila didasarkan pada regulasi atau legalitas yang mengarahkan suatu perencanaan untuk dilakukan.

Pada konteks ini, dalam menyusun STMP Lombok tentunya didasarkan pada beberapa legalitas yakni salah satunya RIPPARDA NTB 2013-2028 sebagai dasar hukum. Artinya bahwa, proses penyusunan STMP dapat bekerja akibat dari adanya dasar hukum. Sejalan dengan itu, Tjokromidjojo (1995: 62-65) menjelaskan bahwa salah satu unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah kebijaksanaan dasar atau strategi dasar yang berkekuatan hukum yang termaktub dalam rencana pembangunan. Tentu hal demikian menjadi unsur dasar daripada seluruh rencana yang kemudian di refleksikan ke dalam

unsur-unsur pokok lainnya. Sehingga pada intinya adalah faktor pendukung dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Povinsi NTB (Lombok) berjalan atas dasar mandate RIPPARDA NTB 2013-2028.

2. Iklim Pasar Pariwisata

Faktor pendukung lainnya adalah membaiknya iklim pasar pariwisata di pulau Lombok yang dapat sebabkan oleh aktivitas pariwisata sejak tahun 2006 yang memperoleh kunjungan wisatawan yang tinggi. Berbagai data pada bab-bab sebelumnya juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya kunjungan pariwisata di Lombok menunjukkan peningkatan. Pada konteks pariwisata, iklim pasar akan stabil apabila beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja pariwisata meliputi; meliputi kunjungan wisata, kualitas produk pariwisata, pengalaman perjalanan pariwisata, ketersediaan prasarana dan sarana (infrastruktur), kondisi sosial dan politik yang baik, mudahnya jalur investasi dan daya dukung lingkungan yang baik.

Apabila keseluruhan tersebut memiliki stabilitas yang tinggi, maka secara paralel mampu menciptakan iklim pariwisata yang stabil dengan dengan itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dengan mudah untuk dilaksanakan.

Namun, dalam pariwisata Lombok, iklim pasar pariwisata memiliki stabilitas yang sangat dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisatawan.

3. Komitmen Kelembagaan

Selanjutnya, komitmen kelembagaan menjadi salah faktor pendukung yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Hal demikian dibuktikan dengan berbagai kebijakan pembangunan pariwisata dan inisiatif program pembangunan pariwisata oleh pemerintah pusat yang memiliki keberpihakan kepada pulau Lombok dan terefleksi secara hirarkis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan diimbangi dengan

pelestarian lingkungan. Komitmen kelembagaan ini dimaksudkan yakni antara Pemerintah Pusat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan lembaga donor internasional (GIZ) Jerman dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Hadi (2013) menjelaskan bahwa pembangunan yang dapat dikatakan berhasil adalah pembangunan yang datang dari atas, artinya pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui sistem-sistem tertentu atau melalui asas desentralisasi, selain itu pembangunan yang dikatakan berhasil selanjutnya adalah pembangunan yang memenuhi tiga kriteria yakni pertumbuhan, pemerataan dan berlangsung dengan lestari. Ini tentu menandakan atau beberapa komitmen kelembagaan erat kaitannya dengan konsep keberhasilan pembangunan yang dilontarkan oleh Hadi.

5.2.2.2 Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, atensi terhadap faktor penghambat juga perlu untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan atau sebagai bahan materi dasar dilakukannya evaluasi agar perencanaan pemabngunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok kedepannya mampu berjalan dengan maksimal dan berkualitas.

Untuk itu, berikut bebrapa faktor penghambat yang paling mepengaruhi proses perencanaan:

1. Semakin pesatnya pembangunan pariwisata

Pesatnya pembangunan pariwisata jika ditinjau melalui perspektif ekonomi, maka B pesatnya pembangunan tersebut e memberikan dampak terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya tidak terlepas dari memaksimalkan sumber daya alam dan potensi-potensi alam yang di miliki suatu daerah. di Pulau Lombok misalnya, dapat diakui

bersama bahwa sektor pariwisata sebagai pemberi sumbangan tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi NTB. secara kuantitatif pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB 3 tahun terakhir tumbuh sebesar 5,06 persen di tahun 2014, 5,82 persen di tahun 2016 dan di tahun 2017 sebesar 6,00 persen (BPS NTB, 2017).

Namun, dibalik keberhasilan tersebut ada suatu hal yang yang patut dipertimbangkan jika dikaitkan dengan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni terancamnya kelestarian daya dukung lingkungan yang terjadi pada titik-titik aktivitas pariwisata karena akumulasi dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian ekonomi tidak terkontrol. Berbagai persoalan lingkungan dari kegiatan ekonomi muncul, baik berupa tanah longsor yang acapkali terjadi pada destinasi Sembalun, pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah industry perhotelan yang ada di Gili Trawangan, dan tingginya konsumsi air tanah yang kemudian berakibat pada penurunan volume dan berpotensi meningkatkan rembesan air laut ke tanah yang akhirnya mengancam ekosistem di sekitar. Hal tersebut juga acapkali terjadi di Gili Trawangan dengan tingginya aktivitas ekonomi.

2. Lemahnya pemahaman masyarakat luas dan wisatawan terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan

Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan tentu menjadi hambatan dalam mensukseskan aktivitas pariwisata berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam rangka mengajak masyarakat luas untuk berfikir berkelanjutan adalah sangatlah sulit untuk dicapai, ini kemudian dipandang sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek yang berujung pada sifat egoistik dan eksploitatif.

Kanom (2015) misalnya, mengemukakan pandangan terhadap lambatnya perkembangan pariwisata di Destinasi Kuta Lombok disebabkan oleh rendahnya

kulaitas SDM dalam memahami pariwisata berkelanjutan. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata haruslah didukung oleh komponen yang vital, yakni sumber daya manusia yang berkualitas.

Dapat dikatakan juga bahwa hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkan dan pencapaian eksistensi pariwisata yang berkelanjutan.

3. Lemahnya penganggaran

Lemahnya penganggaran adalah penghambat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Beberapa informan menjelaskan bahwa anggaran yang tidak memadai untuk melaksanakan komitmen (paket) perencanaan merupakan kendala selanjutnya. Hasil temuan mengindikasikan bahwa adanya oknum yang tidak bekerja secara utuh. Dalam artian, proses perencanaan intens dilakukan antara Dinas Pariwisata dan GIZ. Faktanya berbagai kesepakatan dihasilkan dan dituangkan kedalam STMP Lombok. Hasil kesepakatan tersebut berupa adanya paket perencanaan yakni STMP Lombok dan pemberian legalitas atas STMP Lombok berupa Peraturan Gubernur.

Namun, Peraturan Gubernur yang mengatur tentang STMP Lombok hingga saat ini belum dihasilkan. Termasuk juga petunjuk teknis pelaksanaan rencana atau pedoman pelaksanaan yang tidak tersejua. Padahal jika mengacu pada berbagai perencanaan yang ada, bahwa perencanaan harus menghasilkan legalitas demi terselenggaranya berbagai strategi dan aksi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok.

Implikasi terhadap ketiadaan Pergub (kebijakan) tersebut dapat dijabarkan kedalam dua bentuk yakni:

a) Titik lemah implikasi kebijakan

Jika diperiksa melalui berbagai rencana kerja masing-masing OPD yang bertanggung jawab atas terselenggaranya rencana aksi. Maka tidak akan ditemukan sinkronisasi rencana aksi STMP dengan berbagai rencana OPD.

Berbagai hasil pengamatan lapangan juga mengindikasikan bahwa aktivitas pembangunan destinasi di berbagai wilayah destinasi di Pulau Lombok adalah lahir dari program pemerintah daerah provinsi (Geopark Rinjani). Artinya berbagai program pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan tidak lahir dari STMP Lombok melainkan lahir dari Geopark Rinjani. Akan tetapi memiliki

kemiripan antara keduanya jika dilakukan proses observasi. Berbagai bias yang terjadi pada akhirnya sebagai akibat dari status legalitas STMP yang tak kunjung terealisasi. Pada akhirnya ini kemudian yang menjadikan titik lemah terhadap implikasi kebijakan dengan tidak direfleksikannya STMP Lombok kedalam rencana kerja berbagai *stakeholder (lead agency)*

b) Titik kuat implikasi kebijakan

Pada perspektif lain misalnya, bahwa berbagai rasionalitas terhadap tidak adanya kebijakan STMP bermunculan. Salah satunya seperti pertimbangan geografis Provinsi NTB yang terdiri atas Pulau Lombok dan Sumbawa.

Berbagai informan misalnya memberikan pandangan bahwa tidak dilaksanakannya proses kebijakan STMP Lombok didasarkan atas pertimbangan perencanaan yang hanya mencakup Pulau Lombok. Sedangkan lebih lanjut informan menjelaskan bahwa syarat menghasilkan kebijakan (Pergub) adalah dengan asas *collective* dan *equality*. Artinya Pergub dapat terealisasi apabila juga STMP mencakup Pulau Sumbawa.

4. Lemahnya sinergitas

Kendala selanjutnya adalah, kurangnya sinergitas baik antar daerah maupun antar sektor. Persoalan ini acapkali berkaitan dengan bentuk

pembangunan pariwisata berkelanjutan yang seolah-olah terpisah dari kegiatan sektor lain. Artinya pembangunan pariwisata berkelanjutan seringkali dipahami sebagai bukan tugas bersama antar sektor. Terhambatnya proses perencanaan maupun implementasi kerap diakibatkan oleh cara pandang yang salah terhadap isu pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Conyers (1992) juga menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi antar sektor yang berbeda lebih disebabkan oleh buruk komunikasi yang kurang serasi di antara berbagai OPD. Dalam hal ini, Ia juga menjelaskan sebagian kesalahan biasanya dituduhkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau OPD dan atau Tim Perencana lainnya yang terkait dengan tugas dalam mengkoordinasikan aktivitas perencanaan.

Namun, diluar itu ada pula persoalan dalam bentuk perselisihan paham yang sangat fundamental baik antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lainnya (Conyers, 1992). Sebagai contoh, dalam STMP Lombok yang tidak memiliki legalitas hukum (Pergub) seabgaimana yang telah dijelaskan pada beberapa pembahasan sebelumnya. selain karena keterbatasan dana, juga persoalan tersebut dapat dipengaruhi oleh persoalan kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan.

Perumusan Strategi

Setelah diketahui variabel SWOT, maka selanjutnya dirumuskan strategi baru. Matriks SWOT sebagai alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis lingkungan internal (kekuatan-kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang-ancaman). Tujuan dariada matriks ini adalah agar dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (faktor

lingkungan eksternal) yang dihadapi oleh organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) yang dimiliki (Rangkuti, 1997).

Dalam penyusunan strategi menggunakan matrik SWOT, dapat dikategorisasikan menjadi 4 (empat) kategori strategi, yakni strategi *Strength-Opportunity* (SO), *Weakness-Opportunity* (WO), *Strength-Threat* (ST), dan *Weakness-Threat* (WT).

- a. Strategi SO dimana strategi difokuskan pada penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
- b. Strategi WO dimana penyusunan strategi dengan meminimalkan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
- c. Strategi ST difokuskan pada penggunaan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal.
- d. Strategi WT merupakan penyusunan strategi dengan meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Berdasarkan matriks internal-eksternal, strategi utama pembangunan pariwisata berkelanjutan difokuskan pada strategi *penetration* dan *development*. Maka untuk itu, dalam menyusun strategi SO, WO, ST dan WT ini akan diarahkan pada pencapaian-pencapaian *penetration* dan *development*. adapun matrik SWOT yang dimaksudkan sebagai berikut:

Tabel 5.23

Alternatif Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

<p>EFAS</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <p>IFAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Keindahan gunung rinjani dan keunikan alamnya Posisi geografis yang strategis Pulau kecil yang tersebar dan memiliki keunikan masing-masing Keberagaman agama dan budaya Antusias masyarakat dalam memanfaatkan pariwisata 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur pariwisata yang kurang memadai Lemahnya Penganggaran Kurangnya kualitas SDM pariwisata yang professional Sistem pengelolaan destinasi yang belum terpadu Kurangnya pemahaman masyarakat luas akan pariwisata yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan Kurangnya sinergitas antar daerah
	<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasar pariwisata yang membaik Kemunculan institusi pendidikan kepariwisataan Perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Lombok Beroperasinya Lombok International Airport Lombok ditetapkan sebagai kawasan pariwisata nasional. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemasaran pariwisata berdasarkan keindahan alam, keunikan alam dan budaya lokal. Bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam rangka peningkatan promosi pariwisata berkelanjutan. Promosi keindahan gunung rinjani dan pulau-pulau kecil melalui video pendek pada pintu kedatangan Bandara Internasional Lombok Memaksimalkan citra Lombok yang ditetapkan sebagai KSPN melalui aktivitas promosi. Melibatkan masyarakat dalam pemasaran pariwisata berkelanjutan
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Semakin pesatnya pembangunan pariwisata Belum kondusifnya kondisi sosial, ekonomi dan politik Meningkatnya dampak perubahan iklim dan meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada tingginya <i>carbon footprint</i> Lemahnya pemahaman wisatawan terhadap 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Menekankan prinsip konservasi lingkungan dalam rangka proteksi keindahan, keunikan, serta keanekaragaman budaya ditengah pesatnya pembangunan pariwisata Memanfaatkan semangat masyarakat melalui partisipasi (sadar wisata) dalam mencapai stabilitas ekonomi lokal, 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembangunan infrastruktur dengan pertimbangan prinsip yang mengedepankan keberlanjutan Meminimalkan dampak perubahan iklim melalui himbauan atau aturan-aturan lokal Melakukan penutupan sementara (1 kali setahun) aktivitas

pentingnya pariwisata berkelanjutan	lingkungan, sosial, politik dan budaya	pariwisata sebagai pemulihan lingkungan
	3. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan	4. Menyamakan persepsi serta membangun komitmen terhadap pentingnya pariwisata
	4. Peningkatan pemahaman wisatawan terhadap pariwisata berkelanjutan melalui website <i>agen tour and travel</i>	berwawasan lingkungan di lintas pemerintah daerah (kabupaten/kota)

Sumber: Data diolah peneliti, 2017





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok merupakan proses pembangunan yang memanfaatkan pendekatan pembangunan wilayah, mempertimbangkan aspek geografi serta keunggulan komparatif. Dengan memanfaatkan konsep pembangunan wilayah, proses pembangunan pariwisata di Pulau Lombok dapat berkerja dengan rasional dan jauh dari anggapan politis, walaupun pada proses keputusan tertentu merupakan bagian dari keputusan politis. Akan tetapi dengan instrument pembangunan wilayah, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat memberikan atensi penuh terhadap potensi yang dimiliki Pulau Lombok dalam upaya pengembangan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada hakikatnya akan dengan mudah dicapai apabila pada prosesnya mengadopsi kaidah-kaidah teori perencanaan. Jika dianalisis secara implisit, perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok (STMP Lombok) mengadopsi pendekatan perencanaan dengan klasifikasi sinoptik yang dikembangkan Hudson (1971), bekerja secara rasional, ilmiah, dan komprehensif. Artinya antara STMP Lombok menolak proses perencanaan yang dikembangkan oleh Mayer (1985).

Proses perencanaan STMP Lombok secara umum memiliki model dan tahapan tersendiri apabila dilihat melalui sudut pandang model perencanaan.

Oleh karena itu, apabila dilakukan perbandingan antara Proses STMP dengan proses perencanaan yang dikembangkan oleh Mayer, maka proses perencanaan Mayer tidak dapat menunjukkan relevansinya dan eksistensinya pada proses perencanaan STMP Lombok. Artinya, Proses perencanaan Mayer tidak dapat dikatakan *inline* dengan STMP Lombok. Hal demikian terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni;

1. Terlalu luasnya cakupan yang harus dijangkau yang mengakibatkan perdebatan panjang terhadap pengambilan kebijaksanaan. Sehingga dalam menentukan berbagai strategi dan aksi membutuhkan waktu panjang serta berbagai sifat komprehensif sangat sulit untuk dicapai.
2. Ketat terhadap teknik atau cara-cara dalam melakukan setiap tahapan proses perencanaannya, padahal sifat perencanaan yang dikembangkan Mayer berusaha untuk *flexible* dan relevan untuk diaplikasikan di berbagai tempat dan situasi.
3. Mayer tidak memberikan kebebasan dalam pemilihan metodologi atau *theory in planning (substantif)* disetiap tahapannya.
4. Pada tahapan tertentu (tujuan, penilaian dan spesifikasi tujuan) memiliki kerumitan dalam penggunaannya serta membutuhkan waktu panjang untuk melakukan pemahaman atas keterkaitan tahapan-tahapan tersebut.
5. Masyarakat cenderung sebagai pendengar dan bukan bagian dari pengambilan kebijaksanaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka STMP Lombok justru memiliki kecenderungan terhadap model perencanaan yang di kembangkan Hudson dalam Hadi (2013), dengan klasifikasi model perencanaan sinoptik. Hal demikian dapat

dibuktikan melalui ciri utama pada perencanaan sinoptik adalah bahwa model sinoptik selalu terefleksi kedalam perencanaan seperti *rencana induk (master plan)* dan relative memiliki langkah yang sederhana.

Sedangkan dalam konteks pariwisata berkelanjutan, dengan adanya STMP Lombok, komitmen Pemerintah Daerah dengan Lembaga Donor (GIZ) perlu di apresiasi. Akan tetapi kemunculan STMP Lombok dalam membangun pariwisata berkelanjutan apabila dilihat dari 4 kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan berdasarkan Permen Pariwisata No 14 tahun 2014 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, belum mampu mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Secara implisit 4 kriteria tersebut tercermin kedalam tujuan-tujuan STMP Lombok, sedangkan secara implementatif tidak merepresentasikan capaian-capaian tujuan pariwisata berkelanjutan bahkan tidak menunjukkan bahwa STMP di implementasikan. Hal ini kemudian dipengaruhi oleh tidak adanya status legalitas (Pergub) dari STMP Lombok itu sendiri. Tidak adanya Pergub berawal dari dualisme pemahaman terhadap pengambilan kebijakan oleh Dinas Pariwisata dengan GIZ Jerman. Dan yang paling penting adalah STMP Lombok pada akhirnya tidak lebih dari sekedar dokumen perencanaan biasa yang diproduksi melalui proses jualan intelektual.

Sehingga, secara keseluruhan, STMP Lombok hakikatnya gagal memberikan kontribusi sebagai *guiden* untuk mengarahkan pariwisata Lombok kearah yang berkelanjutan. Kegagalan STMP Lombok potensial muncul karena adanya komitmen perencana untuk memanfaatkan penyusunan STMP Lombok sebagai jalan menuju pencapaian materil. Artinya, perencana yang memiliki komitmen mengarah pariwisata Pulau Lombok kearah yang berkelanjutan adalah komitmen yang bersifat semu. Pada konteks perencanaan pun demikian, Proses Mayer juga tidak mampu memberikan relevansinya terhadap STMP karena

sifat dari proses Mayer terlalu sulit dipahami dan terlalu *flexible* untuk diaplikasikan di sektor pariwisata, sedangkan proses STMP relative sederhana.

1.1.2 Faktor Pendukung Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang RIPPARDA tahun 2013-2028 merupakan dokumen regulasi yang menjadi dasar pendukung didalam terselenggaranya perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Secara implisit, pembangunan pariwisata yang di dasarkan pada prinsip berkelanjutan telah termaktub didalamnya, ini tentu menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pariwisata secara berkelanjutan dan meninggalkan model pengelolaan secara konvensional.

Diluar daripada regulasi sebagai pendukung, stabilitas dan peningkatan iklim pasar pariwisata juga menjadi pendukung terhadap proses perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Aktivitas pariwisata akan dapat diarahkan pada berkelanjutan apabila iklim pasar pariwisata baik dalam artian kunjungan pariwisata yang secara bertahap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan adalah sebagai modal penting dalam pemenuhan dimensi ekonomi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Tingginya angka kunjungan wisata tentunya tidak terlepas dari komitmen kelambagaan (baik pusat, daerah, dan pemangku kepentingan maupun lembaga donor internasional), baik dalam konteks pencapaian angka kunjungan juga pencapaian dalam aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

Tentu ini menjadi penguat dalam mendukung upaya-upaya sadar dalam mengelola pariwisata melalui kaidah perencanaan pembangunan

berkelanjutan. Karena baik keinginan maupun komitmen untuk mengarahkan aktivitas konvensional ke aktivitas berkelanjutan adalah suatu modal besar terhadap pencapaiannya. Maka pembangunan berkelanjutan diaktakan berhasil apabila komitmen terhadap pertumbuhan, pemerataan, dan lestari telah mampu untuk dipertimbangkan dan diupayakan.

1.1.3 Faktor Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pesatnya pembangunan pariwisata selain menjadi kesempatan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi juga dapat sebagai penghambat dalam pembangunan itu sendiri, karena jika melakukan pembangunan pariwisata tanpa mempertimbangkan limitasi sumber daya alam, maka selanjutnya menjadi penghambat dalam proses pembangunan pariwisata itu sendiri. Pesatnya pembangunan pariwisata selanjutnya menjadi kendala akibat dari pembangunan yang dilakukan secara konvensional. Sehingga pembangunan pariwisata berkelanjutan kemudian secara eksplisit memiliki citra memperbaiki lingkungan yang telah rusak (ganti rugi) akibat pembangunan yang dilakukan secara konvensional dan hanya memberikan atensi terhadap dimensi ekonomi atau terlalu mengagungkan ekonomi.

Jika disadari bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah strategi baru dan upaya perbaikan pembangunan pariwisata konvensional maka pembangunan pariwisata berkelanjutan tentu memiliki tantangan selanjutnya yakni dimensi lingkungan harus secara cepat menyeimbangkan aspek lainnya yang telah maju pesat. Padahal upaya konservasi atau rehabilitasi sumber daya alam (lingkungan) tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan memaksimalkan pemanfaatan

lingkungan (eksploitasi). Dengan demikian, semestinya pembangunan pariwisata berkelanjutan dipahami sebagai upaya serius melakukan konservasi, memiliki pemahaman dominan terhadap dimensi lingkungan, dan menurunkan sejenak perhatian terhadap dimensi ekonomi.

Selain itu, penghambat selanjutnya adalah masih lemahnya pemahaman masyarakat luas dan wisatawan terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan. Mulai dari masyarakat misalnya, kurangnya pemahaman tentunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan sikap apatis. Tentunya dalam hal ini kurang tepat apabila masyarakat dipandang sepenuhnya sebagai penghambat dalam proses perencanaan pembangunan. Karena realitasnya masyarakat hanya memiliki pandangan jangka pendek terhadap kelangsungan hidup yang dipengaruhi oleh ekonomi yang tak terjangkau. Masyarakat acapkali tidak memiliki perhatian terhadap keberlanjutan, yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat saat ini terpenuhi. Artinya hambatan ini justru muncul karena pekerjaan sosialisasi dan penyadaran oleh pemerintah yang kurang maksimal dan kurang menjangkau. Kemudian lemahnya pemahaman wisatawan juga dipandang sebagai penghambat. Tentu ini juga adanya system penyadaran melalui papan himbauan yang kurang optimal. Artinya, penempatan yang kurang strategis. Selain itu, sifat dari wisatawan yang seringkali egoistik dan pragmatis. Sederhananya, wisatawan seringkali tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian, yang hanya dipikirkan adalah bagaimana wisatawan dapat berlibur, berwisata, bersantai tanpa di bebankan oleh tanggung jawab kebersihan ataupun kelestarian lingkungan.

Faktor anggaran kemudian menjadi faktor penghambat selanjutnya.

Walaupun secara langsung tidak diberikan keterangan terhadap keterbatasan anggaran, melainkan faktor tersebut dihasilkan melalui serangkaian

wawancara dan pengidentifikasian hasil wawancara dengan informan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagaimana menunjukkan bahwa adanya keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada pemberian legalitas terhadap STMP Lombok berupa Pergub (kebijakan). Dengan tidak dipergubkannya STMP Lombok kemudian berimplikasi terhadap tidak diaplikasikannya suatu perencanaan. Artinya penetapan rencana sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan proses perencanaan maupun implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Lombok. Inilah kemudian yang menjadi titik lemah terhadap implikasi kebijakan. Akan tetapi, secara realitas, berdasarkan hasil penelitian, titik kuat dari tidak ditetapkannya STMP Lombok melalui Pergub didasarkan pada cakupan kolektif komposisi pulau yang ada pada Provinsi NTB. secara sederhana, bahwa Pergub akan dapat di tetapkan apabila suatu perencanaan mencakup keseluruhan dari Provinsi NTB.

Sedangkan yang terakhir adalah lemahnya sinergitas antar sektor yang terlibat. Lemahnya sinergitas tidaklah terlepas dari penguasaan atau pemahaman terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tentu ini menjadi kendala selanjutnya, padahal apabila kita menelaah narasi besar (pembangunan pariwisata berkelanjutan) tentu ini merupakan tugas yang melibatkan lintas sektor dan haruslah dipahami secara komprehensif.

1.2 Saran

1. Praktis

Pada konteks legalitas atau proses penetapan kebijakan, haruslah tetap berjalan dan diputuskan, karena baiknya tingkat kualitas perencanaan dapat dilihat dari legalitasnya suatu perencanaan. Berbagai OPD akan menaruh anggapan bahwa perencanaan hanyalah sebatas dokumen, tidak

sebagai kewajiban dalam pelaksanaannya. Sehingga pada intinya, STMP Lombok haruslah diberikan status legalitas berupa Pergub demi proses perencanaan yang taat pada pemikiran yang rasional, komprehensif dan ilmiah. Sesuai dengan pandangan Mayer (1985) bahwa perencanaan memiliki kaitan yang erat dengan pembuatan kebijakan dan acapkali dipertukarkan. Artinya proses kebijakan haruslah tetap dilaksanakan.

Saran lainnya adalah mengenai berbagai strategi yang dihasilkan melalui proses perencanaan. Strategi maupun rencana aksi dalam STMP Lombok semestinya lebih menekankan kuantitas rencana aksi pada aspek atau dimensi lingkungan dan bukan menitikberatkan pada keuntungan ekonomi melalui promosi. Karena mengingat berbagai perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan acapkali hanya sebagai pembangunan ganti rugi. Maka penting untuk memberikan atensi lebih dengan kuantitas yang besar terhadap dimensi lingkungan dibandingkan dengan ekonomi.

Selain itu, penting untuk memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai strategi yang dihasilkan pada matriks SWOT di bab sebelumnya.

Secara khusus yakni strategi dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan maka penting untuk merefleksikan strategi yang memberikan ruang untuk ekologi agar dapat memulihkan dengan sendiri. Maka perlu untuk dilakukan penutupan aktivitas pariwisata sementara 1 kali dalam satu tahun.

Kemudain saran terakhir adalah, dalam penyusunan *Master Plan* pada tahun-tahun berikutnya, alangkah arifnya proses perencanaan tidak lagi melibatkan GIZ Jerman baik sebagai Lembaga donor maupun sebagai fasilitator perencana, melainkan lebih melibatkan masyarakat lokal secara

Oleh karena itu, mengingat pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah persoalan yang kompleks, maka tahapan perencanaan haruslah memiliki prosedur yang mudah dipahami. Tujuannya adalah demi kemudahan dalam pengaplikasian, karena secara substansi pariwisata berkelanjutan adalah sesuatu yang sederhana namun terbilang rumit. Maka diperlukan model perencanaan yang lebih sederhana.

Kemudian, pembangunan pariwisata jika mengedepankan keseimbangan diantara prinsipnya, maka sangat sulit untuk pencapaiannya, untuk itu jika mengacu pada kondisi pembangunan pariwisata di Pulau Lombok, maka paradigma pembangunan berkelanjutan tidak semata berdasarkan prinsip yang seimbang. Melainkan lebih kepada porsi prinsip lingkungan yang semestinya memiliki ruang yang lebih besar mendapatkan perhatian daripada sosial dan ekonomi.



Daftar Pustaka

Abdoellah, Oekan. 2016. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, di Persimpangan Jalan. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Agus Made dan Darma Nyoman, 2016 Evaluasi Pengembangan Desa Budaya Kertalangu Denpasar Sebagai Daya Tarik Wisata. Jumpa, Vol 2, Nomor 2.

Ahmad, Jamaludin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi. Gavamedia. Yogyakarta.

Aras, Guler and Crowther David. 2015. Sustainable Practic: The Real Triple Bottom Line. Developments in Corporate Governance and Responsibility, Volume 5, 1–18. Emerald Group Publishing Limited.

Anderson, James E, 1978, Public Policy Making Second Edition, Holt, Rinehar and Winston, New York.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon; Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui <http://bp3ambon-kkp.org/sustainable-tourism-in-mpa-with-triple-bottom-line-economy-ecology-and-socio-cultural/>

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Budiman, Arif. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

_____. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2017. NTB Dalam Angka.

Camargo, Blanca. Et al., 2016 Toward A Critical Ecofeminist Research Paradigm for Sustainable Tourism. Tourism Social Science Series, Vol. 22, 73-85. Emerald Group Publishing Limited.

Creswell, John W. 2016. Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta; Pustaka Belajar

Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Suatu Pengantar, Yogyakarta; UGM Press.

Conyers, Diana & Peter Hills. 1990. An Introduction to Development Planning in the Third World. John Wiley & Sons. Brisbane.

Damanik, J dan Weber, H.F., 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Gulick, Luther. 1937. Dikutip dalam Frederickson, George, et al. 2012. The Public Administration Theory Prime. Colorado: Westview Press.kartodirjo

Guyadeen Dave, dan Seasons Mark. 2016 Evaluation Theory and Practice: Comparing Program Evaluation and Evaluation in Planning. Journal of Planning Education and Research 1-13. Diakses melalui jpe.sagepub.com

_____. Harian Terbit, Masalah Sampah Jadi Tantangan Bagi Pariwisata Pulau Lombok, diakses melalui <http://lifestyle.harianterbit.com/lifestyle/2015/10/15/44444/80/38/Masalah-Sampah-Jadi-Tantangan-Bagi-Pariwisata-Pulau-Lombok>

Hidayati, D., et. al., 2003. Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur. Jakarta: CV Muliasari.

Hoelman. B Mickael, et., al. 2015. Panduan SDGs: Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. INFID.

Hadi, Suharto. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Jogjakarta. Gadjah Mada University Press.

_____. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara lima Pendekatan. Yogyakarta; Pustaka Belajar.

_____. 2017. Indonesia Sustainable Tourism (ISTA). Diakses melalui www.kemenpar.go.id pada tanggal 20 September 2017.

Islamy, M Irfan, 2003, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Ismayanti, dalam www.Jejakwisata.com diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

Jawa Post, 2017. Pariwisata Dongkrak Perekonomian NTB. edisi selasa 8 Agustus 2017. Diakses pada 25 Agustus 2017

Kencana, Inu dan Welasari. 2015. Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Konam, 2015. Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jumpa Volume 1 Nomor 2, Januari 2015.

Lombokpost.net, 2016, Kerusakan Alam Ancaman Pariwisata NTB, 7 November 2016.

Mayer, Robert R, 1985, Policy and Program Planning, A Developmental Perspective, Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Mathew, Paul and Sreejesh. 2017. Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 31. 83-89. Elsevier.

Mulyadi, Muhammad, et., al. 2015. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Nuratriani, et al., 2015. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 12 No. 2 Agustus 2015: 105-124

Nugroho, Riant dan Wirhatnolo, R.R., 2011. Manajemen Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia.

Nurisyah, Siti. 2001. "Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia. Buletin Taman Dan Lanskap Indonesia". Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000. Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian IPB Bogor.

Orams, dikutip dalam website Ismayanti: www.jejakwisata.com, diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028.

Padin, Carmen. 2012. A sustainable tourism planning model: components and relationships. European Business Review, Vol. 24. No. 6, 510-518. Emerald Group Publishing Limited.

Pendit, Nyoman S. 1994. Ilmu Pariwisata. Jakarta: Toko Agung.

Rangkuti, Freddy. 2008. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.

Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019, diakses melalui sregip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/STMP_Lombok.pdf

_____. Sindonews.com. 2017. Percepatan Pencapaian SDGs: Belajar dari Provinsi NTB. edisi Jum'at 5 Mei 2017. Diakses pada 25 Agustus 2017.

Siagian, Sondang. 2014. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta; PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: alfabeta.

Suharto, Edi. 2015. Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Reflika Aditama. Bandung.

Sukirno, Sadono. 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta;

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh; Read.

Suara NTB. 2017. (Presiden dan TGB Bahas Tingginya Angka Kemiskinan di NTB). diakses melalui media online pada tanggal 10 oktober 2017.

Syamsi, Ibnu., 1986. Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CV. Rajawali.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Wahab, Saleh. 2003. Manajemen Kepariwisataaan. Jakarta: Pradnya Paramita

Widowati Sri dan Mastiani Nyoman. 2013. Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi. Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol. 3, No. 3, Nopember 2013.

Wise, Nicholas. 2016. Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration. Cities, Vol 53. 30-34. Elsevier.

_____. 2002. Word Tourism Organization.



Zauhar, Soesilo. 2001. Administrasi Publik. Malang. Universitas Negeri Malang Press.

